



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

POTENSI DAN STRATEGI PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI KASUS DI KABUPATEN SIJUNJUNG

TESIS



LIS ELFIANTI

09 2120203 343

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2011**

POTENSI DAN STRATEGI PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI KASUS DI KABUPATEN SIJUNJUNG

Oleh Lis Elfianti

(Dibawah bimbingan Dr. Erwin, Msi dan Dr. Sri Zul Chairiyah, MA)

RINGKASAN

Otonomi daerah merupakan peluang dan sekaligus juga sebagai tantangan. Otonomi Daerah memberikan kesempatan yang luas kepada Daerah untuk berkreasi meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki dan dinikmati sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. otonomi dimaksudkan mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah, juga memberikan peluang untuk menggali potensi daerah melalui pungutan daerah berupa Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan penetapan kebijakan hukum berupa Perda.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sedangkan objek penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Sijunjung. dengan tujuan untuk : 1. Mengidentifikasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sijunjung. 2. Mengidentifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sijunjung. 3. Menganalisis Strategi yang digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sijunjung.

Teori yang digunakan adalah teori pelayanan publik dari Davey, Warsito Utomo bahwa otonomi daerah menuntut adanya kemampuan Pemerintah Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang tidak tergantung kepada Pemerintah Pusat dan mempunyai kekuasaan di dalam menggunakan dana-dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, teori kinerja birokrasi David Osborne dan Peter Plastrik serta teori kebijakan publik Josef Riwo Kaho ada empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah.

Pajak dan retribusi prinsipnya dapat memenuhi kriteria : 1). Harus memberikan pendapatan yang cukup bagi daerah sesuai dengan derajat fiskal yang dimilikinya, 2). Harus jelas berdampak pada tanggung jawab fiskal yang dimiliki oleh pemerintah dan yang sangat perlu diperhatikan juga *Pertama* Realisasi perkiraan penerimaan yang secara potensial dapat diperoleh dari pajak dan retribusi yang dibuat berdasarkan asumsi bahwa setiap orang atau badan memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan kewajibannya *Kedua* Biaya akumulasi sumber daya harus dikorbankan dengan upaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, pengelolaan potensi dan penerapan strategi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, masih banyaknya

kendala di lapangan. *Kedua*, Setelah dianalisis ditemukan 3 penyebab Belum optimalnya pengelolaan Potensi Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, potensi PAD faktor penyebabnya : 1) belum tersedianya data basis objek, potensi dan pemetaan Pajak, dan Retribusi Daerah, karenanya besaran pajak dan retribusi, proses pengenaanya belum berdasarkan data potensi yang seharusnya dapat terealisasi, 2) pengaruh Tiga sektor Aktivitas ekonomi wilayah memiliki pengaruh signifikan terbesar, sektor pertanian, Sektor pertambangan dan Sektor jasa, 3) Pengaruh kinerja Ekonomi yang mampu meningkatkan PDRB dan PAD. Jika PAD tidak ditingkatkan melalui pemberdayaan aktifitas perekonomian masyarakat maka PAD akan merupakan pengalihan beban dari pemerintah kepada masyarakat dengan cara tidak adil, pada gilirannya mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat. *Ketiga*, Strategi dan kebijakan yang direkomendasi guna Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah 1. Ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah 2 Intensifikasi sumber-sumber penerimaan yang sudah ada, sebagai komponen penerimaan Pajak dan retribusi Daerah Dalam rangka optimalisasi disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk, yaitu : *Pertama*, Untuk meningkatkan SDM pengelola PAD dalam hal ini DPKD Sijunjung haruslah merubah akuntabilitas birokrasi. Dengan pertanggung jawaban ganda setiap pegawai, akan lahir inovasi dan kreativitas dalam meningkatkan PAD. *Kedua*, Perlu digagas investasi yang akan menciptakan sumber penerimaan pajak dan retribusi yang baru, seperti dengan memanfaatkan potensi pertambangan dan pertanian pendirian pabrik karet, pendirian pabrik tapioka, serta pengelolaan kawasan pariwisata Musiduga, Aie Angek di Kecamatan Sijunjung, *ketiga*, Mengkaji kembali ketentuan tarif pajak dan retribusi pada sejumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi perekonomian saat ini *Keempat*, Perlu dibuat regulasi untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai melalui imbalan ekstrinsik berupa penghargaan kepada pegawai yang berprestasi baik dan hukuman bagi pegawai yang berprestasi buruk. Peningkatan peran pengawasan dari masing – masing atasan langsung pegawai dan perbaikan metode promosi dan jenjang karir dengan prinsip objektivitas dan berkeadilan



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Batusangkar tanggal 8 Oktober 1966 diberi nama Lis Elfianti, sebagai anak kedua dari enam bersaudara dari Ayah Rahmadsyah (Almarhum) dan Ibu Nurhayati (Alm). Istri dari suami tercinta Drs.Yunani,SE, Msi yang di karuniai anak Ikhsanul Isra Yunelfi, Putri Rahmasari Yunelfi dan Muhammad Ridho Yunelfi. Penulis Menamatkan Pendidikan Dasar Negeri No 2 Buo di Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar tahun 1979 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri No 2 Buo tahun 1982 serta Sekolah Menengah Atas Negeri tahun 1985 jurusan IPA, di Nagari yang sama.

Penulis kemudian melanjutkan ke Universitas Muhammad Yamin (UMMY) Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen tamat tahun 1995, pada tahun 2009 berkesempatan melanjutkan pada Program Studi Pembangunan Wilayah Pedesaan, Pemusatan Politik Lokal dan Otonomi Daerah Program Pascasarjana UNAND.

Pernah berkerja PNS di Kantor Camat Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Bagian Kesra Setdakab Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat tahun 1985-1990, 1990-1998, golongan II a sampai dengan golongan III a, pindah tugas dan alih status menjadi PNSD Kabupaten Sijunjung sejak 1998 sampai sekarang dengan pangkat Penata Tk I golongan III d.

Semasa kuliah dan bekerja aktif diberbagai Organisasi Pemuda dan olah raga, pernah sebagai Wakil ketua DPD II KNPI Kabupaten Tanah Datar dan Kandidat Ketua AMPI Provinsi Sumatera Barat. Juga sebagai Sekretaris KONI Kabupaten Tanah Datar.

Padang, 28 Juli 2011

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Taufik dan hidayahNya jualah penulis telah dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini ditulis berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Potensi dan Strategi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Studi kasus di Kabupaten Sijunjung “.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan segenap rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Erwin, MSi sebagai Pembimbing I atas saran, arahan dan bimbingannya selama penelitian dan dalam penulisan tesis ini. Selanjutnya tak terlupakan ucapan terima kasih penulis tujukan kepada ibu Dr. Sri Zul Chairiyah, MA sebagai Pembimbing II yang telah memberikan saran dan kritik sehingga selesainya penulisan tesis ini.

Selanjutnya terima kasih penulis kepada Bapak Bupati Sijunjung, Bapak Kepala DPKD Kabupaten Sijunjung dan rekan-rekan Kantor DPKD teristimewa buat rekan-rekan di Bidang Pendapatan Kabupaten Sijunjung, Rekan-rekan Mahasiswa Pasca Sarjana Sijunjung, serta informan yang telah membantu penulis dalam penelitian ini, juga pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, serta staf Program Pascasarjana Unand yang sangat dihargai, diucapkan terima kasih.

Teristimewa ucapan bangga, syukur dan terimakasih atas dukungan Ayahanda Rahmadsyah (Alm), Ibunda Nuhayati (Alm), dan kerelaan suami Drs.Yunani, SE, M.Si , anak tercinta Ikhsanul Isra Yunelfi, Putri Rahmasari Yunelfi, Muhammad Ridho Yunelfi, yang telah memberikan semangat sehingga, dapat terselesaikannya tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian yang dituangkan dalam tesis ini akan bermanfaat bagi pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya khususnya Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Politik Lokal dan Otonomi Daerah.

Padang, 28 Juli 2011

Penulis

DAFTAR ISI

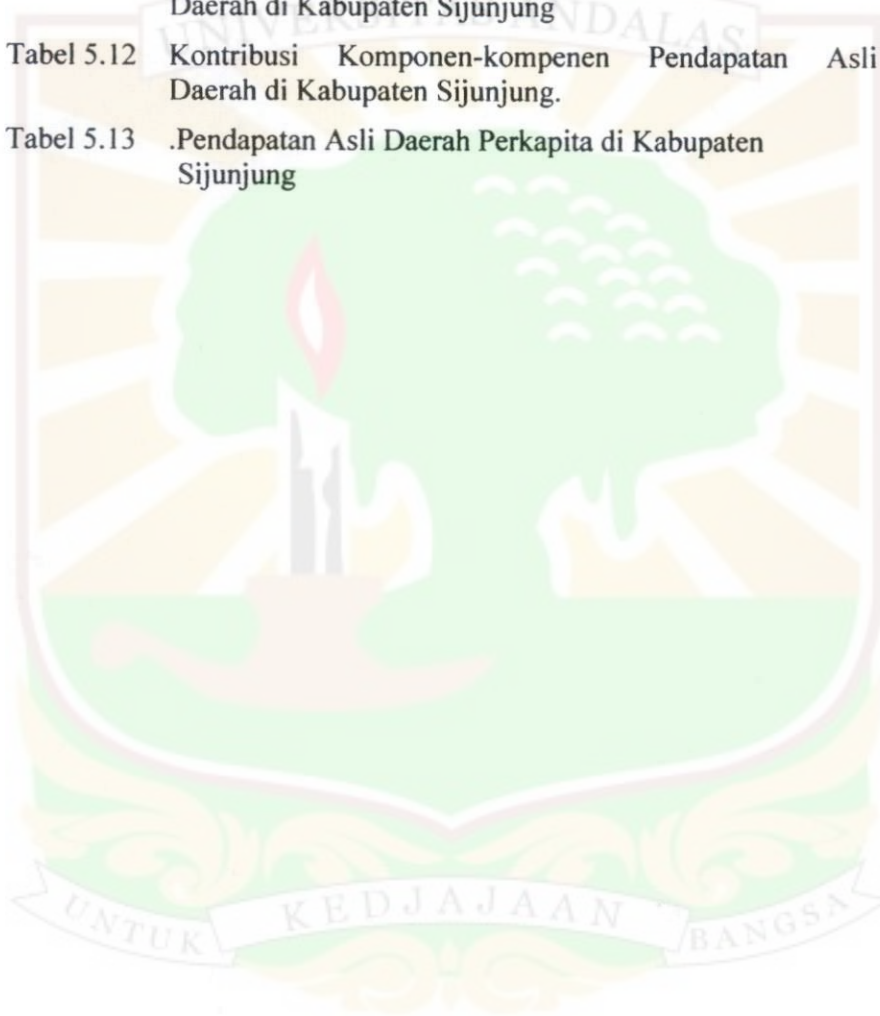
RINGKASAN.....	i
SUMMARY.....	iii
Kata Pengantar	x
Daftar isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xvi
Bab. I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	13
C. Tujuan Penelitian	14
Bab. II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu .Yang Relevan.....	15
B. Tinjaun Teori.....	19
1. Otonomi Daerah	19
2. Potensi Penerimaan	26
3. Strategi Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah.....	36
4. Konsep Perpajakan dan.Pajak Daerah.....	39
5. Konsep Retribusi dan Retribusi Daerah.....	49
C. Skema Pemikiran Penelitian	52
Bab. III METODE PENELITIAN	55
A. Metode Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Peranan Peneliti	56
D. Unit Analisis Penelitian	57
E. Teknik Pemilihan Informan.....	57
F. Teknik Pengumpulan Data.....	58
G. Tranggulasi Data.....	59
H. Analisa Data.....	61

Bab. IV	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	62
A.	Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	62
B.	Struktur Organisasi DPKD Kab.Sijunjung	76
C.	Tugas Pokok dan Fungsi DPKAD	79
D.	Keadaan Pegawai DPKD Kab.Sijunjung.....	82
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	85
A.	Potensi Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah	85
B.	Faktor Faktor Kendala Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Otonomi Daerah.....	101
C.	Strategi Peningkatan PAD dari Pajak dan Retribusi Kab.Sijunjung.....	112
1.	Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi.....	117
2.	Intensifikasi .Pajak dan Retribusi.....	123
D.	Optimalisasi Kelembagaan.	128
1.	Instansi Pengelola PAD.....	129
2.	Perda tentang PAD.....	133
Bab. VI	PENUTUP	150
A.	Kesimpulan	150
B.	Saran	151
Daftar Pustaka	153
Lampiran	157

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Tabel 1.1 Sumber-Sumber Penerimaan Daerah	5
2.	Tabel 2.1 Nama , fokus dan hasil pnelitian terdahulu	18
3	Tabel 2.2 Jenis Pajak Daerah Berdasarkan UU Keberlakuannya	30
4	Tabel 2.3 Jenis Retribusi Daerah Berdasarkan UU Keberlakuannya	30
5.	Tabel 3.1 Daftar Informan.....	58
6	Tabel 4.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sijunjung menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Metode Exponential) Population Growth by Sub District and Sex (Exponential Method) 2008	65
7.	Tabel 4.2 Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin Population by Sex 2004-2008	66
8	Tabel 4.3 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelammin Population by Sub District and Sex 208	67
9	Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2008	67
10.	Tabel 4.5 Perkembangan PDRB Kabupaten Sijunjung Atas Harga Konstan 2000 dari Tahun 2004 s/d 2009	69
11.	Tabel 4.6 Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Sijunjung atas dasar berlaku menurut lapangan usaha tahun 2006- 2008 (jutaan rupiah)	70
12.	Tabel 4.7 Jumlah dan persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sijunjung 2005-2009	73
13	Tabel 4.8 Keadaan Pegawai DPKD Kabupaten Sijunjung berdasarkan Golongan dan Jabatan	82
14.	Tabel 4.9 Data Pendukung beban tugas PKB Kabupaten Sijunjung .	83
15	Tabel 5.1 Lapangan usaha Pajak dan Retribusi	86
16.	Tabel 5.2 Pertumbuhan PAD dan PDRB AHB kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2009	
17.	Tabel 5.3 Derjat Otonomi Fiskal daerah berdasarkan ratio keuangan daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2009	
18	Tabel 5.4 Derjat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2009	91
19.	Tabel 5.5 Perbandingan Hasil Potensi Penerimaan PAD Dengan Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2009	96
20	Tabel 5.6 Kontribusi Nilai Tambah Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten Sijunjung 2005– 2009	105
21.	Tabel 5.7 Analisis Basis Ekonomi Untuk Masing-Masing Sub Sektor terhadap PDRB Di Kabupaten Sijunjung 2006 – 2009	105

22	Tabel 5.8	Laju Pertumbuhan dan Indeks perkembangan Agregat pendapatan Regional dan angka angka perkapita atas dasar harga konstan 2000 (PDRB) Kabupaten Sijunjung 2006 sampai 2009	1110
23	Tabel 5.9	Perkembangan PDRB Kabupaten Sijunjung Atas Harga Konstan 2000 dari Tahun 2006 s/d 2009	111
24	Tabel 5.10	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Sijunjung Tahun 2007-2009	112
25	Tabel 5.11	Kontribusi Komponen-komponen dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sijunjung	113
26	Tabel 5.12	Kontribusi Komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sijunjung.	114
27	Tabel 5.13	.Pendapatan Asli Daerah Perkapita di Kabupaten Sijunjung	116



DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1.	Gambar 2.1 Skema Alur pikir peningkatan Pendapatan	54
2.	Gambar 5.1 Pola analisis dan rencana realisasi berbasis potensi	99
3.	Gambar 5.2 Perkembangan Komponen PAD Kabupaten Sijunjung.	114
4.	Gambar 5.3 Proses Sosialisasi Perda Baru	137
5.	Gambar 5.4 Bagan Upaya Kebijakan	142



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran

1. Perhitungan Potensi Penerimaan PAD Kabupaten Sijunjung.....	1
2. Pedoman Wawancara.....	16
3. Rekapitulasi Potensi Pos Pajak.....	22
4. Jenis Pajak dan Retribusi.....	27



B A B I

PENDAHULUAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan peluang dan sekaligus juga sebagai tantangan. Otonomi Daerah memberikan kesempatan yang luas kepada Daerah untuk berkreasi dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki dan dinikmati sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Disisi lain otonomi juga sebagai tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selama ini perencanaan dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah lebih banyak aturannya sama seluruh daerah dari Pemerintah Pusat dengan pola perencanaan TOP DOWN MECHANISM, sementara saat ini program yang dibuat oleh Pemerintah Pusat haruslah dikurangi seiring dengan berlakunya Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah². Oleh sebab itu, implementasi Undang-Undang tersebut menuntut Pemerintah Daerah agar lebih mandiri dibidang keuangan karena belanja langsung dan tidak langsung saat ini atau yang lebih dikenal dengan belanja rutin dan pembangunan mendatang haruslah lebih banyak berasal dari Pajak dan Retribusi. Potensi Pajak dan Retribusi berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi sektoral dan sistem

¹ Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang[1].Qs.Alfaatihah ayat 1

² UU Pemerintah Daerah tahun 2004, Undang-Undang RI Nomor 32 dan 33 tahun 2004:Jakarta,Sinar Grafika, hal 258

serta kemampuan aparaturnya pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber Pajak dan Retribusi potensial yang dapat dijadikan sebagai basis utama Pendapatan Asli Daerah.

Kehadiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, diubah dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008³, diharapkan dapat menjadi landasan bagi terwujudnya masyarakat sipil yang demokratis. Sebab pada dasarnya pemberian otonomi dalam rangka desentralisasi diarahkan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di daerah. Dengan esensi dari Undang-undang tersebut yang menganut prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari Pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan kepada daerah yang mengacu pada Undang-Undang

³ Undang-undang Pemerintahan Daerah tahun 2008, Undang-undang RI nomor 12 tahun 2008; Jakarta, Sinar grafika, Mei 2008.hal 373

(UU) Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa :

- a. Kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan.
- b. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak bagi mendapatkan bagi hasil dari sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya.
- c. Hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan

Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik kalau didukung faktor-faktor berikut:

- a Pemerintah Pusat yang mampu melakukan pengawasan dan enforcement;
- b SDM yang kuat pada Pemda guna menggantikan peran Pemerintah Pusat;
- c Keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

Pada sisi lain berjalannya pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah dalam membiayai daerah, memberikan peluang untuk menggali potensi daerah melalui pungutan Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dengan penetapan kebijakan hukum berupa Perda. Menurut Pasal 1 ayat 6 UU No. 34 Tahun 2000, Pajak Daerah

adalah pungutan wajib yang dilakukan terhadap orang pribadi atau badan oleh daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, sedangkan Retribusi Daerah Menurut Pasal 1 ayat (28) UU No. 34 Tahun 2000 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Adanya beberapa Perda Kabupaten Sijunjung yang menetapkan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah dibatalkan oleh pemerintah pusat, diantaranya dengan alasan objek yang dipungut pada pajak daerah dan retribusi daerah tersebut pada dasarnya sudah dikenakan sebagai objek pajak pusat, terutama dalam memberikan jawaban atas adanya dugaan telah terjadi tumpang tindih objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di samping itu adanya rumor yang berkembang, sejak era reformasi terkesan pada setiap daerah saling berlomba memperbesar tingkat pendapatan asli daerahnya melalui instrumen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dinilai telah menambah beban bagi investor yang mau berusaha atau menanamkan modalnya di daerah yang bersangkutan.

Seluruh jenis pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang dirinci dalam 2 kategori :1). Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber diklasifikasikan sumber diluar pemerintah daerah (*external source*), yang diperoleh dari pihak luar pemerintah daerah. 2) Pendapatan yang digali dan ditangani oleh pemerintah daerah yang terdapat dalam wilayah yuridisnya serta seluruh jenis pembiayaan (pengeluaran) daerah yang dilakukan dalam

menjalankan tugas pemerintahan dan program pembangunan secara jelas tercantum dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Terkait dengan pendapatan asli daerah, seorang pakar dari World Bank berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20% maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1

Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

URAIAN	PUSAT	DAERAH	
		PROPINSI	KAB/KOTA
1. Penerimaan Asli Daerah :			
□ Pajak Daerah	-	-	100 %
□ Retribusi	-	-	100 %
□ Bagi Laba dari BUMD	-	-	100 %
2. Dana Perimbangan :			
□ Bagi Hasil Pajak :			
⇒ PBB *)	10 %	16,2 %	64,8 %
⇒ BPHTB *)	20 %	16 %	64 %
□ Sumber Daya Alam (SDA) :			
⇒ Kehutanan	20 %	16 %	32 % + 32 %
⇒ Pertambangan	20 %	16 %	32 % + 32 %
⇒ Perikanan	20 %	16 %	32 % + 32 %
⇒ Minyak Bumi **)	85 %	3 %	6 % + 6 %
⇒ Gas alam	70 %	6 %	12 % + 12 %
□ Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10 %	90 %
□ Dana Alokasi Khusus (DAK)	-	?	?
3. Pinjaman Daerah	?	?	?
4. Penerimaan lain-lain	?	?	?

*) 10 % bagian Pusat dari PBB dan 20 % dari BPHTB itu akan dialokasikan kepada seluruh Kab/Kota

**) Pembagian setelah dipotong komponen perpajakan

Sumber : UU No34 tahun 2000 dan UU No33 tahun 2004

Strategi pemungutan dengan optimalisasi hasil adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada

melalui penghitungan potensi dengan penyusunan sistem informasi basis data potensi. Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau obyek pajak dan retribusi daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD, tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pajak dan retribusi baru; yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Estimasi potensi melalui penyusunan basis data yang dibentuk dan disusun dari variabel-variabel yang merefleksikan masing-masing jenis penerimaan (pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain) sehingga dapat menggambarkan kondisi potensi dari suatu jenis penerimaan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya agar dapat melaksanakan dan membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Untuk itu daerah perlu menggali sumber-sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cukup dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan. Dengan adanya otonomi daerah, maka diharapkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan peluang dan mencari terobosan untuk meningkatkan PAD-nya sehingga dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar atau menjadi andalan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Pertumbuhan PAD (dalam ribuan) dan PDRB AHB (dalam ribuan) Kabupaten Sijunjung tahun 2005-2009 berdasarkan data awal 2005 PAD Rp. 10 336 306, 2006 Rp.13 224 774, 2007 Rp.21 145 799, 2008 Rp.24 423 791, dan tahun 2009 Rp.25 982 270 sedangkan PDRB berdasarkan harga berlaku tahun

2005 PDRB AHB Rp. 1 531 897 950, 2006 Rp. 1 820 531 620, 2007 Rp. 2 072 308 630, 2008 Rp 2 417 981 860, dan pada tahun 2009 Rp. 2 712 528 650⁴

Secara lebih spesifik kinerja keuangan daerah dapat dilihat dengan dua pendekatan antara lain: (a) pendekatan elastisitas PAD terhadap PDRB dan (b) elastisitas PAD terhadap APBD. Namun selama periode analisis kedua besaran ini memperlihatkan kecenderungan yang cukup variatif. Pada periode 2004-2009 PAD Kabupaten Sijunjung mengalami peningkatan rata-rata sebesar 27,37 %, di sisi lain Pendapatan Domestik Regional Bruto mengalami peningkatan sebesar 15,42 %, Selama periode tersebut ternyata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pendapatan Domestik Bruto. Tingginya pertumbuhan PAD jika dibandingkan dengan PDRB ini akan berdampak terhadap tingginya nilai elastisitas PAD. Nilai elastisitas PAD rata-rata lebih besar dari PDRB. Setiap terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi 1,8 % maka akan meningkatkan Penerimaan PAD sebesar 27,37 %

Sehubungan hal tersebut, Davey⁵ mengatakan bahwa otonomi daerah menuntut adanya kemampuan Pemerintah Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang tidak tergantung kepada Pemerintah Pusat dan mempunyai kekuasaan di dalam menggunakan dana-dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan dan undang-undangan yang berlaku.

Posisi keuangan merupakan hal yang sangat penting terutama jika dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi. Artinya, keberhasilan otonomi daerah

⁴ Sumber: evaluasi pelaksanaan RPJM Kab Sijunjung tahun 2006-2010 hal 26 (diolah)

⁵Davey, 1988, Pembiayaan Pemerintahan Daerah ; Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta .halaman 258

tidak terlepas dari kemampuan daerah dalam bidang keuangan, terutama kemampuan penerimaan keuangan daerah sektor Pajak dan retribusi . Namun demikian, hal ini tidaklah dimaksudkan bahwa semua kebutuhan daerah dapat dibiayai sendiri oleh daerah yang bersangkutan, karena sumber penerimaan PAD hanyalah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah disamping subsidi dari Pusat dan Propinsi serta penerimaan yang sah lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 33 tahun 2004.

Besaran PAD dan APBD berdasarkan ratio keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2009 jika dilihat berdasarkan besaran kemampuan Keuangan Daerah yang berasal dari PAD, pada tahun 2005 PAD Rp10 336 306 dari APBD Rp. 193 296 452, 2006 PAD Rp. 13 224 774 dari APBD Rp. 316 784 070, 2007 PAD Rp. 21 145 799 dari APBD Rp. 423 015 577, 2008 PAD Rp. 24 423 791 dari APBD Rp. 488 191 183, 2009 PAD Rp. 25 982 270 dari APBD Rp. 413 867 598.

Sumber daya alam, tidak dapat dipungkiri merupakan sumber pendapatan yang paling cepat dan memungkinkan untuk meningkatkan Pajak dan Retribusi. Namun tanpa kebijakan pengelolaan dan penegakan hukum yang jelas, maka apa yang dialami daerah berkaitan dengan sumber daya alamnya akan bisa menjadi lebih buruk.

Implementasi dari Undang-undang nomor 32 tahun 2004 memang memerlukan kesiapan daerah dari segala aspek, dimana Pajak dan Retribusi yang merupakan sumber penerimaan saja tidak cukup untuk menilai suatu daerah mampu atau tidak dalam melaksanakan otonomi, melainkan ada beberapa

indikator lainnya yang telah dikembangkan Depdagri (Departemen Dalam Negeri) sebagai indikator untuk mengukur kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi (kewenangan), yakni : kelembagaan; kepegawaian; keuangan daerah; peralatan; partisipasi masyarakat; organisasi dan administrasi; ekonomi daerah; serta demografi.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas desentralisasi, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lainnya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Ditinjau dari kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sampai saat ini distribusi kewenangan perpajakan antara Daerah dengan Pusat terjadi ketimpangan yang relatif besar. Hal ini tercermin dalam jumlah penerimaan Pajak Kabupaten Sijunjung yang dipungut Daerah hanya sekitar 3,45% dari total penerimaan pajak (pajak Pusat dan Daerah). Demikian juga distribusi pajak antar Daerah juga sangat timpang sekali dan bervariasi (ratio PAD tertinggi dengan terendah mencapai 600 kali). Peranan pajak dalam pembiayaan Daerah yang sangat rendah dan sangat bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang

cukup besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal), dan kemampuan masyarakat.

Besaran APBD berdasarkan Pos penerimaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2009⁶ bila dilihat berdasarkan pos penerimaan APBD menunjukan angka yang sangat kecil pada penganggaran yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah dan sumber keuangan terbesar adalah dana perimbangan, pos penerimaan Pajak dan tahun 2005 -2009 hanya rata rata 6,11 %, , pos penerimaan dana perimbangan tahun 2005-2009 rata rata 86,63 %,, pos penerimaan Pendapatan lain-lain tahun 2005 -2009 hanya rata rata 7,26%,dan selama ini Pemerintah Sijunjung dalam menetapkan target penerimaan Pajak belum berdasarkan potensi yang ada dan target ditetapkan berdasarkan perkiraan jauh dibawah potensi yang ada.

Dalam era otonomi daerah ini, Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai Institusi Pemerintah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, memiliki wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak dan Retribusi. Untuk memberikan solusi yang terbaik pemerintahan daerah diberikan koridor peraturan perundangan yang memberikan legalitas dalam melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Salah satunya adalah melalui Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini. Dalam konteks ekonomi, otonomi

⁶ *APBD Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2009*, evaluasi pelaksanaan RPJM Kab Sijunjung tahun 2006-2010 hal 26 -29 (diolah)

daerah sejatinya merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas baru dalam hubungan negara dan rakyat di sisi pelayanan.

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari bentuk reformasi paket kebijakan Undang-Undang Perpajakan., telah melalui proses pembahasan untuk mendapatkan berbagai masukan. Undang-Undang ini merupakan upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi, dengan memberikan daerah melalui perluasan objek pajak dan retribusi daerah. Dalam UU ini disebutkan setidaknya lima jenis Pajak Provinsi dan sebelas Pajak Kabupaten/Kota. Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan tidak hanya sekedar menambah kuantitas jenis pajak, akan tetapi harus dapat memberikan banyak perubahan di sisi substansi, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dari pajak dan imbal manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai subjek itu sendiri.

Undang Undang Pajak Daerah ini sejatinya membawa paradigma baru dalam ruang gerak kuasa-perpajakan dengan memberikan sebuah batasan lebih pasti, baik dalam pengaturan (yuridis) maupun pemungutan (administrasi) oleh pihak Pemda. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini bersifat *close list*, pihak Pemda, tidak lagi memiliki peluang diskresi memungut di luar yang tercantum di dalam Undang-undang ini, sehingga ini akan meredusir keluarnya berbagai Perda yang bermasalah, juga diharapkan membawa angin perubahan dalam mendorong sikap realistik Pemda untuk mampu mengkalkulasi kapasitas pelayanan sebelum membuat Perda baru, mendorong tata kelola anggaran yang akuntabel, dimana alokasi pajak daerah menjadi jelas. Sehingga

tidak dijadikan iuran wajib bagi rakyat , tetapi menjadi sebuah kontra prestasi hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang memadai .

Bagi daerah tanpa Sumber Daya Alam, jalan satu-satunya untuk memperbesar pendapatan adalah dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Ketidakpastian penerimaan Daerah yang disebabkan oleh perhitungan Dana Alokasi Umum yang kurang transparan dan lambatnya pencairannya menyebabkan daerah-daerah harus mencari terobosan demi memenuhi peningkatan kebutuhan yang bertambah diantaranya dengan pemindahan beban personel baik pegawai maupun guru.

Pungutan-pungutan Pajak dan retribusi diberlakukan berdasarkan Perda di beberapa daerah, dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan demi pemenuhan kebutuhan operasional daerah. Keluhan demi keluhan disampaikan oleh kalangan pengusaha yang menuding bahwa otonomi daerah menyebabkan *high cost economy*, dan itu sangat memberatkan usaha mereka di saat sulit seperti sekarang ini. Beberapa waktu lalu keberatan atas pungutan-pungutan itu diantaranya datang dari pengusaha pertambangan dan konstruksi.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan untuk peningkatan pendapatan daerah, maka kiranya perlu dianalisis potensi ekonomi (kontribusi) dari masing-masing sektor. Sehingga pada akhirnya dapat menyusun perencanaan pembangunan di daerah secara efektif dan efisien sebagai modal pembangunan dalam mewujudkan otonomi daerah.

B. Permasalahan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak dan Retribusi merupakan tulang punggung pembangunan wilayah. Disisi lain berdasarkan Pendapatan Asli Daerah berkaitan secara signifikan dengan sumber-sumber pendapatan tersebut, oleh karena itu dalam periode tertentu suatu sumber pendapatan daerah diharapkan tidak mengalami fluktuasi berarti, jika terjadi fluktuasi, hal tersebut mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber Pajak dan Retribusi.

Pemerintah Daerah diharapkan dapat memanfaatkan peluang dan mencari terobosan untuk meningkatkan Pajak dan Retribusi sehingga dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar atau menjadi andalan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Posisi Penerimaan Pajak dan Retribusi Kabupaten Sijunjung dalam perkembangannya mengalami kenaikan tiap tahun, kecuali pada tahun 2005 dengan adanya Pemekaran Kabupaten Dharmasraya dari Kabupaten Sijunjung, tahun 2004 PAD Kabupaten Sijunjung Rp.16.310.008.900. mengalami penurunan tahun 2005 menjadi RP. 10.748.217.456. dan selanjutnya terus mengalami peningkatan sampai tahun 2010 RP.29.547.873.448.

Kondisi penerimaan ini menimbulkan pertanyaan, apakah besaran penerimaan tersebut telah optimal sesuai dengan potensi sumber penerimaan? apakah faktor yang mempengaruhi pencapaian PAD yang seharusnya kontribusi terbesar itu Pajak dan Retribusi Daerah ? ! dan Apakah telah dilakukan strategi dan kiat-kiat pengelolaan Pajak dan Retribusi secara optimal dalam penggarapan potensi yang ada ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan sekaligus perlu dilakukan penelitian. Berdasarkan

pemikiran ini dirumuskan permasalahan penelitian yang merupakan fokus kajian studi ini.

1. Bagaimanakah potensi Pajak dan Retribusi Daerah yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sijunjung ?
2. Faktor-faktor kendala kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sijunjung?
3. Strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan PAD dari Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sijunjung.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah uraian diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Mengidentifikasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sijunjung.
2. Mengidentifikasi Faktor-faktor kendala kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sijunjung.
3. Menganalisis strategi yang digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sijunjung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang terkait dan relevan dengan penelitian Potensi dan Strategi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Studi kasus Kabupaten Sijunjung dengan menggunakan teori otonomi mendorong kemandirian daerah dengan prakarsa kebijakan, Ryass Rasyid dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah menurut Josef Riwo Kaho ini, serta teori Davey⁷ mengatakan bahwa otonomi daerah menuntut adanya kemampuan Pemerintah Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang tidak tergantung kepada Pemerintah Pusat dan mempunyai kekuasaan di dalam menggunakan dana-dana tersebut, adalah penelitian Hariyandi (2002) judulnya " Identifikasi Jenis Pajak Daerah serta potensinya. Hasil penelitian Hari, Tingkat pertumbuhan dan kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah di Kota Dumai selalu mengalami fluktuases dan dengan melihat pertumbuhan dan kontribusinya. Hasil perhitungan pertumbuhan dan kontribusi tersebut dilakukan *shift* dan *share* sehingga menghasilkan klasifikasi; prima, potensial, berkembang dan terbelakang maka perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah agar mengalami peningkatan pertumbuhan dengan mengurangi fluktuasinya. melakukan perhitungan potensi menggambarkan potensi yang sebenarnya.serta melakukan sinergi melalui koordinasi dan komunikasi dalam meningkatkan pendapatan jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

⁷ Op.cit, 1988, .halaman 258

Hasil penelitian Muhammad Ridwansyah (2003) dengan judul ” Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terhadap total (APBD) ” Dalam penelitian ini Muhammad Ridwansyah menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD dengan melakukan peningkatan intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dilakukan Ekstensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis Pajak dan Retribusi dengan kondisi potensi yang ada.

Adapun penelitian Achmad Lutfi (2006) judulnya ” Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Suatu Upaya Dalam Optimalisasi Penerimaan PAD adalah ada 2 cara untuk memaksimalkan pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi dengan menerapkan pajak dan retribusi daerah yang baru, dengan sumber potensi pendapatan yang baru.

Penelitian Frenadin Adegustan :((2009) dengan judul Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah studi kasus di Kota Padang, Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, akan meningkatkan produktivitas PAD, tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru, yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Sedangkan Doni Mirawandi (2009); Dampak Pemekaran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah studi kasus di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dengan hasil dimana kemampuan keuangan Lokal atau PAD yang mengalami dampak

negatif sedangkan kemampuan pengelolaan Belanja berdasarkan dengan upaya pengumpulan PAD dan kontribusi belanja terhadap PBRB berdampak positif dan untuk mengoptimalkannya Pendapatan Asli Daerah dengan menaikkan tarif dan basis data. Selanjutnya Ferizaldi (Unand 2010) Analisis Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Birokrasi Dalam meningkatkan PAD Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah di Naggroe Aceh Darussalam tentang Sumber Penerimaan Daerah yaitu Pajak dan Retribusi Daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus pembahasan, pembahasan pada penelitian ini di tujukan pada kajian untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD) khususnya Pajak dan Retribusi dengan lebih memfokuskan pada kajian Potensi dan sumber-sumber pendapatan dari Pajak dan Retrebusi Daerah

Dengan strategi pemungutan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada melalui penghitungan potensi dengan penyusunan sistem informasi basis data potensi. Estimasi potensi melalui penyusunan basis data perjenis penerimaan sehingga dapat menggambarkan kondisi potensi dari suatu jenis penerimaan, dan selanjutnya mencoba memberikan alternatif strategi peningkatan pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan Retribusi Daerah. Perbedaan lainnya terletak pada metode dan teknik analisa, dimana penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Tabel 2.1

Nama , fokus dan hasil pnelitian terdahulu

No	Peneliti	Fokus	Hasil	Ket.
1	Hariyandi	Identifikasi Jenis Pajak dan Reribusi Daerah serta potensinya di Kota Dumai.	Perlu dilakukannya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah agar mengalami peningkatan pertumbuhan dengan mengurangi fluktuasinya serta melakukan sinergi antara Pemerintah Kota Dumai dan DPRD Kota Dumai melalui koordinasi dan komunikasi	2002
2	Mohammad Ridwansyah	Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi terhadap APBD guna mendukung Otonomi Daerah di Kota Bogor.	Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap total penerimaan PAD perlu dilakukan peningkatan intensifikasi pemungutan jenis pajak dan retribusi sesuai dengan kondisi dan potensi.	2003
3	Achmad Lutfi	Penyempurnaan Administrasi Pajak dan Retribusi daerah Dalam meningkatkan Optimalisasi PAD.	Bahwa upaya meningkatkan PAD mendapat tantangan dari masyarakat maka perlu upaya komprehensif untuk meningkatkan sejumlah komponen penerimaan dengan prinsip utama mewujudkan good goevarnance pada tataran pemerintah lokal.	2006
4	Frenadin Adegustan	Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Studi Kasus di Kota Padang.	Dengan hasil strategi pemungutan adalah intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah melalui penghitungan potensi dengan penyusunan sistem informasi basis data potensi. melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus perluasan sumber atau obyek pendapatan baru Estimasi potensi melalui penyusunan basis data yang dibentuk dan disusun dari variabel-variabel yang merefleksikan masing-masing jenis penerimaan	2009

5	Amri Sireger	Analisa efektifitas Pajak dan Retribusi Daerah terhadap APBD guna mendukung Otonomi Daerah di Kota Bogor	Hasil penelitian menunjukan untuk meningkatkan PAD dengan cara meningkatkan PDRB dari semua sektor akan berdampak yang signifikan terhadap PAD dan adanya kerjasama dengan pengusaha swasta untuk meningkatkan Penanaman Modal Dalam Negeri.	2009
6.	Doni Mirawandi	Dampak Pemekaran Daerah terhadap kemampuan Keuangan Daerah Studi Kasus Pemekaran Kabupaten Swl/Sijunjung	Kemampuan keuangan lokal atau PAD yang mengalami dampak negative sedangkan kemampuan pengolahan belanja berbandingan dengan upaya pengumpulan PAD dan kontribusi belanja terhadap PDRB berdampak positif sedangkan mengotimalkan penerimaan PAD dilakukan dengan menaikkan tariff dan basis data.	2009
7	Ferizaldi	Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Birokrasi Dalam Meningkatkan PAD Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah di Nanggroe Kabupaten Sijunjung Darussalam	strategi peningkatan PAD dengan mengubah sistem pertanggungjawaban birokrasi yang bersifat hirarkhis kepada per-tanggungjawaban ganda. dengan menjaring objek pajak baru dan melakukan kerjasama dengan pihak terkait lainnya, Yang dijadikan titik pendongkrak adalah mengubah pertanggung jawaban. Birokrasi harus berani menerapkan pertanggung jawaban ganda dalam meningkatkan PAD	2010

B. Tinjauan Teori

1. Otonomi Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas desentralisasi, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Secara umum, sumber dana

bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lainnya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom dibatasi, sebaliknya kewenangan daerah Kabupaten/Kota tidak memiliki batas-batas yang jelas, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, yang diperkuat dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pemerintah Pusat selama ini belumlah mengarah pada peningkatan kemampuan Pemerintah Daerah sebagai persiapan dalam melaksanakan otonomi daerah. Padahal, mewujudkan otonomi daerah merupakan permasalahan yang sangat kompleks, karena implementasi dari Undang-undang nomor 22 tahun 1999 memang memerlukan kesiapan daerah dari segala aspek. Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja tidak cukup untuk menilai suatu daerah mampu atau tidak dalam melaksanakan otonomi, melainkan ada beberapa indikator lainnya yang telah dikembangkan Depdagri (Departemen Dalam Negeri) sebagai indikator untuk mengukur kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi (kewenangan), yakni : kelembagaan; kepegawaian; keuangan daerah; peralatan; partisipasi masyarakat; organisasi dan administrasi; ekonomi daerah; serta demografi.

Salah satu wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak

dan retribusi diatur dengan UU 34/2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaan-nya dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah., dan yang sekarang Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pada UU ini Daerah diberikan peluang untuk menetapkan jenis Pajak dan Retribusi juga Pajak Bumi dan Bangunan akan menjadi Pajak Daerah.

Berdasarkan UU 34/2000 dan PP tersebut, Daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut oleh hampir semua Daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktis merupakan pungutan yang baik. Selain jenis pajak dan retribusi tersebut, Daerah juga diberikan kewenangan untuk memungut jenis pajak (kecuali Propinsi) dan Retribusi lainnya sesuai kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.

Ditinjau dari kontribusi Pajak Daerah dan retribusi Daerah, sampai saat ini distribusi kewenangan perpajakan antara Daerah dengan Pusat terjadi ketimpangan yang relatif besar. Hal ini tercermin dalam jumlah penerimaan pajak yang dipungut Daerah hanya sekitar 3,45% dari total penerimaan pajak (pajak Pusat dan Daerah). Demikian juga distribusi pajak antar Daerah juga sangat timpang sekali dan bervariasi (ratio PAD tertinggi dengan terendah mencapai 600 kali). Peranan pajak dalam pembiayaan Daerah yang sangat rendah dan sangat bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang cukup besar dalam jumlah

penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal), dan kemampuan masyarakat.

Dalam era otonomi daerah ini, Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai Institusi Pemerintah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, memiliki wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk memberikan solusi yang terbaik pemerintahan daerah diberikan koridor peraturan perundangan yang memberikan legalitas dalam melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya adalah melalui Undang-Undang pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini.

Undang Undang Pajak Daerah ini sejatinya membawa paradigma baru dalam ruang gerak kuasa-perpajakan dengan memberikan sebuah batasan lebih pasti, baik dalam pengaturan (yuridis) maupun pemungutan (administrasi) oleh pihak Pemda. Undang-undang pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini bersifat *close list*, pihak Pemda, tidak lagi memiliki peluang diskresi memungut di luar yang tercantum di dalam undang-undang ini, sehingga ini akan meredusir keluarnya berbagai Perda yang bermasalah, juga diharapkan membawa angin perubahan dalam mendorong sikap realistik Pemda untuk mampu mengkalkulasi kapasitas pelayanan sebelum membuat Perda baru, mendorong tata kelola anggaran yang akuntabel, dimana alokasi pajak daerah menjadi jelas. Sehingga tidak dijadikan iuran wajib bagi rakyat, tetapi menjadi sebuah kontra prestasi hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang memadai.

Berlakunya UU No.32 Tahun 2004 tentang otonomi Daerah memberikan keluasaan bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi daerahnya guna kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan Pendapatan khususnya dari pajak dan retribusi Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan .Berdasarkan Pasal 82 UU Otonomi Daerah, Daerah berhak untuk menetapkan pajak dan retribusi dengan Perda, termasuk tata cara pemungutan dan tarifnya. Otonomi daerah membawa keuntungan bagi daerah-daerah yang memiliki Sumber Daya Alam yang besar, namun bagi daerah yang berbasis pada manufaktur, jasa dan perkebunan, pendapatannya menjadi berkurang atau sulit dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Bagi daerah tanpa SDA jalan satu-satunya untuk memperbesar pendapatan adalah dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Ketidakpastian penerimaan Daerah yang disebabkan oleh perhitungan Dana Alokasi Umum yang kurang transparan dan lambatnya pencairannya menyebabkan daerah-daerah harus mencari terobosan demi memenuhi peningkatan kebutuhan yang bertambah diantaranya dengan pemindahan beban personel baik pegawai maupun guru. Beberapa jenis pungutan yang memberatkan pengusaha maupun masyarakat, diantaranya: retribusi distribusi barang antar wilayah daerah otonom; retribusi asal komoditas/ karti identitas komoditas; pungutan terhadap bongkar muat barang; sumbangan sukarela; dan sebagainya.

Pungutan-pungutan tersebut diberlakukan berdasarkan Perda di beberapa daerah, dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan demi pemenuhan kebutuhan operasional daerah. Keluhan demi keluhan disampaikan oleh kalangan pengusaha yang menuding bahwa otonomi daerah menyebabkan *high*

cost economy, dan itu sangat memberatkan usaha mereka di saat sulit seperti sekarang ini. Beberapa waktu lalu keberatan atas pungutan-pungutan itu diantaranya datang dari pengusaha pertambangan dan konstruksi.

Otonomi Daerah (otoda) sebagai implementasi sistem desentralisasi pemerintahan di Indonesia, secara substansial baru efektif sejak pemerintahan orde baru runtuh. Ryass Rasyid⁸ mengatakan kebijakan otonomi daerah yang diluncurkan pada tahun 1999 dimaksudkan untuk memperkuat kewenangan pemerintah daerah dan mendorong kemandirian masyarakat di daerah. Ketidakberdayaan daerah dalam mengembangkan prakarsa kebijakan memang sudah lama dipelihara melalui sistem yang dirancang secara sentralistik, dengan ketergantungan kepada proyek – proyek pembangunan yang dirancang melalui legalitas dari Instruksi Presiden dan bentuk – bentuk lainnya.

Beberapa waktu lalu telah dicabut 65 Perda yang dinyatakan bermasalah oleh Pemerintah pusat, terdiri dari 5 Perda Pemprop, 3 Perda Pemkot, dan 33 Perda Pemkab dan untuk Kabupaten Sijunjung ada 3 Perda yang dicabut. Dengan kenyataan ini setidaknya telah timbul perbedaan pendapat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Perda yang dicabut tersebut terdiri dari empat kelompok. *Pertama*, perda retribusi atas pemanfaatan fasilitas umum; *Kedua*, perda tentang retribusi yang bersifat pajak dan yang merintanginya lalu lintas barang, modal, jasa, atau manusia; *Ketiga*, perda tentang pajak atas komoditas barang dan jasa; *Keempat*, perda tentang retribusi yang dikaitkan dengan fungsi perizinan dan sumbangan pihak ketiga.

⁸ Jazuli, Juwani, Otonomi sepenuh hati, pokok pokok untuk perbaikan implementasi Otoda, Al I'tishom, 2007 halaman xviii, Jakarta

Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi tersebut. Menurut Josef Riwo Kaho⁹ ada empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah, pertama pelaksanaannya harus baik, kedua keuangan harus cukup baik, ketiga peralatannya harus cukup dan baik, keempat organisasi dan manajemennya harus baik.

Menurut Warsito Utomo ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi desentralisasi otonomi daerah, *pertama* perlu memiliki sumber daya manusia, yaitu aparatur yang berkemampuan tinggi (human resources capacity), sumber daya manusia merupakan faktor penggerak yang dinamis, yang tidak saja dituntut memiliki kemampuan teknis dan manajerial, tetapi juga kemampuan politik, termasuk kriteria yang sangat penting adalah kepemimpinan (leadership) sebagai faktor dominan yang dituntut memiliki kemampuan untuk dapat memodifikasi dan membuat alternatif apabila menghadapi critical inputs dan Uncertainty situation. Faktor *kedua* yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah keuangan dan fasilitas atau non human components termasuk juga fasilitas fisik yang berupa gedung lengkap dan peralatannya.

Menurut Amal dan Pratikno dikutip “warsito utomo”, dengan sumber keuangan yang baik (PAD yang tinggi) sebuah daerah otonom akan leluasa membelanjakan sebagian besar budget daerah. Faktor ketiga adalah faktor lingkungan atau faktor penunjang, faktor-faktor ini perlu untuk diperhitungkan karena sangat berpengaruh tidak saja terhadap pelaksanaan desentralisasi dan otonomi, tetapi faktor ini dapat merupakan penentu wujud atau bentuk-bentuk

⁹ Kaho, Yosef Riwo, 2001, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 60

urusan yang didesentralisasikan serta kewenangan untuk melaksanakan desentralisasi tersebut. Faktor keempat adalah Support atau dukungan dan konsistensi dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi. Desentralisasi di Indonesia tidak muncul dari bawah tetapi dari atas, walaupun dari segi proses desentralisasi merupakan tarik menarik antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Davey¹⁰ mengatakan bahwa otonomi daerah menuntut adanya kemampuan Pemerintah Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang tidak tergantung kepada Pemerintah Pusat dan mempunyai kekuasaan di dalam menggunakan dana-dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

2. Potensi Penerimaan

Lahirnya UU No.33 Tahun 2004 merupakan salah satu upaya mutakhir dari Pusat untuk mengatur pola hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Namun yang jelas, UU tersebut dalam ukuran yuridis formal telah memberikan harapan baru bagi daerah untuk memperoleh kesempatan guna mewujudkan kemandiriannya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.¹¹ Pendapatan Asli Daerah, merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Karena penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal pusat.

¹⁰ Op.cit, 1988, Pembiayaan Pemerintahan Daerah ; Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta .halaman 258

¹¹ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah; Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hal. 11

Potensi Pajak dan retribusi adalah :

- a. Jumlah Pajak yang seharusnya diterima Pemerintah jika tidak ada objek yang luput dan seluruh wajib pajak membayar kewajibannya sebesar yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.
- b. Sebagai contoh, potensi Pajak Restoran dihitung dari jumlah pajak yang harus dipungut dari seluruh restoran/rumah makan yang diharuskan memungut pajak dari konsumennya sebesar yang ditentukan Perda.
- c. Menggambarkan Jumlah maksimum pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah sesuai peraturan yang berlaku
- d. Potensi tidak sama dengan Target.
- e. Target biasanya ditetapkan dibawah potensi dengan berbagai pertimbangan, antara lain:
 - Sulitnya pemungutan (tidak efisien)
 - Kesadaran masyarakat yang masih rendah (sulit melakukan pemaksaan)
 - Sistem administrasi yang masih lemah

Potensi pajak dan retribusi daerah dapat direfleksikan oleh aktifitas ekonomi suatu daerah yang tergambar pada data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang PDRB menunjukkan total nilai tambah (produk akhir) yang dihasilkan suatu daerah.dengan pendekatan makro, untuk jenis pajak/retribusi tertentu, potensinya dapat dihitung dengan menggunakan data sekunder terutama data PDRB, dengan asumsi data tersebut akurat dan dapat dipercaya.

Dengan semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah,

juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya¹² Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mardiasmo dkk¹³ yang menyatakan bahwa di sisi penerimaan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi penerimaan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal.

Dalam rangka menggali sumber-sumber keuangan daerah terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah harus berusaha mencari sumber-sumber keuangan yang potensial yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Mardiasmo dan Makhfatih¹⁴ telah pula menguraikan bahwa: "Potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel-variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi), dan

¹²Syamsi, Ibnu, 1987, *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*, PT. Bina Aksara, Jakarta. halaman 213

¹³ Mardiasmo dan Makhfatih, Ahmad., 2000, "Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang", *Laporan Akhir*, Kerjasama Pemerintah Daerah Magelang dengan PAU-SE UGM, Yogyakarta. Halaman 1.3-4

¹⁴ Ibid, halaman 8

yang tidak dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah”.

Pola perumusan kebijakan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah didasarkan pada pola kebijaksanaan nasional yang diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Dasar 1945, khusus berkenaan dengan pajak secara umum diakomodir dalam Pasal 23A yang menyatakan ”pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Norma yang demikian mempunyai makna bahwa segala sesuatu pungutan yang menjadi beban rakyat harus sepengetahuan rakyat melalui representasinya di lembaga perwakilan rakyat. Persoalan pajak dan retribusi daerah masuk dalam lingkup konstitusional yang dimaksud di atas, sehingga perlu ada pengaturan umum tentang pajak dan retribusi daerah ke dalam undang-undang.
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 28/ 2009 merupakan undang-undang terbaru yang mengatur pajak dan retribusi daerah menggantikan UU No. 18/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34/2000.

Kehadiran UU No. 28/2009 belum dibahas dalam hasil penelitian ini, disebabkan pengaturan dan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai wilayah studi masih didasarkan pada perda-perda yang dibuat dan ditetapkan atas dasar UU yang lama. Meskipun demikian perlu dipaparkan secara normatif menunjukkan bahwa perubahan undang-undang tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah memperlihatkan adanya tuntutan dinamika terhadap jenis pajak dan retribusi daerah sebagaimana tertera pada tabel 2.2 dan 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2. 2.

Jenis Pajak Daerah Berdasarkan UU Keberlakuannya

No.	Jenis Pajak dan Retribusi Daerah	UU No. 18/1997	UU No. 34/2000	UU No. 28/2009
I.	Pajak Daerah Provinsi			
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	√	√	√
2.	Bea Balik Nama Kendaraan	√	√	√
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan	√	√	√
4.	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	-	√	-
5.	Pajak Air Permukaan	-	-	√
6.	Pajak Rokok	-	-	√
II.	Pajak Daerah Kabupaten/Kota	√	√	√
1.	Pajak Hotel dan Restoran	√	√	-
2.	Pajak Hiburan	√	√	√
3.	Pajak Reklame	√	√	√
4.	Pajak Penerangan Jalan	√	√	√
5.	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	√	√	√
6.	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	√	-	-
7.	Pajak Parkir	-	√	√
8.	Pajak Hotel	-	-	√
9.	Pajak Restoran	-	-	√
10.	Pajak Air Tanah	-	-	√
11.	Pajak Mineral Bukan Logam	-	-	√
12.	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	√
13.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	√
Sumber : Data Olahan Dari UU No. 18/1997, UU No. 34/2000, UU No. 28/2009..				

Tabel 2.3

Jenis Retribusi Daerah Berdasarkan UU Keberlakuannya

No.	Jenis Retribusi Daerah	UU No. 18/1997	UU No. 34/2000	UU No. 28/2009
1.	Retribusi Jasa Umum;	√	√	√*
2.	Retribusi Jasa Usaha	√	√	√*
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	√	√	√*

Sumber : Data Olahan Dari UU No. 18/1997, UU No. 34/2000, UU No. 28/2009..

Di antara ketiga UU tersebut, hanya UU No. 28/2009 yang memberikan rincian dari masing-masing jenis retribusi daerah sebagaimana terdapat dalam Pasal 110 yang menyatakan : (1) 14 macam retribusi daerah dalam kategori jenis retribusi jasa umum; (2) 11 macam retribusi dalam kategori jenis retribusi jasa usaha; (3) enam macam retribusi dalam kategori jenis retribusi perizinan tertentu.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Jenis pajak daerah yang diatur dalam PP No. 65/2001 dinyatakan sebagai berikut:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Pajak Kendaraan Di atas Air
- c) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- d) Bea Balik Nama Kendaraan Di atas Air
- e) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- f) Pajak Hotel
- g) Pajak Restoran
- h) Pajak Hiburan
- i) Pajak Reklame
- j) Pajak Penerangan Jalan
- k) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- l) Pajak Parkir.

Jenis-jenis pajak daerah yang diatur dalam PP No. 65/2001 tidak dinyatakan secara tegas sebagai penggolongan pajak daerah provinsi atau pajak daerah kabupaten. Namun demikian, Pasal 71 PP No. 65/2001 memberikan peluang kepada daerah kabupaten/kota untuk menambah jenis pajak daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah yang bersangkutan.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Jenis retribusi daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 PP No. 66/2001, yakni (1) 10 macam retribusi daerah dalam kategori jenis retribusi jasa umum; (2) 13 macam retribusi dalam kategori jenis retribusi jasa usaha; (3) empat macam retribusi dalam kategori jenis retribusi perizinan tertentu.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut, dilaksanakan dengan menerbitkan peraturan daerah (Perda). UU No.34 Tahun 2000 tersebut memberikan peluang kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dampak yang timbul kemudian adalah banyaknya bermunculan Perda-perda baru tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang meresahkan masyarakat dan pelaku usaha sehingga menimbulkan kondisi yang tidak kondusif bagi perkembangan ekonomi dan investasi secara nasional. Selain itu, Perda-perda baru tersebut menimbulkan terjadinya pungutan-pungutan yang pada akhirnya menciptakan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) yang memberatkan ekonomi nasional.¹⁵

Namun demikian berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintah c.q. Departemen Keuangan diberikan mandat untuk memonitor dan mengevaluasi perda DPRD. Pada kenyataannya kewenangan yang diberikan kepada Daerah tersebut memberikan dampak banyaknya perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut yang dibatalkan oleh pemerintah, karena dianggap bertentangan dengan undang-undang di atasnya dan mengganggu iklim investasi dan usaha di daerah sehingga memberatkan pelaku usaha. Ketentuan tentang penerbitan Peraturan Daerah yang harus mendapatkan pengesahan dari Pusat dirasakan telah mengurangi makna otonomi daerah sebagai perwujudan kemandirian daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

¹⁵ Sebagaimana hasil temuan dari Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional, Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Departemen Keuangan RI, *Evaluasi Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, 2005

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka desentralisasi adalah pendapatan daerah dan Pembiayaan.

Pendapatan Daerah bersumber kepada :

- Pendapatan Asli Daerah
- Dana Perimbangan
- Lain-lain pendapatan

Pendapatan asli daerah ini merupakan bagian terpenting dari penerimaan Daerah. Semakin tinggi sumber PAD akan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak pelaksanaan otonomi daerah peningkatan pendapatan selalu menjadi pembahasan penting termasuk strategi peningkatannya. Hal ini mengingat bahwa kemandirian daerah menjadi tuntutan utama sejak diberlakukannya otonomi daerah. Optimalisasi potensi daerah digalakkan untuk meningkatkan pendapatan. Dalam era otonomi daerah pendapatan khususnya dari pajak dan retribusi merupakan pencerminan dari *local taxing power* yang seharusnya memiliki peranan yang cukup signifikan. Namun kenyataannya peran PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten masih relatif kecil. Rata-rata kontribusi PAD terhadap total penerimaan sebelum era desentralisasi sebesar 0,2 persen (1998-2000), sedangkan pada era desentralisasi mengalami penurunan menjadi 8,1 persen (2000-2001).¹⁶

¹⁶ Muhammad Zaenuddin, dalam Batam Pos, *Strategi Peningkatan PAD*, Selasa 20 November 2007

Untuk peningkatan pendapatan dari pajak dan retribusi terkait dengan peran legislatif daerah dalam hal ini adalah pada tingkat kebijakan dimana dewan harus menentukan unsur kelayakan dan kemudahan jenis pungutan serta dapat menjamin keadilan baik secara vertikal maupun horizontal. Disamping itu dewan juga dapat berpartisipasi dalam bentuk pengawasan. Bila dewan benar-benar mampu menjalankan fungsinya dengan baik dalam kebijakan dan pengawasan, maka optimalisasi PAD akan benar-benar terwujud.

Bagi hasil penerimaan untuk mengurangi ketimpangan vertikal (vertical imbalance) antara Pusat dan Daerah dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (by origin).

Pajak negara tersebut meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bagi hasil sumber daya alam (SDA) yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan. Bagi hasil penerimaan tersebut kepada Daerah dengan prosentase tertentu yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 dan PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan PP 84 Tahun 2001.

Pola sistem bagi hasil tersebut akan menimbulkan ketimpangan horizontal (horizontal imbalance) antara daerah penghasil dan non penghasil. Hal ini disebabkan hanya beberapa daerah di Indonesia yang memiliki potensi SDA secara signifikan, seperti minyak bumi dan gas alam (migas), pertambangan, dan kehutanan. Demikian pula halnya dengan potensi penerimaan daerah dari PBB,

BPHTB, dan PPh Perorangan, dimana potensi yang cukup signifikan hanya dimiliki oleh beberapa daerah saja.

Sementara itu, dengan berkembangnya keinginan beberapa Daerah untuk mendapatkan bagi hasil dari penerimaan pusat lainnya diluar yang sudah dibagi hasilkan sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 dan UU Nomor 33 Tahun 2004, sebenarnya terdapat opsi/alternatif lain yang lebih baik dilihat dari sudut akuntabilitas Pemerintah Daerah. Opsi tersebut adalah “piggybacking” atau opsen atau penetapan tambahan atas pajak Pusat yang besar tarif penetapan tambahannya ditentukan oleh Pemerintah Daerah sendiri dan hasilnya juga diterima oleh Daerah yang bersangkutan. Opsen tersebut misalnya dapat diberlakukan atas Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu Daerah (Propinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep Fiscal Gap, dimana kebutuhan DAU suatu Daerah ditentukan oleh kebutuhan Daerah (fiscal needs) dan potensi Daerah (fiscal capacity). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah/gap yang terjadi karena

kebutuhan Daerah melebihi dari potensi penerimaan Daerah yang ada. Berdasarkan konsep fiskal gap tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini beberapa daerah, khususnya daerah yang kaya sumber daya alam dapat memperoleh DAU yang negatif.

3. Strategi Peningkatan Pajak dan Retribusi

Siddik¹⁷ berpendapat desentralisasi merupakan perwujudan pelimpahan kewenangan dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan bawahannya untuk melakukan pembelanjaan dan pemungutan pajak desentralisasi fiskal, merupakan komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat.

Sedangkan untuk penerapan strategi peningkatan Pajak dan retribusi Daerah menggunakan teori Strategi Menurut Bryson¹⁸ : Strategi adalah salah satu cara untuk membantu organisasi mengatasi lingkungan yang selalu berubah serta membantu organisasi untuk membantu dan memecahkan masalah terpenting yang

¹⁷Siddik Nasution, 2002, "Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif", Tarsito, Bandung, sebagaimana dikutip Kaho, Yosef Riwu, 2001, Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 61

¹⁸ Bryson, John M. 2000. **Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 24

mereka hadapi. Dengan strategi, organisasi dapat membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang, sembari mengatasi dan meminimalkan kelemahan dan ancaman dari luar, serta teori kinerja birokrasi David Osborne dan Peter Plastrik

Beberapa pengertian strategi menurut para ahli yang dikutip Rangkuti¹⁹

a). Chandler, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka , program tindak lanjut , serta prioritas alokasi sumber daya, b). learned, Christensen Andrews dan Guth, strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu focus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak., c). Argyris, Mintzberg, Steiner dan miner, strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.

Dari beberapa definisi diatas maka definisi strategi menurut Hax dan Majluf sebagaimana dikutip Sulusu²⁰ yang menyatakan bahwa strategi adalah suatu keputusan yang menentukan serta menampilkan tujuan organisasi. Jadi dimana Konsep Strategi menurut Menurut Bryson²¹ Strategi adalah salah satu cara untuk membantu organisasi mengatasi lingkungan yang selalu berubah serta membantu organisasi untuk membantu dan memecahkan masalah terpenting yang mereka hadapi. Dengan strategi, organisasi dapat membangun kekuatan dan

¹⁹ Rangkuti, Freddy, 2004, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis Reorientasi*

²⁰ Salusu, J., 2003, *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*, PT. Grasindo, Jakarta hal 100.

²¹ Bryson, John M. 2000. **Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 204

mengambil keuntungan dari peluang, sembari mengatasi dan meminimalkan kelemahan dan ancaman dari luar.

Menurut Kaho, Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula²² Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara, yakni: Mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah direstui oleh pemerintah pusat,

1. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank atau melalui pemerintah pusat,
2. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut,
3. Pemerintah daerah dapat menambah tarif pajak sentral tertentu, misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan,
4. Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

Saragih²³ menulis, Keterbatasan dana pusat bagi pembangunan daerah dan dalam rangka penggalan potensi daerah memerlukan strategi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber kuangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah. Strategi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan daerah bagi peningkatan pendapatan asli daerah adalah; *pertama*, Strategi yang berkaitan dengan manajemen pajak/retribusi daerah; *kedua*, strategi ekstensifikasi sumber penerimaan daerah; *ketiga*, strategi dalam rangka peningkatan efisiensi institusi.

²² Kaho, Yosef Riwu, 2001, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 60

²³ Saragih, J. Panglima, 1996, "Peningkatan Penerimaan Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan", *Majalah Perencanaan Pembangunan*, No.6, halaman 36-40

Widayat²⁴ menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan penerimaan semua sumber Pendapatan Asli Daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya. Selanjutnya dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan Pajak dan Retribusi sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Lebih lanjut diuraikan bahwa salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya.

4. Konsep perpajakan dan Pajak Daerah

Pengertian pajak²⁵; Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rachmat Soemitro²⁶ Pajak ialah iuran pajak ke Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat disahkan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Para ahli perpajakan memberikan pengertian atau definisi berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti dan tujuan yang sama.

Munawir²⁷ mengutip pendapat Jayadiningrat memberi definisi pajak sebagai suatu

²⁴Widayat, Wahyu, 1994, "Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, STIE YKPN, XXI/No.3, halaman 32.

²⁵ Brotodiharjo.R.Santoso, 1991 Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Yogyakarta: BPFE halaman 112

²⁶ Soemitro Rachmat 1990 Dasar-dasar hukum pajak dan pendapatan, Jakarta, halaman 97

²⁷Munawir, Munawir, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta Halaman 5

kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan akan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Selanjutnya Munawir²⁸ mengutip pendapat Rachmat Sumitro mendefinisikan pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin. Mangkoesoebroto²⁹ menyatakan pajak adalah suatu pungutan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak di mana tidak dapat balas jasa secara langsung terhadap penggunaanya.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian pajak yaitu:

1. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara dimana dapat diartikan yang berhak untuk melakukan pungutan pajak yaitu negara dengan alasan apapun swasta tidak boleh memungut pajak;
2. Berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan);
3. Pembayaran pajak tidak mempunyai kontraprestasi langsung secara individu artinya kontraprestasi diberikan oleh negara kepada rakyat dan tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak;
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bersifat umum dalam arti bahwa pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat secara umum;

²⁸ Ibid; Halaman 3

²⁹ Mangkoesoebroto, Guritno, 1993, *Ekonomi Publik*, Edisi-III, BPFE, Yogyakarta, Halaman 181

5. Pajak dipungut disebabkan sesuatu keadaan, kejadian atau yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah;
6. Pemerintah dapat memungut pajak kalau sudah ada undang-undangnya dan aturan pelaksanaanya;
7. Pajak merupakan kewajiban masyarakat yang apabila diabaikan akan terkena sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.

Menurut Suparmoko, Pajak di samping sebagai sumber penerimaan negara yang utama (*budgetair*) juga mempunyai fungsi lain seperti alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian (*regulair*). Pajak sebagai alat anggaran juga dipergunakan sebagai alat mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah terutama kegiatan rutin³⁰. Oleh sebab itu kedua fungsi pajak di atas harus dijalankan secara seimbang karena apabila pengaturannya tidak dilaksanakan secara seimbang sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian

Pengenaan pajak dapat menimbulkan eksternalitas yang dapat merugikan kepentingan umum, sehingga perlu adanya pengaturan untuk menjamin kelangsungan sumber daya dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu maka keputusan untuk mengenakan pajak terhadap suatu objek hendaknya dilakukan secara hati-hati dan bijaksana untuk menghindari terjadinya disinsentif bagi perekonomian.

³⁰ Suparmoko, 2000, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Edisi 5, BPFE, Yogyakarta .halaman 96-98

Menurut Meier³¹ ada empat kriteria yang perlu dipertimbangkan untuk memungut suatu jenis pajak di negara yang sedang berkembang:

1. Sebagai suatu sumber penerimaan potensial; maksudnya suatu jenis pajak harus dilihat sebagai suatu elastisitas pajak tersebut terhadap variabel-variabel makro ekonomi seperti PDRB, pendapatan per kapita dan jumlah penduduk;
2. Dampak terhadap alokasi sumber ekonomi; untuk menggambarkan bahwa memadai tidaknya suatu perolehan pajak jika dikaitkan dengan bentuk dan besarnya dana yang diperlukan untuk memberikan layanan yang dibiayai sehingga beban suatu pajak dapat bermanfaat untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi secara lebih efisien;
3. Keadilan; yang dimaksud keadilan adalah menyangkut distribusi beban pajak, apakah tarif yang progresif atau menggunakan tarif tetap. Pembebanan pajak harus adil baik secara horizontal maupun vertikal;
4. administrasinya rendah; kriteria ini berkaitan dengan administrasi yang meliputi sistem penetapan sumber daya manusia aparatur, biaya pemungutan serta sarana dan prasarana pemungutan.

Nurmantu³² menjelaskan bahwa dalam berbagai literatur, dikenal empat macam tarif pajak yakni tarif tetap (*fixed rate*), tarif proporsional (*proportional rate*), tarif progresif (*progressive rate*) dan tarif regresif (*regressive rate*).

1. Tarif Pajak Tetap (*fixed rate*) Yang dimaksud dengan tarif pajak tetap adalah tarif yang jumlah pajaknya dalam rupiah (atau Dollar) bersifat tetap walaupun objek pajaknya jumlahnya berbeda-beda³³. Nurmantu memberikan contoh

³¹ Meier, M.G, 1995, *Leading Issues in Economics Development*, Sixth Edition, Mc. Graw Hill, International Edition Finance Series, Singapore. Halaman 197-199

³² Nurmantu, Safri, "Pengantar Perpajakan", Penerbit Granit, Jakarta, 2003, hlm. 118

³³ R. Santoso Brotodihardjo, 1993, *Ekonomi Publik*, Edisi-III, BPFE, Yogyakarta. hlm. 191

penerapan tariff pajak tetap adalah pada Bea Materai, di atur bahwa jumlah Bea Materai terhutang atas kuintansi atau tanda terima uang di atas Rp 1.000.000,- adalah sejumlah Rp 6.000,-. Walaupun uang yang diterima besarnya lebih dari Rp. 1.000.000,-, jumlah Bea Materai yang terutang tetap Rp. 6.000,-. Tarif pajak tetap digambarkan Nurmantu³⁴ sebagai berikut:

Tarif Pajak Tetap

Beban Pajak Rp 6.000,- pada Nilai transaksi di atas Rp 1.000.000

2. Tarif Pajak Proporsional (*proportional rate*)

Yang dimaksud dengan tarif pajak proporsional adalah tarif yang persentasenya tetap walaupun jumlah obyek pajaknya berubah-ubah³⁵.

Nurmantu memberikan contoh pada penerapan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Walaupun obyek pajaknya naikd ataupun turun, maka tariff yang dikenakan adalah tetap sebesar 10%. Tarif pajak proporsional digambarkan Nurmantu³⁶ sebagai berikut:

Tarif Pajak Proporsional dilihat dari pajak pennghasilan Prosentase 20%, 10%, 5% dari Jumlah Penghasilan

3. Tarif Pajak Progresif

Yang dimaksud tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang makin tinggi obyek pajaknya, makin tinggi pula prosentase tarif pajaknya³⁷. Misalnya seseorang dengan penghasilan Rp 1.000.000,- akan dikenakan tarif sebesar 10%, penghasilan sebesar Rp 5.000.000,- akan di kenakan tariff 15% dan

³⁴ ibid, hlm. 119

³⁵ ibid 1993, hlm. 179

³⁶ Nurmantu, Safri, "*Pengantar Perpajakan*", Penerbit Granit, Jakarta, 2003, hlm. 120

³⁷ R. Santoso Brotodihardjo. 1993, *Ekonomi Publik*, Edisi-III, BPFE, Yogyakarta. hlm. 183

penghasilan yang lebih besar lagi yaitu Rp 10.000.000,- akan dikenakan tariff 30%. Nurmantu³⁸ secara grafik menggambarkan sebagai berikut;

Tarif Pajak Progresif Prosentase tarif penghasilan 30%, 15%, 10% dari Jumlah Penghasilan

4. Tarif Pajak Regresif (*regressive rate*)

Yang dimaksud dengan tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang apabila obyek pajaknya makin tinggi, maka makin rendah pula tarifnya³⁹. Tarif ini pernah berlaku untuk Bea Warisan. Makin tinggi warisan yang akan diterima ahli waris, maka tarif pajak atas warisan makin kecil. Tarif ini sudah tidak berlaku lagi di Indonesia. Tarif pajak regresif secara grafik digambarkan Nurmantu⁴⁰ sebagai berikut:

Tarif Pajak Regresif Prosentase tariff dari objek pajak 20%, 10%, 5% dari nilai 500 - 1.000 Jumlah obyek pajak

5. Tarif Tunggal

Dilihat dari karakteristiknya, *Flat rate* (di Indonesia di penggunaan istilah tarif tunggal) dapat digolongkan dalam jenis tarif proporsional. *Flat rate*, untuk selanjutnya disebut tarif tunggal, adalah bentuk tarif yang persentase tarifnya tetap walaupun jumlah obyek pajaknya berubah-ubah. Tarif jenis ini memiliki keutamaan dalam hal kesederhanaan dan mudah di aplikasikan. Banyak pendapat ahli mengenai kelebihan dan kekurangan tarif yang bersifat flat ini. Kelebihan dari tarif proporsional ini yang menyebabkan menjadi efisien untuk digunakan.

³⁸ ibid

³⁹ Ribid

⁴⁰ Ibid., hlm. 121

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) ditegaskan bahwa penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditempatkan dengan Undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, oleh karena itu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Undang-undang.

Pengaturan tentang pajak daerah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU No.18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan UU dan PP tersebut Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap masing-masing jenis pajak.⁴¹ Untuk itu daerah diberikan kewenangan memungut 11 jenis pajak.⁴² Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pajak tersebut secara umum dapat dipungut hampir di semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktek merupakan pungutan yang baik.

Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan Pajak, diperkenankan adanya jenis pajak baru, yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dibagi hasilkan dengan Daerah Propinsi dengan imbalan sebagian besar untuk

⁴¹ Menurut Pasal 1 ayat 6 UU No. 34 Tahun 2000, pajak daerah adalah pungutan wajib yang dilakukan terhadap orang pribadi atau badan oleh daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

⁴² Yang merupakan pajak daerah menurut UU No.34 Tahun 2000 adalah; (1) Pajak Propinsi adalah; pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, (2) Pajak Kabupaten/Kota adalah; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

Daerah Kabupaten. Pajak ini dianggap sangat baik ditinjau dari segi potensinya karena konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor cukup besar dan setiap tahun selalu meningkat . Konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor tersebut mencerminkan kegiatan ekonomi daerah dan erat kaitannya dengan produk domestik regional bruto, pembangunan dan pemeliharaan jalan sehubungan dengan banyaknya kendaraan bermotor pengguna jalan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur perpajakan daerah, meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah dan retribusi sejalan dengan sistem administrasi perpajakan nasional, mengklasifikasikan retribusi, dan menyederhanakan tarif pajak dan retribusi.

Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan satu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan perpajakan nasional, maka pembinaan pajak daerah harus dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan ini harus dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajaknya supaya antara pajak pusat dan pajak daerah tersebut saling melengkapi.

Menurut Davey⁴³ secara umum perpajakan daerah dapat diartikan sebagai berikut:

1. pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi penetapan taripnya oleh pemerintah daerah;
3. pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah;
4. pajak yang dipungut dan diadminitrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

⁴³Davey, K.J, 1998 *Pembiayaan Pemerintah Daerah–Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Penerjemah Amanulah dkk, UI Press, Jakarta.:40

Jenis Pajak Propinsi bersifat limitatif yang berarti Propinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan. Adanya pembatasan jenis pajak propinsi tersebut terkait dengan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten/kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu. Propinsi dapat tidak memungut pajak yang telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai. Besarnya tarif pajak propinsi berlaku definitif yang ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia dan diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.

Jenis Pajak Kabupaten/ Kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/ kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam UU No.34 Tahun 2000, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Ada rambu-rambu atau kriteria yang harus diikuti ⁴⁴:

a). Bersifat pajak dan bukan retribusi;

Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;

b). Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

c). Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan/atau obyek pajak pusat;

⁴⁴ Lihat Pasal 2 ayat 4 huruf a-h UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- d). Potensinya memadai;
- e). Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- f). Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan;
- g)..Menjaga kelestarian lingkungan.

Jika ada pajak daerah yang akan dikenakan tidak memenuhi satu saja dari rambu di atas, maka seyogyanya dipertimbangkan untuk dibatalkan pengesahannya. UU No.34 Tahun 2000 secara tegas telah menyatakan bahwa pemerintah pusat bisa meminta daerah untuk membatalkan pajak-pajak yang dianggap tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.

Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditetapkan undang-undang. Dengan adanya pemisahan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi dan yang dipungut oleh kabupaten/kota diharapkan tidak adanya pengenaan pajak berganda.

Menurut Kristiadi⁴⁵, pajak daerah secara teori hendaknya memenuhi beberapa persyaratan, antara lain :

- Tidak bertentangan atau searah dengan kebijakan pemerintah pusat
- Sederhana dan tidak banyak jenisnya
- Biaya administrasinya rendah
- Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat
- Kurang dipengaruhi oleh “*business cycle*” tapi dapat berkembang dengan meningkatnya kemakmuran
- Beban pajak relatif seimbang dan “*tax base*” yang sama diterapkan secara nasional

Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi.

⁴⁵ Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional Departemen Keuangan RI, *Op. Cit.*, hal. 25

Untuk itu pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya.⁴⁶

5. Konsep Retribusi dan Retribusi Daerah.

Menurut Munawir⁴⁷ Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu.

Lebih lanjut diuraikan pula definisi dan pengertian yang berkaitan dengan retribusi yaitu dikutip dari Sproule-Jones and White yang mengatakan bahwa retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan keuntungan langsung dari layanan itu lebih lanjut dikatakan bahwa distribusi lebih tepat dianggap pajak konsumsi dari pada biaya layanan; bahwa retribusi hanya menutupi biaya operasional saja. Pada bagian lain Queen⁴⁸ menerangkan bahwa:

“Suatu tanggapan menekankan memperjelas kenyataan bahwa masyarakat memandang retribusi sebagai bagian dari program bukan sebagai pendapatan daerah dan bersedia membayar hanya bila tingkat layanan dirawat dan ditingkatkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bagian yang gampang dalam menyusun retribusi yaitu menghitung dan menetapkan tarif. Bagian tersulitnya adalah meyakinkan masyarakat (publik) tanpa diluar kesadaran mereka tarif tetap harus diberlakukan”.

⁴⁶ Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional Departemen Keuangan RI, *Op.Cit*, hal. 33

⁴⁷ Munawir, S. 1998, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta. Halaman 6

⁴⁸ Queen, Mc, Jim, 1998, “Development of a Model for Userfees a model on Policy Development in Creating and Maintaining User Fees for Municipalities”, *MPA Reseach Paper*, Submitted to: The Local Government Program, Dept of Political Science, The Univ. Western Ontario, Aug. 1998, halaman 2.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dilihat sifat-sifat retribusi menurut Haritz⁴⁹ adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bersifat ekonomis;
2. Ada imbalan langsung kepada membayar;
3. Iurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar;
4. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol;
5. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi karena pembayaran ditunjukan semata-mata untuk mendapatkan prestasi dari pemerintah misalnya karcis masuk terminal.

Menurut Pasal 1 ayat (28) UU No. 34 Tahun 2000 : Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau koperasi dengan

⁴⁹Haritz, Benyamin, 1995, "Peran Administrasi Pemerintah Daerah : Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Se-Jawa Barat", *Prisma*, Majalah Kajian Ekonomi dan Ilmu Sosial, No. 4, halaman 84

kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi ciri-ciri retribusi daerah menurut Kaho⁵⁰ adalah sebagai berikut:

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah;
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkannya atau dengan jasa yang disiapkan daerah.

Retribusi dapat digolongkan atas tiga golongan, yaitu :Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perijinan Tertentu.⁵¹Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan tau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum antara lain; Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akte Catatan Sipil dan lain-lain.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha antara lain;

⁵⁰ Kaho, J.R, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Cetakan Keempat, Jakarta. hal.152)

⁵¹ Suparman Zen Kemu, *Analisis Usulan Pembentukan Perda Mengenai Retribusi Perijinan Pembuangan Limbah Cair Sebagai Langkah Pencegahan Polusi Limbah Cair di Daerah*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.9 No.4, hal. 96, Desember 2005.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan dan lain-lain.

Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perijinan Tertentu terdiri dari; Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan; Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Ijin Gangguan; dan Retribusi Ijin Trayek.

Namun demikian berdasarkan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, daerah dapat menerapkan berbagai jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Jenis retribusi lainnya, misalnya adalah penerimaan negara bukan pajak yang telah diserahkan kepada daerah.⁵² Ketentuan inilah yang membuka peluang bagi daerah untuk menerbitkan berbagai jenis retribusi yang pada akhirnya dibatalkan oleh Pemerintah Pusat karena dianggap mengganggu iklim investasi di daerah dan memberatkan pelaku usaha. Untuk tata cara pemungutannya, retribusi tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan dan pelaksanaan penagihannya dapat dipaksakan.

C. Skema Pemikiran Penelitian

Otonomi daerah sebagaimana dalam UU No. 32 tahun 2004, telah diubah terakhir dengan UU No 12 tahun 2008 memberikan kewenangan yang lebih besar

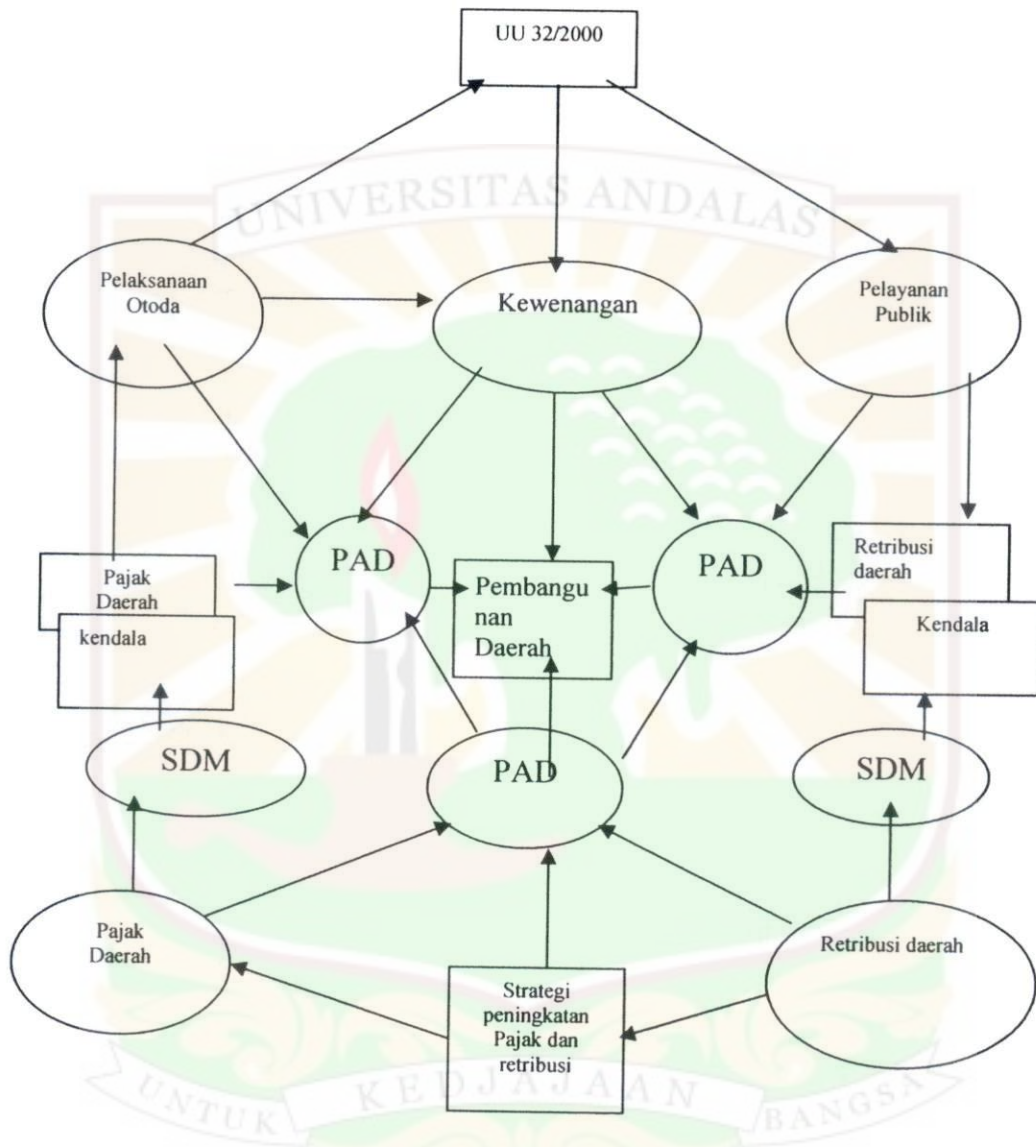
⁵² Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.63

kepada Pemerintah Daerah di Kabupaten Sijunjung untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik. Semangat Otonomi Daerah diharapkan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sijunjung lebih baik, termasuk juga mendongkrak pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana dalam melaksanakan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak dan retribusi merupakan tulang punggung pembangunan.

Pendapatan daerah diharapkan tidak mengalami fluktuasi besar, jika terjadi fluktuasi, mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber Pajak dan Retribusi. Pemerintah Daerah diharapkan memanfaatkan peluang mencari terobosan untuk meningkatkan Pajak dan retribusi, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Posisi Penerimaan Pajak dan Retribusi di Kabupaten Sijunjung dalam perkembangannya berkaitan dengan potensi, kinerja dan faktor kendala, meminimalkan kendala perlu strategi pencapaian Pajak dan Retribusi Daerah sehingga kontribusinya besar pada PAD/APBD,

Gambar 2. 1

Skema Alur pikir Potensi dan Strategi Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan suatu situasi atau objek yang bersifat faktual dengan mengkaji permasalahan – permasalahan yang terjadi pada saat sekarang, guna memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan pada rumusan masalah. Faisal⁵³ menyebutkan, penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis ialah penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi, klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor⁵⁴ “ metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati”. Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana pendapat ahli tersebut maka penelitian ini layak menggunakan metode kualitatif, sehingga didapatkan data yang akurat untuk dianalisa dan dideskripsikan sebagai sebuah fakta sosial.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, dimana pemilihan dilakukan secara Purposif terhadap Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan dalam Kabupaten Sijunjung.

⁵³ Faisal, Sanafiah, 1999, *Format – format Penelitian*, Raja Grafiika Persada, Jakarta, Halaman 198

⁵⁴ Moleong, lexy j, Dr; MA, *metodologi penelitian kuantitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1988 halaman 178 , Halaman :3

C. Peranan Peneliti

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif analisis, Metode kualitatif dipilih dengan harapan diperoleh data yang sebenarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian lebih mendalam dan teliti terhadap objek penelitian sehingga data yang didapatkan data yang akurat. Menurut Ndraha⁵⁵ melalui metodologi kualitatif, peneliti mendengar dan mengamati (maka jangan dipengaruhi) tentang dirinya (mereka) sendiri sesuai perspektif (*perspective truth*) masing – masing, artinya peneliti harus menampilkan data apa adanya tanpa pengaruh pribadi peneliti.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif (*descriptive research*), Effendi dan Singarimbun⁵⁶ mengatakan bahwa penelitian deskriptif dimaksud untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, dimana penelitian mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan penelitian deskriptif analitis, menurut Nazir⁵⁷ penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, berupa studi kasus (*case study*), yaitu suatu pendekatan penelitian yang penelaahannya diarahkan kepada satu kasus secara intensif, mendalam dan mendetail, serta komprehensif. Untuk itu, analisa yang digunakan adalah bersifat kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena yang berpengaruh serta hubungan antara satu fenomena lainnya.

Menurut Sugiyono⁵⁸ penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan menurut Hadari Nawawi⁵⁹ metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

⁵⁵Ndraha, Taliziduhu. 2000. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, halaman 228

⁵⁶Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1999. *Metode Penelitian Survei*, Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta halaman 4

⁵⁷Nazir, Mohammad, 1985. *Metodologi Penelitian*, Gramedia, Jakarta halaman 64

⁵⁸Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1999. *Metode Penelitian Survei*, Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta halaman .4

⁵⁹Nawawi, Hadari, 2001, (Cetakan pertama 1983) *Metode Penelitian Sosial*, Gajah Mada University Press, Jakarta halaman 63

menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada waktu atau saat sekarang dan berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat dikatakan bahwa ciri-ciri pokok metode penelitian deskriptif adalah ;

- a). memberikan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat sekarang, pada saat penelitian dilakukan, atau masalah-masalah bersifat aktual.
- b). Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dan diiringi dengan interpretasi yang rasional.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan mendengar dan mengamati (maka jangan dipengaruhi) tentang dirinya (mereka) sendiri sesuai perspektif (*perspective truth*) masing – masing, artinya peneliti harus menampilkan data apa adanya tanpa pengaruh pribadi peneliti

D. Unit Analisis Penelitian

Unit analisis penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Dengan pendekatan studi kasus maka populasi penelitian ini hanya satu unit analisis saja, yakni Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

E. Teknik Pemilihan Informan

Penentuan informan dilakukan secara Purposive, dengan pertimbangan agar mudah dalam mendapatkan data yang kongkrit dari sumber yang kompeten dibidangnya. Pemilihan Informan berdasarkan kepada kompetensi dan latar belakang yang sesuai dengan bidang tugasnya sehari - hari, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan validitas data dan untuk memudahkan dalam menganalisis data yang terkumpul. Selanjutnya pemilihan informan tersebut dengan pertimbangan bahwa mereka dinilai layak untuk menjelaskan pertanyaan penelitian ini.

Berdasarkan hal tersebut maka yang dijadikan informan, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel Tabel. 3.1.

Tabel. 3.1
DAFTAR INFORMAN

No.	Jabatan
1.	Asisten I
2.	Asisten III
3.	Kadis DPKD
4.	Sekretaris
5.	Kabid. PAD
6.	Kabid Anggaran
7.	Kasi Pengelolaan Pajak
8.	Kasi Perencanaan
9.	Ka.Ktr.Perizinan
10.	Ka.Satpol PP
11.	Camat
12.	Camat
13.	Camat
14.	Anggota DPRD
15.	Anggota DPRD

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Burhan⁶⁰ metode pengumpulan data pada Penelitian Kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara mendalam, observasi partisipasi, dan bahan dokumenter. Atas dasar alasan tersebut maka untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan penelitian ini, maka teknik yang diambil dalam mengumpulkan data adalah :

⁶⁰ Bungin, Burhan, 2008, *Penelitian Kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik dan Ilmu sosial lainnya*, Kencana, Jakarta ,halamn 107

a. Observasi/ Pengamatan

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, berkenaan dengan permasalahan pada penelitian ini maka observasi dilakukan di Kabupaten Sijunjung dengan lokasi penelitian mulai bulan Februari sampai Maret 2011. Observasi dilakukan terhadap fakta – fakta dan gejala – gejala yang didapat dilapangan, terutama data mengenai indikator akuntabilitas dan budaya kerja, data yang diperoleh melalui observasi dikumpulkan, dicatat atau direkam melalui media tape recorder dan foto camera.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dengan sistem purposive. Data primer adalah data yang diambil langsung dari informan atau key informan. Data yang diperoleh melalui wawancara dicatat, direduksi dan dikategorikan untuk selanjutnya diverifikasi untuk dianalisis. Sedangkan metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*).

c. Dokumentasi/ Kepustakaan

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data – data skunder dengan mempergunakan sejumlah dokumen resmi yang ada kaitannya dengan penelitian seperti : Perundang – undangan, Jurnal, Laporan Bulanan, Koran, Majalah dan bahan lainnya.

G. Triangulasi Data.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model *triangulasi* yaitu chek, recheck dan cross check terhadap data yang diperoleh,

berkenaan dengan hal ini Moleong⁶¹ mengatakan bahwa “ *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan penggunaan sumber lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut, triangulasi dapat memanfaatkan sumber data dari peneliti lain atau pengamat lain”.

Teknik Trianggulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber (pengamatan, wawancara, studi kepustakaan dan arsip). Selanjutnya Patton sebagaimana di kutip Moleong menjelaskan “ Trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif”.

Proses yang ditempuh dalam memakai metode triangulasi adalah :

1. Membandingkan data hasil pengamatan penelitian dan data hasil wawancara dengan informan, atau membandingkan data skunder dengan data primer.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain yang menjadi objek penelitian.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang saling berkaitan.

⁶¹ Moleong, Ixey J, Dr; MA, metodologi penelitian kuantitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1988 halaman 178.

H. Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif, namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kombinasi antara metode analisa kuantitatif dan kualitatif, berupa teknik analisa deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model *deskriptif analys*. Menurut Mardalis⁶² sebagaimana dikutip Singarimbun; teknik ini bertujuan untuk mendiskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi pada saat ini. Inipun diperkuat oleh Singarimbun⁶³ bahwa kedua metode analisa saling melengkapi, yang dimaksudkan untuk mengukur secara cermat fenomena sosial tertentu dengan analisis deskriptif melalui prosedur – prosedur .

Glaser dan Straus⁶⁴ mengemukakan bahwa sebagai berikut :

1. Analisis deskriptif dengan mengembangkan kategori – kategori yang terdiri dari hasil wawancara mendalam dan para narasumber sesuai dengan indikator yang ada pada masing – masing variabel dan kategori ini diperoleh sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun.
2. Penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori – teori yang sesuai, dalam hal ini teori otonomi mendorong kemendirian daerah dengan prakarsa kebijakan, Ryass Rasyid dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah menurut josef riwo Kaho.

⁶² Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1999. *Metode Penelitian Survei*, Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta halaman 26

⁶³ Ibid halaman 4

⁶⁴ Faisal, Sanafiah, 1999, *Format – format Penelitian*, Raja Grafindra Persada, Jakarta, Halaman 198

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Sejarah, Keadaan Geografis dan demografi Kabupaten Sijunjung

a) Sejarah Kabupaten Sijunjung

Kilas balik sejarah pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, Kabupaten Sijunjung termasuk wilayah Afdeling Solok dengan ibukotanya Sawahlunto. Literature lebih lanjut menyebutkan Kabupaten Sijunjung pada zaman Hindia Belanda termasuk wilayah Afdeling Solok dengan Ibu Kota Sawahlunto yang mempunyai beberapa Afdeling satu diantaranya adalah Onder Afdeling Sijunjung dengan Ibu Negerinya Sijunjung.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pada bulan Oktober 1945 dibentuklah Kabupaten Tanah Datar dengan ibukotanya Sawalunto⁶⁵, yang wilayahnya meliputi beberapa kewedanaan yaitu Batusangkar, Padang Panjang, Solok, Sawahlunto dan Sawahlunto /Sijunjung. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan melanjutkan perjuangan kemerdekaan, maka Gubernur Militer Sumatera Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK/ 9/ GM/ IST tanggal 18 Februari 1949 untuk membentuk Kabupaten baru yakni Kabupaten Militer Kabupaten Sijunjung, yang diresmikan pada tanggal 28 Februari 1949.

Sebagian besar penduduknya bersuku Minangkabau dengan falsafah adat, pola pikir, tatanan budaya serta norma yang khas.. Aktifitas masyarakatnya

⁶⁵ Bappeda Kabupaten Sijunjung kerjasama BPS, Profil Daerah Kabupaten Sijunjung, 2008. Muaro Sijunjung, Desember 2008, halaman 1

bersendikan atas tradisi, seperti kebiasaan "berdagang, bertani, berkebun dan merantau" yang bertahan hingga kini. Sejarah telah mencatat sebuah kecamatan di Kabupaten Sijunjung dengan luas wilayah 57.540 hektar, dengan nama Sumpur Kudus pernah menjadi markas Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)⁶⁶ Mei 1949. Selain itu Sumpur Kudus juga sering disebut-sebut namanya karena Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif putra asli daerah ini.

Disamping itu merupakan wilayah kerja ROMUSHA⁶⁷ pada zaman penjajahan Jepang. Peninggalan yang bisa dilihat sampai sekarang adalah jembatan kereta api di tepi Batang Kuantan dan lokomotif tua di Kenagarian Silokek-Durian Gadang., Kabupaten Sijunjung adalah salah satu kabupaten di Sebelah Timur Propinsi Sumatera Barat, di sebelah Barat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sebagian besar penduduknya bersuku minangkabau dengan falsafah adat, pola pikir, tatanan budaya serta norma yang khas⁶⁸.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956, Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956 Kabupaten Militer Kabupaten Sijunjung ditetapkan menjadi Daerah Otonomi Kabupaten Kabupaten Sijunjung dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah dengan Ibukota Sijunjung. Kemudian pada Tahun 1966 Ibu Kota Kabupaten Sijunjung dipindahkan dari Sijunjung ke Muaro Sijunjung, dalam tahap perkembangannya wilayah administrasi Kabupaten Kabupaten Sijunjung yang semula 12 Kecamatan dibagi menjadi 9 Kecamatan, sedangkan 3 Kecamatan masuk wilayah Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1990 tentang Perubahan batas luas wilayah Kotamadya

⁶⁶ Ibid, halaman 1-2

⁶⁷ Ibid, halaman 3

⁶⁸ Buku Kabupaten Sijunjung Dalam Angka 2008, Muaro Sijunjung, Juli 2009, halaman 2

Sawahlunto, Kabupaten Solok dan Kabupaten Kabupaten Sijunjung, kemudian pada awal tahun 2003 terjadi pemekaran Kabupaten Kabupaten Sijunjung dengan dibentuknya Kabupaten Dharmasraya melalui Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003.

Setiap tanggal 18 Februari merupakan hari bersejarah yang ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Sijunjung dimana pada tanggal 18 Februari tahun 2009 merupakan tahun pertama peringatan hari jadi Kabupaten Sijunjung setelah adanya perubahan nama kabupaten menjadi Kabupaten Sijunjung, berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2008 tentang perubahan nama Kabupaten Kabupaten Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat

b). Keadaan geografis dan topografi

Kabupaten Sijunjung memiliki luas wilayah 3.130,80 Km² atau sekitar 313.080 Hektar. Kabupaten Sijunjung terbentang pada posisi geografis 0o 18' 43" LS – 1o 41' 46" LS & 101o 30' 52" BT – 100o 37' 40" BT. Di sebelah Utara, Kabupaten Sijunjung berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kota Sawahlunto, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau dan di sebelah barat dengan Kabupaten Solok.

Komposisi penggunaan lahan saat ini, persentase terbesar adalah hutan, yaitu 51,03 persen, perkebunan 23,21 persen, kebun campuran 3,87 persen, padang/semak belukar 6,12 persen, kampung pemukiman 1,57 persen, sawah 3,68 persen dan sisanya untuk keperluan pertambangan, industri serta tanah terbuka

Kabupaten Sijunjung sebenarnya memiliki berbagai potensi yang masih bisa dioptimalkan. Bukan hal yang tidak mungkin Sijunjung akan merubah

posisinya menjadi sebuah kabupaten yang maju, kaya dengan pembangunan. Walau untuk menuju ke sana dibutuhkan tenaga ekstra serta kerja sama dengan berbagai kalangan yang memiliki kepentingan dengan Sijunjung.

c). Demografi

Penduduk Kabupaten Kabupaten Sijunjung 2008 tercatat sebanyak 204 601 jiwa dan tahun 2009 penduduk tercatat sebanyak 209.335 yang tersebar di 8 kecamatan, 54 nagari, 1 desa, 6 nagari persiapan dan 254 jorong, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,02 % dibanding tahun 2008. Angka yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Sumatera Barat yang hanya 0,8% per tahun. Jika dilihat dari angka harapan hidup maka angka harapan hidup di Kabupaten Kabupaten Sijunjung adalah 63,2 tahun.

Tabel 4.1

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sijunjung
menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Metode Exponential) tahun 2009

NO	Kecamatan	Penduduk		Rata-rata
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kamang Baru	1.84	1.91	1.87
2	Tanjung Gadang	1.82	1.90	1.86
3	Sijunjung	1.96	1.99	1.97
4	Lubuak Tarok	2.10	1.62	1.86
5	IV Nagari	2.48	1.19	1.83
6	Kupitan	2.07	1.84	1.96
7	Koto VII	1.90	2.01	1.96
8	Sumpur Kudus	1.96	1.77	1.86
	LPP Kabupaten			1,9

Sumber : BPS Kabupaten Sijunjung /sijunjung dalam angka 2009 halaman 139

Angka ini masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan Sumatera Barat dan daerah lainnya di Sumatera Barat, yang sudah mencapai diatas 65

tahun. Jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung pada tahun 2009 tercatat sebanyak 209.335⁶⁹ jiwa yang tersebar di 8 kecamatan.

Tabel 4.2

Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2004-2009

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio jenis kelamin
1	2004	92 684	93 161	185 845	99.49
2	2005	96 435	96 556	192 991	99.87
3	2006	98 325	98 342	196 667	99.98
4	2007	98 486	101 392	199 878	97.13
5	2008	100 978	103 623	204 601	97.45
6	2009	104 596	104 739	209 335	99, 86

Sumber : BPS Kabupaten Sijunjung /sijunjung dalam angka 2009 halaman 123

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2009 terbanyak adalah penduduk perempuan dengan rincian 104 596 jiwa laki-laki dan sisanya sebanyak 104 739 jiwa perempuan dengan rasio jenis kelamin tercatat sebesar 99, 86. Sebaran penduduk menurut kecamatan pada tahun 2009 mayoritas berada di Kecamatan Kamang Baru dan Kecamatan Sijunjung, masing-masing sebanyak 42 659 jiwa di Kecamatan Kamang Baru dan sebanyak 42. 888 jiwa berdomisili di Kecamatan Sijunjung. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Kupitan yang hanya dihuni oleh penduduk sebanyak 12.948 jiwa.

⁶⁹ Op.cit, kabupaten sijunjung dalam angka 2009, hal 123

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2009

No.	Kecamatan	Penduduk		Jumlah/ Total	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan		
1	Tanjung Gadang	11 754	12 082	23 836	97,3
2	Sijunjung	21 476	21 412	42 888	100,3
3	IV Nagari	7 319	7 333	14 652	99,8
4	Kamang Baru	21 676	20 983	42 659	103,3
5	Lubuak Tarok	7 289	7 492	14 781	97,3
6	Koto VII	16 877	16 954	33 831	99,5
7	Sumpur Kudus	11 934	11 806	23 740	101,1
8	Kupitan	6 271	6 677	12 948	93,9
	Jumlah	104 596	104 739	209 335	99,9

Sumber : Kabupaten Sijunjung dalam angka 2009

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2009

No	Kecamatan	Struktur Umur							Total
		0-5	6	7-14	15-19	20-24	25-64	> 65	
1	Tj Gadang	2.616	560	4.007	2.059	2.154	10.212	890	22.498
2	Sijunjung	4.532	857	6.615	3.350	3.811	19.174	1.916	40.255
3	IV Nagari	1.449	264	2.176	1.090	1.003	6.166	613	12.761
4	K.Baru	4.169	866	6.610	3.422	3.693	16.517	996	36.273
5	Lb.Tarok	2.150	387	3.092	1.522	1.629	8.445	945	18.170
6	Koto VII	3.719	721	5.607	2.897	3.001	14.412	1.272	31.629
7	Sumpur Kudus	3.063	574	4.297	2.288	2.321	11.506	1.073	25.122
8	Kupitan	1.124	228	1.824	1.008	920	5.365	737	11.206

Sumber : Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2009, April 2010, halaman 5

Perbandingan aktivitas bekerja antara penduduk laki-laki dan perempuan cukup signifikan, dimana penduduk laki-laki yang bekerja tercatat sebanyak 50.281 jiwa sedangkan perempuan hanya sebanyak 24.242 jiwa. Pada kegiatan lainnya penduduk perempuan jauh lebih banyak daripada penduduk laki-laki yakni 33.430 jiwa perempuan dan hanya sebanyak 4.692 jiwa laki-laki.

Dilain sisi penduduk di Kabupaten Sijunjung lebih di dominan Perempuan dari Laki- laki, terutama sekali penduduk perempuan usia 14-49 tahu seperti pada tabel 4.5 dan 4.6. Artinya tingkat pertumbuhan penduduk di proyeksikan akan lebih tinggi dengan banyaknya perempuan umur 15-49 tahun dari pada daerah yang perempuannya di usia tersebut prosentasenya sedikit.

Perbedaan yang cukup signifikan ini karena kegiatan lain diantaranya termasuk kegiatan rumah tangga yang biasa dilakukan oleh kaum perempuan. Sebaran penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, pada tahun 2009 masih didominasi oleh sektor Pertanian yang dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 33.958 jiwa laki-laki dan sebanyak 14.449 jiwa perempuan.

2. Kesejahteraan Masyarakat

a). Perekonomian

Kondisi perekonomian suatu wilayah dalam periode tertentu salah satunya dapat diketahui dengan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah dari barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah. Artinya PDRB juga merupakan gambaran potensi ekonomi yang dimiliki dan diusahakan oleh daerah..

PDRB perkapita juga dapat digunakan sebagai salah satu ukuran dalam menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu daerah. Karena PDRB

perkapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk dalam satu tahun, meskipun belum tentu semua penduduk menikmati pendapatan tersebut. Dilihat dari tabel 4.3. perkembangan pertumbuhan PDRB dalam pelaksanaan otonomi daerah dari tahun 2004 sampai 2009 terlihat pertumbuhan PDRB total lebih tinggi daripada pertumbuhan PDRB perkapita, perbedaan pertumbuhan ini karena pertumbuhan PDRB perkapita dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk. Artinya pertumbuhan ekonomi yang diciptakan belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan sehingga secara rata-rata pertambahan pendapatan masyarakat tidak sebesar pertambahan pendapatan daerah secara total.

Dari perbandingan kondisi distribusi sektoral pada tabel 4.5, terlihat sektor pertanian masih memegang peranan penting, dan ini juga merupakan kontribusi dari sub sektor kehutanan yang terus mengalami pertumbuhan negatif seiring semakin berkurangnya perusahaan yang bergerak dibidang hasil hutan dan adanya pemberantasan illegal logging membuat produksi di sub sektor Kehutanan semakin menurun.

Tabel 4.5.

Perkembangan PDRB Kabupaten Sijunjung Atas Harga Konstan 2000
dari Tahun 2004 s/d 2009

Tahun	PDRB (000 Rp.)	PDRB Perkapita (000 Rp)	Pertumbuhan (%)	
			PDRB	PDRB Perkapita
2004	971.540,47	5.227.692,00	-	-
2005	1.023.241,24	5.373.234,91	5,32	1,55
2006	1.084.134,39	5.564.543,21	5,95	3,56
2007	1.144.807,17	5.794.394,82	5,61	4,13
2008	1.205.702,95	5.960.711,67	5.30	2,87
2009	1.273.140,01	6.150.969,71	5,59	3,19

Sumber : PDRB kab sijunjung 2009, Bps PDRB 2009, hal. 96

Hal lainnya adalah dengan terjadinya peningkatan kontribusi dari sektor pertambangan yang sebelum pemekaran hanya memberikan kontribusi kurang dari 12% menjadi lebih dari 16%. Dengan sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang cukup andil dalam struktur perekonomian Kabupaten Sijunjung. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Berikut dapat dilihat tabel 4.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nominal Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Menurut Lapangan Usaha 2006-2008 (Jutaan Rupiah).

Tabel 4.6

N O	LAPANGAN USAHA	2007		2008*		m2009**	
		ADHB ¹⁾	ADHK ²⁾	ADHB ¹⁾	ADHK ²⁾	ADHB ¹⁾	ADHK ²⁾
1	Pertanian	546 838,21	306 011,88	644 378,96	320 343,21	737 654,50	337 904,89
2	Pertambangan dan Penggalian	339 234,62	194 172,52	387 090,60	205 682,87	434 702,93	221 786,87
3	Industri dan Pengolahan	89 243,54	59 024,55	106 699,33	63 378,27	116 226,34	66 281,29
4	Listrik dan Air	32 193,77	14 215,94	34 471,53	14 681,93	38 054,09	15 720,89
5	Bangunan	250 187,14	117 135,08	289 397,71	123 179,25	323 0247,24	129 543,15
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	230 862,07	130 404,07	272 248,07	137 576,07	300 509,99	143 848,12
7	Angkutan dan Komunikasi	172 984,21	77 911,98	202 138,39	82 221,95	223 914,61	87 264,34
8	Keu,Persewaan & Jasa Perusahaan	70 188,08	41 666,12	81 916	44 435,34	90 328,16	46 370,45
9	Jasa - jasa	340 577,01	204 465,03	399 640,28	214 204,06	448 090,80	224 420,32
P D R B		2 072 308,67	1 145 007,18	2 417 981,86	1 205 702,95	2 712 528,65	1 273 140,01

Sumber : PDRB kab sijunjung 2009, Bps PDRB 2009, HALAMAN 47

Kepariwisataan di Kabupaten Sijunjung terdiri dari wisata alam, budaya dan olah raga, pada saat ini terdapat \pm 25 objek wisata alam, 17 objek wisata budaya dan 7 objek wisata, yang tersebar di nagari-nagari diantaranya yaitu :

- a. Wisata alam Musiduga, wisata alam Ngalau Languang dan Wisata Talabang Sakti di Nagari Kunangan Parit Rantang.,
- b. Wisata budaya seperti Situs makam Rajo-rajo Jambu Lipo di Lubuk Tarok, Makam Syekh Abdul Wahab Calau di Nagari Muaro, Rumah Gadang 13 Ruang di Lubuk Tarok dan Lokomotif Uap Peninggalan Jepang di Durian Gadang.
- c. Wisata minat khusus yang juga menjadi salah satu andalan kepariwisataan di Kabupaten Sijunjung seperti wisata arung jeram di kawasan Musiduga.

Peluang dari wisata ini sangat baik dikembangkan Pemerintah Daerah karena dengan pengelolaan wisata yang proposional otomatis akan menambah potensi penerimaan Pajak dan Retribusi .

Potensi Hasil Hutan, Damar dan Rotan terdapat di Kec. Kamang Baru, Tanjung Gadang, Lubuk Tarok, Sumpur Kudus dan Kec. Sijunjung., Kayu terdapat di Kec. Kamang Baru, Tanjung Gadang, Lubuk Tarok, Sumpur Kudus dan Kec. Sijunjung.Sedangkan potensi Perkebunan, Sawit terdapat di Kec. Kamang Baru, Lubuk Tarok, Sumpur Kudus dan Kec. Sijunjung., Karet terdapat di Kec. Kamang Baru, Tanjung Gadang, Lubuk Tarok, Kupitan, Koto VII, Sijunjung dan Kec. Sumpur Kudus.

Potensi pertambangan Minyak dan Gas (migas). Berdasarkan hasil survey ada 3 sumber lokasi sumur migas antara lain :

- a. Sumur Bor Sinamar -1 terletak pada koordinat $0^0 37' 69''$ LS $100^0 52' 57''$ BT dengan kedalaman 9.902 feet.
- b. Sumur Bor Sinamar South -1 terletak pada koordinat $0^0 40' 47''$ LS $100^0 54' 41''$ BT dengan kedalaman 3.800 feet.
- c. Sumur Bor Lantjiang terletak pada koordinat $0^0 46' 49''$ LS $100^0 55' 59''$ dengan kedalaman 7.071 feet.
- d. Grafil terdapat di Kecamatan Kamang Baru.
- e. Granit terdapat di Kec. Tanjung Gadang, Sumpur Kudus, Lubuk Tarok dan Kec. Sijunjung.
- f. Kalsit terdapat di Kec. Sumpur Kudus dan Kec. Sijunjung
- g. Kaolin terdapat di Kec. Tanjung Gadang dan Kec. Koto VII.
- h. Pasir Kuarsa terdapat di Kec. IV Nagari dan Kec. Kamang Baru.
- i. Dolomit terdapat di Kec. Kamang Baru dan Kec. Sumpur Kudus.
- j. Lempung/ Clay terdapat di Kec. Tanjung Gadang, Sijunjung dan Kec. Kupitan
- k. Kuarsit terdapat di Kec. Sumpur Kudus dan Kec. IV Nagari
- l. Sirtukil terdapat di Kec. Sumpur Kudus, IV Nagari, Kamang Baru, Tanjung Gadang, Sijunjung, Koto VII, Kupitan dan Kec. Lubuk Tarok.
- m. Batu Bara terdapat di Kec. Kamang Baru, Lubuk Tarok, Kupitan, Koto VII, Sijunjung dan Kec. Sumpur Kudus.
- n. Emas Alluvial Primer terdapat di Kec. IV Nagari, Kamang Baru, Kupitan, Koto VII, Sijunjung dan Kec. Sumpur Kudus
- o. Marmer terdapat di Kec. Kamang Baru, Tanjung Gadang dan Kec. Sumpur Kudus.

- p. Kapur terdapat di Kec. Kamang Baru, Tanjung Gadang dan Kec. Sumpur Kudus.
- q. Biji Besi terdapat di Kec. Kamang Baru dan Kec. Kupitan
- r. Tanah Liat terdapat di Kec. Kamang Baru, Tanjung Gadang, Koto VII, Sijunjung dan Kec. Sumpur Kudus

b). Tingkat Kemiskinan

Sebagaimana tujuan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat maka penurunan angka kemiskinan seharusnya dapat terpenuhi,. Dengan demikian dapat dilihat perbandingan keadaan tahun ke tahun.

Dalam periode lima tahun terakhir angka kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun, dimana jumlah penduduk miskin dari tahun 2005 sampai tahun 2009, dari 13 200 Kepala Keluarga di tahun 2005 menjadi 9 106 pada tahun 2009. jika dilihat angka kemiskinan dari tahun 2005 sebesar 28,84 % turun secara signifikan pada tahun 2009 menjadi sebesar 18,13 % kondisi ini menunjukkan keberhasilan program pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Tabel.4.7.

Jumlah dan persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sijunjung 2005-2009.

Tahun	Jumlah			Keterangan
	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin (%)	
2005	45 774	13 200	28,84	
2006	46 637	12 920	27,70	
2007	46 704	11 552	24,73	
2008	48 816	10 827	22,18	
2009	50 228	9 106	18,13	

Sumber : BPS, Penduduk Miskin di Sumatera Barat 2001-2002, Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2003-2009,

Jumlah penduduk miskin menurut data diatas, di tahun 2005 adalah 13 200 KK dari 45 774 KK yang ada atau 28,84% , menurut data diatas, di tahun 2006 adalah 12 920 KK dari 46 637 KK yang ada atau 27,70 % , menurut data diatas, di tahun 2007 adalah 11 552 KK dari 46 704 KK yang ada atau 24,73 %, menurut data diatas, di tahun 2008 adalah 10 827 KK dari 48 816 KK yang ada atau 22,18 % Dan diakhir periode pengamatan yaitu tahun 2009 angka kemiskinan kembali turun ke angka 18,13 %. Dengan 9 106 KK Miskin dari 50 228 jumlah KK yang ada

3. Pendidikan.

Kondisi tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Sijunjung mulai menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perkembangan jumlah penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Jumlah penduduk yang dapat menamatkan pendidikan Sarjana (S-1/D.IV), pada tahun 2008 tercatat sebanyak 1.601 orang. Sedangkan penduduk 10 tahun ke atas yang dapat menamatkan D.III tercatat sebanyak 2.142 orang. Namun demikian, jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang Belum/tidak menamatkan SD tidak mengalami penurunan, dengan jumlahnya relatif masih cukup banyak. Kecamatan Kamang Baru 14.018 jiwa sedangkan yang terendah di Kecamatan Kupitan 2.479 jiwa. Sementara itu sebaran penduduk yang menamatkan S-1 ke atas terbanyak berada di Kecamatan Sijunjung 833 orang dan terendah di Kecamatan Lubuk Tarok yang hanya tercatat sebanyak 36 orang

4. Pemerintahan.

Unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah sebanyak 13 Dinas dan Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 4 Badan, Inspektorat Daerah dan 5 Kantor serta 8 kecamatan. Kabupaten Sijunjung memiliki Kecamatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2008 .

Pengisian dari Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOTK) di atas, jabatan yang terisi adalah 19 pejabat eselon II, 107 Eselon III, dan 346 pejabat eselon IV. Selanjutnya, terdapat 12 instansi yang berada diluar lingkungan Pemda, seperti BPS, BPN, KPPN dan lain sebagainya. Walaupun demikian tetap turut serta dalam melancarkan kegiatan di daerah.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baik harus didukung oleh Sumberdaya Manusia (SDM) yang tangguh. Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Kabupaten Sijunjung pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kompetensi yang tangguh, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan baik. Pada tahun 2008 terdapat 4.206 PNS⁷⁰ yang terdiri dari 1.889 laki-laki dan 2.317 perempuan. Dilihat dari golongan, jumlah pegawai bergolongan III, lebih dominan, yaitu 2.317 orang atau 55,22 persen sementara untuk golongan I terdapat 96 orang. Dari segi pendidikan, pegawai menyebar pada hamper semua jenjang. Untuk tamatan SLTA sebanyak 1.124 orang, untuk DII ada 1.233 orang. Selanjutnya S1 sebanyak 1.228 orang, S2 baru ada 61 orang.

⁷⁰ Ibid, halaman 72

Kondisi Pegawai dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah⁷¹, Sesuai dengan Peraturan Daerah sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung disusun dengan pertimbangan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan dan ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga, ada beberapa unit kerja yang digabung karena belum memenuhi indikator dan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

B. Struktur Organisasi DPKD Kabupaten Sijunjung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sijunjung, DPKD Kabupaten Sijunjung merupakan unsur pelaksana tugas pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

1) Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Visi Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang prima melalui manajemen yang baik

Misi Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab

Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

⁷¹ Op.cit, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2008, April 2009, halaman 180-183

Kabupaten Sijunjung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat; dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh bidang dalam lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi urusan Perencanaan dan Anggaran, Pendapatan, Aset, Perbendaharaan dan Akuntansi. Bagian Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan Kepegawaian
- b. Subbag Keuangan
- c. Subbag perencanaan dan Pelaporan

3. Bidang Perencanaan dan Anggaran; dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis Pemerintah Daerah tentang pengelolaan dan pelaksanaan Keuangan Daerah, menganalisa efisiensi dan efektifitas penggunaan belanja dan pembiayaan, menghitung, mengkaji kebutuhan realisasi investasi dan pinjaman daerah, menyusun kebijakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Bagian Perencanaan dan Anggaran terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Analisis
- b. Seksi Penganggaran
- c. Seksi Pembiayaan dan Investasi

4. Bidang Pendapatan' Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan ekstensifikasi objek pendapatan yang meliputi pengelolaan potensi pajak dan retribusi, perencanaan, pendapatan, perimbangan keuangan dan sumber lainnya serta melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan dan pemungutan daerah serta pajak-pajak pusat yang dilimpahkan ke daerah. Bagian Pendapatan terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Dana Perimbangan
- b. Seksi Pengelolaan Pajak Daerah
- c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan

5. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi; dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan daerah. Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi terdiri dari

- a. Seksi Perbendaharaan
- b. Seksi Akuntansi dan Pelaporan
- c. Seksi Pembinaan dan Pengendalian

6. Bidang Aset, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan, pengadaan, inventarisasi dan mutasi barang, pengendalian penilaian dan dokumentasi pelaksanaan pengawasan serta fasilitasi atas pengelolaan barang/aset daerah. Bagian Aset terdiri dari :

- a. Seksi Inventarisasi Mutasi Barang
- b. Seksi Perencanaan dan Pengendalian
- c. Seksi Penilaian dan Dokumentasi

C. Tugas Pokok dan Fungsi DPKD Kabupaten Sijunjung

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 tahun 2008 tentang tugas pokok rincian tugas dan fungsi dinas dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Sijunjung, maka tugas pokok dan fungsi DPKD Kabupaten Sijunjung merupakan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Menurut rincian tugas DPKD Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan rencana dan program kerja DPKD;
- b. merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- c. merumuskan kebijakan umum dan kebijakan petunjuk teknis dalam bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- d. melaksanakan pedoman petunjuk teknis dalam bidang pengelolaan dan asset daerah;
- e. melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pembangunan dalam bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil – hasilnya;
- f. mengkoordinasikan kegiatan penyusunan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis penataan pada DPKD sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
- g. mengawasi penyusunan kebijakan umum daerah dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;

- h. menetapkan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah dan pemasukan pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD/PBB yang sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh kepala daerah;
- i. melakukan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait baik dipusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- j. menkoordinir usulan anggaran berdasarkan kebutuhan unit kerja untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
- k. menetapkan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pemasukan pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD/PBB yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- l. mengkoordinasikan Sekretariat, Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran. Bidang Pengelolaan Asset Daerah serta Bidang Aunansi dan Verifikasi.
- m. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan daerah.
- n. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberika oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan fungsi DPKD Kabupaten Sijunjung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- b. pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pengkajian dan perumusan konsep kebijakan dalam bidang pengelolaan dan aset daerah;
- e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembangunan dalam bidang pengelola keuangan dan aset daerah serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil – hasilnya;
- f. perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pengelola keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
- g. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan serta pengendalian keuangan daerah;
- h. pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/ peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- i. pembinaan unit pelaksana teknis;
- j. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- k. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- l. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- m. pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;

- n. penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban penyusunan APBD;
- o. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan rincian tugas dan fungsi tersebut diatas, maka secara umum tugas pokok dan fungsi DPKD Kabupaten Sijunjung adalah sebagai sebuah organisasi atau satuan kerja perangkat daerah yang berada dibawah Bupati dan mempunyai tugas sebagai satker yang mengelola keuangan dan aset daerah, termasuk merencanakan dan melaksanakan pungutan pajak dan restribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah. DPKD juga bertanggungjawab terhadap target dan realisasi pendapatan daerah dari sumber – sumber lainnya, serta berfungsi sebagai bendaharawan umum daerah terhadap keuangan daerah.

D. Keadaan Pegawai DPKD Kabupaten Sijunjung

Keadaan pegawai DPKD Kabupaten Sijunjung sampai dengan tahun 2010 terdiri dari 1 orang eselon II, 5 orang eselon III, 15 Orang Eselon IV dan 38 orang staff. 23 diantaranya adalah golongan II dan 10 orang pegawai kontrak.

Tabel. 4.8

Keadaan Pegawai DPKD Kabupaten Sijunjung Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pria/Wanita	kontrak	SLTA	D.III	S.1	S.2	Jumlah	Ket
1.	Pria	3	13	3	9	3	31	-
2.	Wanita	2	6	9	15	1	38	-
Total		5	19	12	24	4	64	

Sumber : DPKD Kabupaten Sijunjung, 2010

Dari 64 orang yang PNS DPKD ada 4 (empat) diantaranya berpendidikan Magister (S.2), 24 (dua puluh empat) Alumni Sarjana Strata 1 (S.1) dan 12 (duabelas) orang berijazah Diploma dan 19 (sembilan belas) orang berijazah SMU.

Tabel. 4.9

**Keadaan Pegawai DPKD Kabupaten Sijunjung
Berdasarkan Golongan dan Jabatan**

No.	Golongan/Ruang	Eselon			Staf	Jumlah	Ket
		II	III	IV			
1.	Golongan IV/a-b	1	5	-	-	6	
2.	Jumlah Gol.IV	-	-	-	-	6	
3.	Golongan III/d	-	-	7	-	-	
4.	Golongan III/c	-	-	5	-	-	
5.	Golongan III/b	-	-	3	4	-	
6.	Golongan III/a	-	-	-	24	-	
7.	Jumlah Gol. III	-	-	-	-	30	
8.	Golongan II/d	-	-	-	2	-	
9.	Golongan II/c	-	-	-	12	-	
10.	Golongan II/b	-	-	-	4	-	
11.	Golongan II/a	-	-	-	5	-	
12.	Jumlah Gol.II	-	-	-	-	23	
13.	kontrak	-	-	-	-	5	
Total		1	5	15	38	64	

Sumber : DPKD Kabupaten Sijunjung, Februari 2010

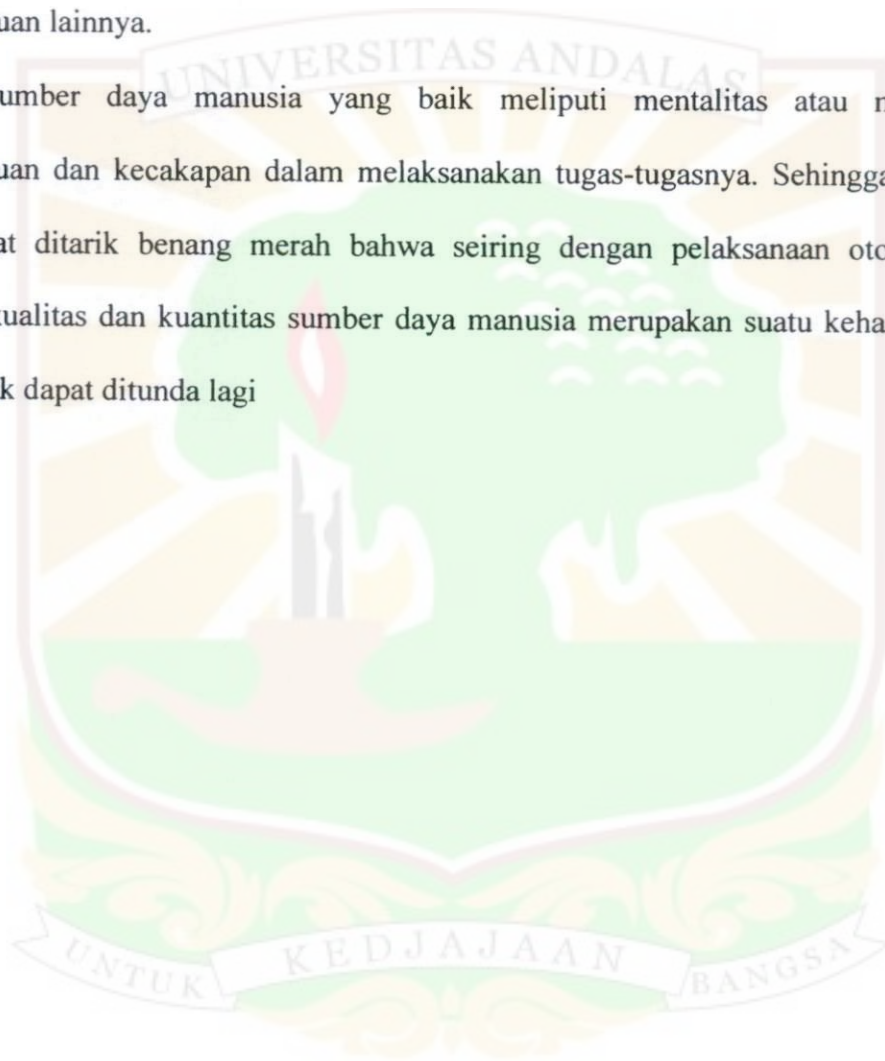
Kondisi demikian menggambarkan bahwa secara Akademik Organisasi DPKD sudah baik tetapi penempatan pejabat struktural tersebut belum didasarkan kepada Kompetensi yang dimiliki.

Komposisi Pegawai yang demikian menurut Sekretaris DPKD, Deganeff,SE sudah sangat memadai, berdasarkan tingkat pendidikan hampir sebahagian besar berpendidikan Sarjana, keadaan tersebut sangat menguntungkan organisasi. Karena berhasil tidaknya suatu organisasi sangat tergantung kepada kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya.(wawancara. Tanggal 20 Mei 2011)

Dengan meningkatnya peran daerah dalam mengisi Otonomi Daerah, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah tersedianya sumber daya manusia yang memadai khususnya aparatur Pemerintah daerah dan masyarakat. Lebih eksplisit

lagi juga mengisyaratkan tersedianya pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai untuk menjalankan fungsi daerah secara efektif dan efisien. Pada akhirnya dengan otonomi daerah, aspek sumber daya manusia atau yang dalam hal ini adalah aparat daerah menjadi suatu hal yang menarik, dan sangat esensial karena merupakan subyek dari kegiatan yang ada dan pengelola faktor kemampuan lainnya.

Sumber daya manusia yang baik meliputi mentalitas atau moral, kemampuan dan kecakapan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sehingga dari sini dapat ditarik benang merah bahwa seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda lagi



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. POTENSI PAJAK RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH.

Jumlah Pajak yang seharusnya diterima Pemerintah jika tidak ada objek yang luput dan seluruh wajib pajak membayar kewajibannya sebesar yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, potensi Pajak Restoran dihitung dari jumlah pajak yang harus dipungut dari seluruh restoran/rumah makan yang diharuskan memungut pajak dari konsumennya sebesar tarif yang ditentukan dalam Perda

Untuk mengetahui besarnya kapasitas Pajak dan Retribusi suatu daerah Penting untuk menetapkan target penerimaan yang lebih akurat dan sangat diperlukan untuk mengukur kinerja administrasi penerimaan daerah yang tujuannya untuk sebagai perencanaan penerimaan daerah yang lebih baik. Potensi pajak dan retribusi daerah dapat direfleksikan oleh aktifitas ekonomi suatu daerah yang tergambar pada data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) , dimana PDRB menunjukkan total nilai tambah (produk akhir) yang dihasilkan suatu daerah.

Dengan pendekatan makro, untuk jenis pajak/retribusi tertentu, potensinya dapat dihitung dengan menggunakan data sekunder terutama data PDRB, dengan asumsi data tersebut akurat dan dapat dipercaya. Untuk menghitung potensi pajak dengan pendekatan makro , tahapannya adalah sbagai berikut:

- a. Data PDRB harga berlaku tahun tertentu digunakan untuk menghitung Output yang dihasilkan oleh sektor/subsektor tertentu dengan asumsi yang rasional.

Tabel 5.1
Lapangan usaha Pajak dan retribusi Daerah

No	Lapangan Usaha	Pajak/Retribusi Daerah yang Terkait
1	Pertanian	
a	Pertanian Panga	
b	Pertanian	
c	Pertanian dan hasilny	Ret. TPI
2	Pertambangan & Penggalian	Retribusi RPH, Ret. Pasar
a	Pertambangan	Ret. Izin Peng. Hasil Hutan
b	Penggalian	Pajak Galian C
3	Industri Pengolahan	Pajak reklame, Ret Izin Gangguan
4	Listrik & Air Minum	
a	Listrik	Pajak Penerangan Jalan
b	Air Minum	Pajak Pemanfaatan Air Permukaan dan BT
5	Bangunan	Retribusi IMB, IPPT
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	Pajak Reklame
a	Perdagangan Besar & Eceran	Retribusi Pasar/Pasar Grosir
b	Hotel	Pajak Hotel
c	Restoran	Pajak Restoran
7	Angkutan & Komunikasi	
a	Pengangkutan	Retribusi Izin trayek, PBBKB
1.	Angkutan Darat	PKB, BBNKB, Ret Kir Kend Bermotor
2.	Angkutan Air	PKB, BBNKB Kend. Diatas Air
4.	Angkutan Udara	
4.	Jasa Penunjang Angkutan	Retribusi dan Pajak Parkir
b	Komunikasi	
8	Keuangan, Penyewaan & Jasa Perusahaan	
a	Bank	
b	Lembaga Keuangan Non Bank	
c	Sewa Bangunan	Retribusi/Pajak Parkir
d	Jasa Perusahaan	Pajak Reklame
9	Jasa -jasa	
a	Pemerintah Umum	
b	Swasta	
1.	Sosial Kemasyarakatan	Pajak Reklame
2.	Hiburan & Rekreasi	Pajak Hiburan dan Retribusi Tempat rekreasi
3.	Perorangan & Rumahtangga	

- b. Perhitungan ini dilakukan karena yang menjadi objek pajak adalah output (total nilai jual) dari sektor/subsektor ekonomi tersebut.
- c. Sebagai contoh, PDRB harga berlaku sub sektor restoran tahun 2008 di daerah tertentu adalah Rp.10 milyar. Yang dihitung oleh PDRB adalah nilai tambah yang merupakan output dikurangi dengan biaya antara. Dengan mengasumsikan bahwa nilai tambah adalah 60% dari total nilai jual, maka berarti total nilai jual adalah $(100/60) \times \text{Rp.10 milyar} = \text{Rp.16,667 milyar}$

Perhitungan potensi pajak dengan mudah dapat dilakukan dengan perkalian tarif pajak dengan nilai *taxable output*. Sebagai contoh, dengan nilai *taxable output* sebesar Rp. 8,3 milyar dan tarif adalah 10%, maka nilai potensi Pajak Restoran Potensi suatu Pajak dapat diartikan jumlah Pajak yang seharusnya diterima Pemerintah jika tidak ada objek yang luput dan seluruh wajib pajak membayar kewajibannya sebesar yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku adalah Rp. 830 juta.

Potensi suatu pajak dapat diartikan jumlah Pajak yang seharusnya diterima Pemerintah jika tidak ada objek yang luput dan seluruh wajib pajak membayarkan kewajibannya sebesar yang di tentukan oleh peraturan yang berlaku. Optimalisasi Potensi Pajak Dipengaruhi *K.J Davey*⁷² Kesadaran dan ketaatan wajib pajak, Integritas aparat pajak berupa sikap jujur, tegas, sopan dan pelayanan., Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) daerah yang memadai dalam melaksanakan proses pemungutan pajak, Perlunya dukungan data, sarana dan prasarana sehingga memperoleh data dan pendapatan yang terkena pajak.

Implementasi otonomi daerah, dalam prosesnya menuntut setiap daerah Kabupaten/Kota untuk mampu mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumberdaya pembangunan. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pembangunan merupakan *necassary conditions* dalam mewujudkan pencapaian kinerja pembangunan, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Diantara bidang pembangunan yang eksis pada setiap daerah Kabupaten/Kota, bidang ekonomi menempati posisi penting dan bersifat strategis. Artinya, kegagalan dalam memperbaiki kinerja pembangunan bidang ekonomi, menimbulkan

⁷² (Kesit Bambang Prakoso: 2003: 2)

implikasi langsung terhadap pencapaian kinerja pembangunan bidang lainnya. Kabupaten Sijunjung yang dijadikan sebagai objek studi ini, memperlihatkan beberapa indikasi lemahnya studi keuangan daerah, antara lain selama ini dalam menetapkan target Pajak dan Retribusi pada APBD belum berdasarkan potensi dan tarif yang telah ditetapkan dalam Perda akibatnya pencapaian derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sijunjung memperlihatkan kondisi yang cukup memprihatinkan.

Secara lebih spesifik kinerja keuangan Kabupaten Sijunjung daerah dapat dilihat dengan dua pendekatan antara lain: (a) pendekatan elastisitas PAD terhadap PDRB dan (b) elastisitas PAD terhadap APBD. Namun selama periode analisis kedua besaran ini memperlihatkan kecenderungan yang cukup variatif. Pada periode 2004-2009 PAD Kabupaten Sijunjung mengalami peningkatan rata-rata sebesar 27,37 %, di sisi lain Pendapatan Domestik Regional Bruto mengalami peningkatan sebesar 15,42 %, Selama periode tersebut ternyata pertumbuhan Pajak dan Retribusi mengalami peningkatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pendapatan Domestik Bruto.

Namun hubungan kedua besaran tersebut memperlihatkan hubungan cukup konsisten antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah karena pertumbuhan Pajak dan Retribusi harus bertumpu pada aktifitas ekonomi masyarakat sebagai basis penarimaan. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mengembangkan sumber Pajak dan Retribusi yang berbasis pada aktifitas ekonomi masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi terhadap sektor publik.

Tabel.5.2

Pertumbuhan PAD Dan PDRB AHB Kabupaten Sijunjung
Tahun 2005-2009

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan	PDRB AHB (Rp)	Pertumbuhan (%)	Ratio/Elastisitas
2005	10 336 306	-	1 531 897 950	-	-
2006	13 224 774	27,70	1 820 531 620	18,58	1,49
2007	21 145 799	59,90	2 072 308 630	13,41	4,47
2008	24 423 791	15,50	2 417 981 860	17,52	0,89
2009	25 982 270	6,37	2 712 528 650	12,18	0,52
Rata-rata		27,37		15,42	1,84

Sumber: evaluasi pelaksanaan RPJM Kab Sijunjung tahun 2006-2010 hal 26 (diolah)

Disisi lain derajat otonomi fiskal (DOFD) daerah Kabupaten Sijunjung relatif masih rendah, pada periode 2005-2009 derajat otonomi fiskal daerah sebesar **5,33** %. Relatif rendahnya DOFD membuktikan relatif masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat. Tigginya ketergantungan fiskal kepada pusat akan menghambat terlaksananya otonomi daerah secara hakiki. Elastisitas PAD terhadap APBD rerata sebesar **5,33**, artinya jika PAD meningkat **5,33** % maka APBD hanya akan meningkat sebesar 1 %. Namun pada tahun 2009 terjadi kontraksi pertumbuhan PAD dan APBD masing-masing 6,37 pertumbuhan PAD mampu berkontribusi 6,28 % pada APBD. Sementara pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2009. Oleh karena itu perlu ada kebijakan pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan PAD agar ketergantungan terhadap pusat dapat dikurangi. Analisis darjat otonomi fiskal yang relatif rendah sejalan dengan darjat desentralisasi fiskal seperti diperlihatkan oleh tabel 5.2. Gambaran data pada Tabel tersebut memperlihatkan bahwa

kontribusi pendapatan dari sektor pajak dan retribusi terhadap total penerimaan daerah cukup bervariasi.

Tabel.5.3.

Derjat Otonomi Fiskal Daerah berdasarkan ratio keuangan Daerah
Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2009

Tahun	Pendapatan Pajak Retribusi	Pertumbuhan	APBD (Rp)	Ratio
2005	10 336 306	-	193 296 452	5,36
2006	13 224 774	27,70	316 784 070	4,17
2007	21 145 799	59,90	423 015 577	5,00
2008	24 423 791	15,50	488 191 183	5,00
2009	25 982 270	6,37	413 867 598	6,28
Rata2		27,37		5,33

Sumber: Hasil Pengolahan Data Skunder

Selama periode analisis rerata PAD hanya sebesar 5,33 %.. Besaran angka kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah yang relatif kecil, juga dapat ditafsirkan bahwa hanya sebesar 5,33 % total pengeluaran Kabupaten Sijunjung yang mampu dibiayai dengan dana yang berasal dari daerah. Sedangkan sisanya sebesar 94,67 % berasal dari penerimaan Non PAD.

Berdasarkan pos penerimaan Non PAD, sebagian besar didominasi oleh penerimaan yang berasal dari sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat (DAU, DAK).

Selama periode analisis, pos ini memberikan kontribusi rerata sebesar 86,63 %. Gambaran data ini mengindikasikan relatif beratnya tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam implementasi otonomi daerah. Artinya, pada saat otonomi daerah diimplementasikan, kinerja keuangan daerah memperlihatkan tingkat ketergantungan fiskal yang relatif tinggi.

Tabel 5.4
Derjat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sijunjung
Tahun 2005-2009

No	Pos penerimaan	2005 (%)	2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	Rerata
1	PAD	6,20	5,30	6,26	6,47	6,28	6,11
2	Dana perimbangan	86,00	88,56	88,33	88,43	81,85	86,63
3	Lain lain pendapatan	7,80	6,14	5,41	5,09	11,88	7,26
	Total penerimaa	100	100	100	100	100	100

Sumber: APBD Kabupaten Sijunjung Tahun **2005-2009** (diolah)

Jika dilihat kontribusi pertahun, ternyata pada periode **2005-2009** selalu memperlihatkan peningkatan peranan sumbangan dan bantuan pemerintah pusat dalam membiayai pengeluaran daerah Kabupaten Sijunjung.

Tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi merupakan tantangan yang cukup besar bagi Pemerintahan Kabupaten Sijunjung dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Upaya untuk mengatasi tantangan tersebut harus diwujudkan melalui kebijaksanaan yang kongkrik dan operasional dalam hal penggalian dan pengembangan potensi PAD. Untuk meningkatkan PAD, setidaknya ada dua variabel penting yang dapat diperhatikan yaitu variabel internal dan variabel eksternal. Variabel internal terdiri dari; (1) memperluas keterjangkauan PAD, (2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan, (3) meningkatkan Nilai Kena Pajak, dan (4) menaikkan tarif. Sedangkan variabel eksternal terdiri dari (1) pertumbuhan penduduk, (2) inflasi, (3) kenaikan pendapatan riil perkapita, dan (4) perubahan perturan.

Dari kedua variabel tersebut usaha untuk menggenjot PAD setidaknya sangat tergantung pada: (1) cakupan (*coverage*), (2) penghitungan tarif, (3) pemungutan, (4) pengawasan dan monitoring, (5) memantapkan dasar hukum dan, (6) pengelolaan dan perencanaan PAD.

Etimasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sijunjung, dalam penghitungan dan pembahasan potensi PAD, Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sijunjung, Penulis mempedomani hasil survey, kajian dan analisis yang pernah dilakukan Tim Pascasarjana UNP bekerja sama dengan Dinas pengelolaan keuangan Daerah tahun 2003, walaupun dalam perkembangan dari tahun 2003 sampai dengan 2009 telah banyak ayat-ayat penerimaan mengalami perubahan, baik tarif maupun objek pengenaannya. Kajian tim ini merupakan satu-satunya referensi yang dianggap paling mendekati relevansi penelitian ini.

Etimasi potensi PAD⁷³ merupakan aspek penting dan bersifat strategis dalam upaya pengembangan dan penggalian potensi yang dimiliki. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hampir setiap daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat belum melakukan perhitungan potensi riil PAD dengan menggunakan metodologi yang jelas. Akibatnya, setiap daerah kabupaten banyak yang menetapkan target penerimaan PAD atas dasar perkiraan kasar dan menggunakan metode dan asumsi yang tidak jelas.

Dalam studi ini dilakukan etimasi potensi penerimaan PAD Kabupaten Sijunjung⁷⁴ dengan menggunakan beberapa metode sesuai dengan kondisi dan ketersediaan data lapangan. Dalam prosesnya dilakukan melalui tahap berikut: (1)

⁷³ Studi ini dilakukan oleh Pusat Kajian Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Program Magister Manajemen Universitas Nagari Padang bekerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung. Tahun 2003

⁷⁴ Studi ini dilakukan oleh Pusat Kajian Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Ibid, Tahun 2003

mengidentifikasi sumber-sumber PAD; (2) perhitungan potensi PAD dan (3) analisis hasil perhitungan PAD.

Dalam konteks pelaksanaan di lapangan pengenaan pajak dan retribusi daerah disampaikan Mantan Camat Kamang Baru, yang baru beberapa waktu yang lalu dilantik menjadi Kepala BPMPN *Meidison, MS.i* :

” Adapun macam/jenis pajak dan retribusi daerah dan berapa besaran yang dilakukan pemungutan di kecamatan ada 7 macam pajak, 8 macam retribusi Jasa umum, 7 macam retribusi jasa usaha, 11 macam retribusi izin tertentu dan pasca adanya pemekaran Kabupaten beberapa Perda tentang pajak dan retribusi sudah di perbaharui ” (wawancara 29 Maret 2011)

Pada kesempatan wawancara pasca pelantikan *Meidison, MS.i* sebagai kepala BPMPN tanggal 28 April 2011 mantan camat ini menjelaskan dan bahwa penerimaan selama ini di Kecamatan hanya sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi yang di jajaran kecamatan sebagai salah satu tugasnya :

PAJAK DAERAH

1. Perda No. 3 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel
2. Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Restoran /Rumah Makan.....
3. Perda No. 14 Tahun 2006 tentang Pajak Hiburan.....
4. Perda No. 13 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame.....
5. Perda No. 10 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan
6. Perda No. 2 Tahun 2006 tentang Pajak Bahan Galian Gol. C
7. Perda No. 8 Tahun 2001 tentang Pajak Sarang Burung Walet

RETRIBUSI DAERAH

Retribusi Jasa Umum

1. Perda No. 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.....
2. Perda No. 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan
3. Perda No. 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan AktaCatatan Sipil
4. Perda No. 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
5. Perda No. 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.....
6. Perda No. 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

7. Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
8. Perda No. 35 Tahun 2002 tentang Retribusi Legalisasi Daerah

b. Retribusi Jasa Usaha

1. Perda No. 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Perda No. 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
3. Perda No. 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal
4. Perda No. 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
5. Perda No. 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Tinja
6. Perda No. 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
7. Perda No. 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

C. Retribusi Perizinan Tertentu

1. Perda No. 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Perda No. 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan
3. Perda No. 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek
4. Perda No. 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Laboratorium Mutu PU
5. Perda No. 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan
6. Perda No. 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi
7. Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor
8. Perda No. 33 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa konstruksi
9. Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Upaya kesehatan
10. Perda No. 37 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penerbitan Akta Koperasi dan Perubahannya
11. Perda No. 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Hotel dan penginapan

Langkah pertama yang dilakukan dalam mengestimasi potensi penerimaan PAD adalah mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan PAD, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Berdasarkan Perda Kabupaten Sijunjung yang terkait dengan masalah PAD, diketahui bahwa sumber-sumber penerimaan PAD tersebut terdiri atas 4 komponen, yaitu pajak, retribusi, bagian laba perusahaan daerah, dan penerimaan lain-lain.

Besar kecilnya penerimaan PAD pada suatu daerah sangat ditentukan oleh kapasitas ekonomi wilayah tersebut. Kapasitas ekonomi wilayah akan menentukan kapasitas fiskal dan pada gilirannya hal ini akan menentukan banyaknya sumber dan besarnya volume yang dapat dijadikan objek pajak ataupun retribusi. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sijunjung yang berlaku sampai dengan tahun 2009 yang petunjuk pelaksanaannya dijabarkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati, maka sumber PAD Kabupaten Sijunjung beserta dasar pengenaan dan tarifnya diringkas pada lampiran 1.

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata secara dokumen resmi kabupaten Sijunjung telah pernah ada survey dan penghitungan potensi Pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan asli Daerah pada tahun 2003, lebih lanjut hasil penelitian mengambarkan bahwa penghitungan potensi-potensi Pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan asli Daerah sejak tahun 2003 sampai dengan penelitian ini belum ada pembaharuan dan Uptudet data, walaupun dari segi perkembangan waktu dan perubahan tarif dari beberapa Peraturan Daerah sudah ada perubahan, namun karena keterbatasan anggaran survey potensi belum ada pembaharuan, oleh karena itu pada hasil penelitian ini tetap memakai beberapa pokok pikiran dari hasil server tahun 2003 dengan memberikan masukan dan analisis data berdasarkan data 5 tahun terakhir, dari tahun 2005 samapai dengan tahun 2009, dengan asumsi tidak ada perbedaan signifikan potensi dari tahun 2003 dengan tahun 2009.

Keterbatasan data yang terdokumentasi pada unit organisasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung terutama yang terkait dengan aktivitas yang merupakan basis pengenaan pajak dan retribusi. Pos-pos PAD yang bisa diestimasi hanya

meliputi: Pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan, dan pajak pengambilan /pengolahan galian golongan C untuk pajak daerah; dan untuk retribusi meliputi retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan dan kebersihan, penggantian biaya cetak KTP/Akte, retribusi pasar, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi rumah potong hewan, retribusi penyeberangan, retribusi izin gangguan, retribusi pemungutan hasil hutan kayu dan pemanfaatan kayu, retribusi izin angkutan kendaraan bermotor, retribusi izin usaha rumah makan dan restoran, retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Dengan menggunakan kombinasi metode seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu diperoleh hasil estimasi sebesar Rp 46.413.500.160,-. Angka ini relatif tinggi bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD tahun 2009, yaitu hanya sebesar Rp 25 982 270 000,-. Secara rinci perbandingan potensi PAD tahun 2003 dan realisasi penerimaan tahun 2009 disajikan pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5
Perbandingan Hasil Potensi Penerimaan PAD Dengan
Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2009

NO	JENIS PENERIMAAN	Estimasi Potensi	Realisasi PAD 2009	Potensi Terealisasi	Potensi Belum Terealisasi
A.	Pajak Daerah				
1	Pajak Hotel dan Restoran	639.450.000	143.301.695	22.41	77.59
2	Pajak Hiburan	9.141.413	7.735.000	84.61	15.39
3	Pajak Reklame	90.900.122	52.129.940	57.35	42.65
4	Pajak Penerangan Jalan	2.443.968.600	641.347.465	26.24	73.76
5	Pajak Pengambilan dan Pengolahan galian C	24.957.596.000	624.344.536	2.50	97.50
6	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	46.562.696	39.441.763	84.71	15.29
7	Pajak Sarang Burung Walet	103.116.667	81.500.000	79.04	20.96
B.	Retribusi Daerah				
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	576.249.000	287.266.960	49.85	50.15
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	49.569.000	5.811.000	11.72	88.28
3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP/Akte Sipil	317.647.722	33.045.000	10.40	89.60
4	Retribusi Parkir Ditepi Jalan				

	Umum	8.436.500	4.646.000	55.07	44.93
5	Retribusi Pasar	259.080.400	207.166.355	79.96	20.04
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0	0		
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	112.406.900	71.460.178	63.57	36.43
8	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	188.339.472	120.516.500	63.99	36.01
9	Retribusi Terminal	491.121.651	488.582.200	99.48	0.52
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir	5.770.031	2.282.500	39.56	60.44
11	Retribusi Penyedotan Kakus	1.380.000	1.380.000	100.00	0.00
12	Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa	506.250	270.000	53.33	46.67
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	25.326.000	19.439.500	76.76	23.24
14	Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan	87.000.000	87.000.000	100.00	0.00
15	Retribusi Penyeberangan Diatas Air	6.300.000	1.500.000	23.81	76.19
16	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0	0	0.00	
17	Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	18.499.935	18.499.935	100.00	0.00
18	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	67.891.609	67.891.609	100.00	0.00
19	Retribusi Izin Gangguan	116.210.000	90.376.515	77.77	22.23
20	Retribusi Izin Trayek	12.736.000	5.500.000	43.18	56.82
21	Retribusi Pangkalan Hasil Bumi	10.325.214.600	413.124.486	4.01	95.99
22	Retribusi Pemeliharaan Jalan	84.696.200	84.696.200	100.00	0.00
23	Retribusi Laboratorium Uji Mutu Pekerjaan Umum	0	0	0.00	0.00
24	Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan	1.730.000	1.730.000	100.00	0.00
25	Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi	5.742.000	5.742.000	100.00	0.00
26	Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu	942.904.782	0	0.00	100
27	Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu	160.897.040	160.897.040	100.00	0.00
28	Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor	43.650.000	7.935.000	18.18	81.82
29	Retribusi Izin Pemakaian Alat Berat Swasta	525.000	525.000	100.00	0.00
30	Retribusi Izin Usaha RM, Hotel dan Restoran	1.360.000	445.000	32.72	67.28
31	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	238.858.000		0.00	100
C.	Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah				
1	Bank Nagari – BPD	600.045.480	338.014.453	56.33	43.67
2	Perusahaan Daerah Kinantan	0	0		
3	PT. SHM/JPKM	0	0		
D.	Pos Lain-Lain Pendapatan				
1	Jasa Giro	1.492.086.620	1.373.524.346	92.05	7.95
2	Sumbangan Pihak Ketiga	1.256.577.345	1.208.154.756	96.15	3.85
3	Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III				
	Denda Keterlambatan	334.638.259	334.638.259	100.00	0.00

4	Pelaksanaan Pekerjaan Daerah				
5	Angsuran dan atau Cicilan Kendaraan Bermotor	33.190.802	5.316.615	16.02	83.98
6	Lumpsum Payment PT.Allied Indo Coal	4.373.000	2.320.000	53.05	46.95
7	Penerimaan Lain-Lain	56.650.385	26.578.270	46.92	53.08
		195.154.679	195.154.679	100.00	0.00
Total		46.143.500.160	7.261.230.755	15,64	84,36

Hasil temuan pada Tabel 5.5 memperlihatkan bahwa Kabupaten Sijunjung ber dasarkan analis potensi tahun 2003⁷⁵ memiliki potensi PAD yang relatif tinggi, yaitu sebesar Rp 46.413.500.160,-. Dengan asumsi potensi PAD tahun 2003 tidak berbeda secara signifikan tahun 2009, berarti realisasi potensi PAD tahun 2009 hanya sebesar 55,98%. Sisanya sebesar 44,02% merupakan potensi rill yang belum mampu direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung, kondisi tahun 2009 ini tentunya ada pergeseran dan pertumbuhan potensi PAD yang belum di survey, kaji dan dianalisis. Tafsiran lainnya dari temuan ini adalah cukup rendahnya efektivitas penggalan dan pengembangan potensi PAD yang dimiliki Kabupaten Sijunjung.

Secara lebih spesifik hasil studi ini telah mengelompokkan seluruh pos PAD kedalam 4 kategori: (a) potensi tinggi – efektivitas tinggi; (b) potensi tinggi – efektivitas rendah; (c) potensi rendah – efektivitas rendah; (d) potensi rendah – efektivitas tinggi (gambar 1). Hasil pengelompokkan ini menimbulkan implikasi langsung terhadap upaya peningkatan realisasi PAD, terutama sekali pos PAD dengan potensi tinggi tapi efektivitas pemungutannya rendah. Efektivitas

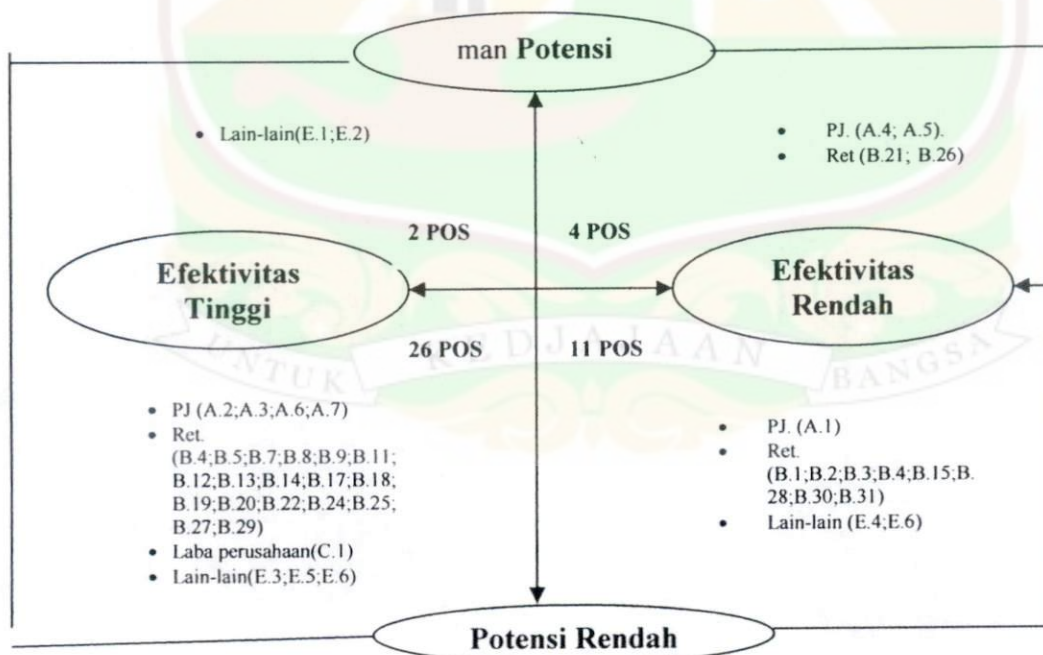
⁷⁵ Studi ini dilakukan oleh Pusat Kajian Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Program Magister Manajemen Universitas Nagari Padang bekerjasama dengan Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung. Tahun 2003.

penggalan dan pengembangan potensi PAD yang masih relatif rendah mengidentifikasi beberapa hal berikut:

- Rendahnya komitmen manajemen unit/dinas pengelola PAD, terutama sekali berkaitan dengan pos-pos dengan potensi yang relatif tinggi tapi tidak diikuti oleh realisasi yang tinggi.
- Belum terbangunnya sistem pengelolaan dan pemungutan PAD yang handal.
- Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.
- Belum konsistennya Perda tentang PAD dengan pelaksanaan pemungutan PAD. Artinya, masih ditemukan beberapa pos PAD dengan potensi yang cukup tinggi, tapi realisasi pemungutannya tidak sesuai dengan Perda PAD

Gambar 5.1

Pola analisis dan rencana realisasi berbasis potensi



Efendi Nur, SE Kabid Pendapatan DPKD Kabupaten Sijunjung, pada wawancara 19 Mei 2011 mengomentari, ketika diminta tanggapannya atas belum tersedianya data basis potensi Pajak, retribusi Daerah dan PAD :

” Analisa dan Data Potensi PAD khususnya Pajak dan retribusi daerah k Kabupaten Sijunjung sudah ada, namun ketersediaan data tersebut memang tahun 2003, ketika Kita melakukan penghitungan potensi dan pengumpulan data tersebut melibatkan Tim, dan Fihak ketiga yang dikerjasamakan, karenanya membutuhkan dana dan sumber daya yang cukup banyak; permasalahan belum di lakukan pengumpulan data dan penghitungan Potensi sejak 2003 memang menjadi pembahasan tim setiap tahunnya, karena keterbatasan anggaran belum dilakukan. ”

Dalam kaitan potensi dan upaya pencapaian realisasi anggota DPRD dari komisi III, *Drs Asriben* memberikan tanggapan pada wawancara tanggal 23 Mai 2011, dengan menggaris bawahi pentingnya peningkatan PAD dari Pajak dan Retribusi Daerah bahwa dalam pemungutan perlu dilakukan upaya yang rasional :

“Rasionalisasi dimaksudkan menyempurnakan sistim dan prosedur administrasi sehingga biaya operasional dapat diminimalisir, sehingga daya dukung dana yang terpungut bisa lebih optimal, yaitu :

- a. Selain upaya ekstensifikasi dan intensifikasi, strategi pemberdayaan kewenangan Daerah akan lebih optimal, jika diikuti dengan langkah-langkah penghematan, efisiensi dan pengawasan.
- b. Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD dinyatakan hal-hal penting sebagai berikut :
 - 1) Prinsip-prinsip Anggaran Belanja Daerah :
 - a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai kebutuhan teknis yang disyaratkan.
 - b) Terarah dan dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi masing-masing Dinas/ Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya.
 - 2) Percepatan setoran.
 - a) Orang atau Badan yang melakukan pemungutan atas penerimaan uang Daerah wajib menyetor seluruh uang penerimaan Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya ke rekening Kas Daerah.
 - b) Untuk daerah-daerah yang sulit komunikasi dapat melebihi ketentuan angka 1), dengan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - (1) Setoran Bruto.
 Penerimaan Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya adalah pendapatan Daerah, dan oleh karena itu dilarang dipergunakan

langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali penerimaan Unit Swadana Daerah.

(2) Standarisasi.

Dalam melaksanakan belanja Daerah ditetapkan standarisasi oleh Kepala Daerah untuk pengadaan barang/jasa dan kegiatan rutin/pembangunan secara berkala

Anggota komisi III *Daswanto, SE*, pada wawancara setelah sidang pleno

DPDR membahas LKPJ Bupati tanggal 18 Mei 2011, mengomentari informasi

Penulis tentang belum tersedianya Data potensi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pemasok utama PAD:

“ Ketimpangan dalam penyelenggaraan keuangan di Kabupaten Sijunjung, pasca pemekaran memang terletak pada kecilnya kontribusi Pajak, retribusi Daerah, tentu pada akhirnya PAD juga kecil; ketimpangan ini lebih di perparah lagi dengan tidak tersediannya data yang akurat dalam penetapan target pemasukan PAD, Kami berharap selaku Legislatif maupun warga, dalam waktu dekat sudah harus di prioritaskan penyusunan data basis potensi pajak dan retribusi; namun upaya sementara perlu memfungsikan kembali pos pengawasan pemeriksaan pajak /retribusi sekaligus memantau peredaran hasil hutan dan hasil bumi Daerah, Peningkatan fungsi Unit Pelayan Terpadu dalam rangka memberikan pelayanan yang tepat waktu dan tepat biaya kepada masyarakat dan permasalahan apa saja yang terjadi dalam proses pemungutan tersebarnya potensi penerimaan PAD pada seluruh wilayah Kabupaten, Penetapan kewenangan pengelolaan sumber-sumber keuangan Daerah per-unit kerja dengan keputusan Bupati, dalam rangka optimalisasi dayaguna dan hasil guna asset Daerah perlu diupayakan kejasama dengan pihak ketiga, antara lain dalam pengelolaan rest-area, renovasi pasar-pasar Kecamatan dan pengawas racun api“.

Adapun Potensi Pemungutan dan Rekapitulasi Pos Pajak disajikan pada lampiran

B. Faktor-faktor kendala kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sijunjung

1. Belum optimalnya pengelolaan Potensi Pajak ,

Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, potensi PAD merupakan aspek penting dan bersifat strategis dalam upaya pengembangan dan penggalian

potensi yang dimiliki, terlihat dengan belum tersedianya data basis objek, potensi dan pemetaan Pajak, dan Retribusi Daerah, ini terjadi karena potensi, besaran pajak dan retribusi dalam proses pengenaanya belum berdasarkan data potensi yang seharusnya dapat terealisasi, seperti telah dipaparkan diatas. Aktivitas ekonomi wilayah memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan Sumber Pajak dan Retribusi. Oleh karena itu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus berbasis kepada aktivitas ekonomi masyarakat sebagai basis Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini di perkuat hasil wawancara dengan Hasmizon,SE,MSi kepala DPKD "yang dimaksud dengan potensi pajak dan retribusi Daerah adalah Jumlah Pajak yang seharusnya diterima Pemerintah jika tidak ada objek yang luput dan seluruh wajib pajak membayar kewajibannya sebesar yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, potensi Pajak Restoran dihitung dari jumlah pajak yang harus dipungut dari seluruh restoran/rumah makan yang diharuskan memungut pajak dari konsumennya sebesar yang ditentukan Perda. Ini artinya Potensi hendaknya menggambarkan Jumlah maksimum pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah sesuai peraturan yang berlaku, Potensi tidak sama dengan Target". Lebih lanjut Hasmizon memaparkan: "sampai tahun ini Kabupaten Sijunjung masih memakai target dalam mencapai kinerja keuangan, Target biasanya ditetapkan dibawah potensi dengan berbagai pertimbangan, antara lain: , Sulitnya pemungutan (tidak efisien), Kesadaran masyarakat yang masih rendah (sulit melakukan pemaksaan), Sistem administrasi yang masih lemah" (wawancara tanggal 14 April 2011)

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus berbasis kepada aktivitas ekonomi masyarakat sebagai basis Pendapatan Asli Daerah. Secara kongkrit aktivitas ekonomi masyarakat tersebut dapat dilihat dari kinerja sektoral masing-masing sektor ekonomi. Di Kabupaten Sijunjung ada tiga sektor ekonomi yang memberikan sumbangan cukup signifikan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sijunjung.

Sektor tersebut terdiri dari pertanian dengan sumbangan rata-rata sebesar 32,91%. Dari lima sub sektor yang ada pada sektor pertanian sub sektor kehutanan memberikan kontribusi paling besar (10,93%), pangan (9,65%), dan perkebunan (7,30%). Sektor pertambangan memberikan kontribusi kedua terbesar setelah sektor pertanian yaitu dengan kontribusi sebesar 15,51% dengan rincian subsektor penggalian sebesar 9,91% dan non migas sebesar 5,60%. Sektor jasa yang paling besar sumbangannya adalah sub pemerintahan dan pertahanan dengan sumbangan rerata sebesar 15,68% dan jasa perorangan/rumah tangga sebesar 1,44%. Sektor perdagangan dan restoran memiliki kontribusi rerata pada periode sebesar 10,76%. Sub sektor sebagai kontributor terbesar adalah perdagangan (9,99%).

Disisi lain selama periode analisis ketiga sektor tersebut tidak menunjukkan sumbangan yang progresif tetapi cenderung fluktuatif baik dari segi kontribusi maupun dari segi pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa arah pembangunan ekonomi sektoral di Kabupaten Sijunjung belum memiliki visi yang jelas. Jika hal ini terjadi secara berkelanjutan mengakibatkan lambatnya proses transformasi struktural ekonomi wilayah.

Relatif besarnya sumbangan sub sektor tanaman pangan karena didukung oleh lahan pertanian yang cukup luas di Kabupaten Sijunjung. Namun pada sub sektor tanaman pangan produktifitas lahan rata-rata per hektar relatif masih rendah, hanya 3,96 ton. Rendahnya produktifitas lahan perhektar berkaitan dengan relatif masih rendahnya adopsi teknologi petani sebagai mana ditunjukkan oleh rendahnya pengguna pupuk perhektar, pemakaian bibit unggul, irigasi, dan teknologi pasca panen. Di Kabupaten Sijunjung masih banyak petani yang

menggunakan bibit lokal dan belum menggunakan pupuk sesuai dengan rekomendasi Departemen Pertanian. Dengan rendahnya produktivitas lahan per hektar akan berdampak langsung terhadap rendahnya kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sijunjung.

Beberapa sektor ekonomi lain yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan pendapatan wilayah daerah adalah sektor jasa tetapi hanya berasal dari sub sektor pemerintahan. Disisi lain yang berasal dari *privat activity* kontribusinya relatif rendah. Sektor perdagangan memiliki perspektif cukup bagus meskipun terjadi sedikit fluktuasi namun dari segi ukuran dan geografis wilayah sektor ini memiliki peluang cukup besar untuk dikembangkan sebagai basis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sijunjung. Sektor pertambangan kontribusinya cukup besar namun untuk jangka panjang hal ini perlu dicermati agar tidak terjadi *spill over* terhadap aktifitas ekonomi sektoral lainnya.

Transformasi stuktur perekonomian Kabupaten Sijunjung berjalan dengan lambat. Hal ini ditunjukkan oleh kontribusi sektor primer menunjukkan penurunan amat lambat dari 49,44% menjadi 48,82% dan 48,36%. Disisi lain sektor skunder menunjukkan peningkatan dengan lambat pula dari 14,91% menjadi 15% dan 15,14%, hal yang sama juga terjadi pada sektor tersier, mengalami peningkatan dari 36,03% menjadi 36,16% dan 36,49% pada tahun 2000. namun dari segi pertumbuhan sektor sekunder dan tertier menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan dari 1,94% menjadi 4,56, sementara sektor tertier dari 1,68% menjadi 4,60%.

Tabel 5.6
Kontribusi Nilai Tambah Sektorial Terhadap PDRB
Kabupaten Sijunjung 2005– 2009

Kelompok sektor	Nilai Tambah (%) Pertumbuhan (%)				
	2005	2006	2007	2008	2009
Primer	49,04	48,82	48,36	3,56	2,67
Skunder	14,93	15,00	15,15	1,94	4,56
Terier	36,03	36,18	36,49	1,68	4,60
PDRB	100,00	100,00	100,00	1,32	3,65

Sumber: BPS : PDRB Kabupaten Sijunjung: 2009

Berdasarkan *analisis ekonomi basis*, dari dua puluh delapan sub sektor, hanya tiga sub sektor ekonomi diantaranya yang berperan sebagai basis perekonomian Kabupaten Sijunjung (lihat tabel 5.6). Sub sektor tersebut antara lain: peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, penggalian, listrik, bangunan, restoran dan pemerintah umum.

Tabel 5.7
Analisis Basis Ekonomi Untuk Masing-Masing Sub Sektor terhadap
PDRB Di Kabupaten Sijunjung 2006 – 2009

No	Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009	Rerata
1	PERTANIAN					
	a. Tanaman Pangan Dan Holtikultura	1,46	1,31	1,29	0,59	1,23
	b. Perkebunan	0,27	2,27	2,34	0,49	0,59
	c. Peternakan	1,34	1,13	1,08	0,42	1,06
	d. Kehutanan	6,02	4,78	5,29	2,22	4,88
	e. Perikanan	1,22	0,79	0,79	0,39	0,84
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN					
	a. Pertambangan	4,57	3,84	4,24	2,03	3,86
	b. Penggalian	1,68	1,88	2,23	0,96	1,78
3	INDUSTRI PENGOLAHAN					
	a. Industri Migas					
	b. Industri Tanpa Migas	0,61	0,48	0,48	0,21	0,47
4	LISTRK, GAS,DAN AIR BERSIH					
	a. Listrik	0,84	0,86	0,87	1,74	6,96
	b. Gas					
	c. Air Bersih	0,21	0,13	0,17	0,07	0,15
5	BANGUNAN	1,80	1,58	1,55	0,63	1,48

6	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN					
	a. Perdagangan besar dan eceran	0,90	0,63	0,63	0,27	0,64
	b. Hotel	0,12	0,10	0,08	0,03	0,09
	c. Restoran	1,56	1,41	1,64	1,50	1,52
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI					
	a. Angkutan					
	a.1 Angkutan Rel/Kereta Api	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a.2 Jalan Raya (darat)	1,09	1,00	1,05	0,47	0,95
	a.3 Angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan	0,02	0,01	0,01	0,00	0,01
	a.4 Jasa penunjang angkutan	0,04	0,03	0,03	0,01	0,03
	a.5 Angkutan udara	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00
	b. Komunikasi	0,29	0,23	0,03	0,22	0,23
8	KEUNGAN, PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN					
	a. Bank	0,75	1,57	0,65	0,28	0,59
	b. Lembaga keuangan tanpa bank	1,24	0,79	0,72	0,31	0,81
	c. Sewa bangunan	0,99	0,77	0,80	0,37	0,78
	d. Jasa perusahaan]	0,12	0,09	0,09	0,04	0,09
9	JASA-JASA					
	a. Pemeritahan umum dan pertahanan	1,49	1,11	1,13	0,50	1,12
	b. Swasta					
	b.1 sosial kemasyarakatan	0,53	0,39	0,36	0,16	0,38
	b.2 Hiburan dan rekreasi	0,19	0,17	0,17	0,07	0,16
	b.3 Perorangan dan rumah tangga	0,69	0,51	0,48	0,22	0,50

Sumber: LKPJ Bupati Sijunjung tahun 2010 halaman 24

Oleh karena itu upaya upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi basis harus dilakukan dalam rangka memperkuat basis ekonomi wilayah dan sekaligus basis Pendapatan Asli Daerah. Arah kebijakan harus difokuskan kepada upaya peningkatan nilai tambah sektor produksi potensial melalui pengembangan SDM dan teknologi tepat guna.

Disisi lain sektor basis sekaligus akan berperan sebagai basis Pendapatan Asli Daerah karena secara teoritik pendapatan asli daerah haruslah berbasis kepada sektor ekonomi potensial yang dapat dijadikan sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan eksistensi pendapatan asli daerah aktifitas ekonomi masyarakat merupakan persyaratan

utama (*necessary condition*) yang harus dikembangkan secara profesional. Jika tidak demikian peningkatan perolehan PAD pada satu daerah hanya akan membebani masyarakat dan upaya memindahkan tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat.

Wawancara dengan Drs. Syukri MM, kepala kantor pelayanan terpadu :

“ Dalam konteks pungutan pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah dengan perangkat-perangkatnya disamping berkewajiban sebagai pelayan masyarakat juga berkewajiban mensejahterakan masyarakat, guna pembiayaan mensejahterakan masyarakat tersebut Pemerintah berupaya berperan guna meningkatkan penerimaan, Upaya yang dilakukan oleh Pemda dengan mengoptimalkan pemungutan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak menciptakan jenis pungutan baru yang potensinya relatif kecil dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan., Perubahan Perda Pajak dan Retribusi untuk perluasan objek, penyesuaian tarif dan perubahan nama, Meningkatkan keleluasaan untuk menggunakan pajak daerah sebagai alat untuk menyediakan insentif dan dis-insentif aktifitas perekonomian daerah Evaluasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang ada untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi (Perlu melakukan perhitungan potensi dengan peraturan yang baru”

(wawancara tanggal 21 Maret 2011)

2. **Kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Sijunjung**

Dalam studi ini kinerja pembangunan ekonomi diukur dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi dan transformasi ekonomi. Dari pendekatan pertumbuhan ekonomi dilihat kinerja ekonomi Kabupaten Sijunjung tergolong cukup bagus dan relatif sama dengan dinamika rata-rata kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Pada tahun 1998 pada awal krisis ekonomi pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 3,38%, dan terus berkembang pada tahun 2006 dan 2009 kinerja pembangunan ekonomi meningkat secara progresif rata-rata 1,32%, 3,65% dan 3,67% pada tahun 2009. Dalam jangka waktu tiga tahun pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Sijunjung menunjukkan pertumbuhan secara gradual walaupun pelan tapi pasti (*steady growth*).

Secara teoritik pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan secara mantap haruslah selalu dipertahankan dan ditingkatkan. Upaya peningkatan ekonomi secara progresif haruslah dilakukan atas dasar aktifitas ekonomi masyarakat sebagai basis perekonomian daerah. Berbagai program yang mengacu kepada peningkatan aktifitas perekonomian masyarakat pada gilirannya akan mampu meningkatkan PDRB dan Pendapatan Asli Daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah tidak ditingkatkan melalui pemberdayaan pemberdayaan aktifitas perekonomian masyarakat maka PAD akan merupakan pengalihan beban dari pemerintah kepada masyarakat dengan cara tidak adil, pada gilirannya mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kabupaten.

Komentar terhadap perekonomian dan pengawasan dalam upaya peningkatan PDA dari pajak dan retribusi Daerah disampaikan Febrizal Ansori,SH, MS.i asisten bidang Politik pemerintahan hukum dan HAM:

“Dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah sudah dilakukan pengawasan, Pada dasarnya kecenderungan Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat diatasi oleh Pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi tersebut. Undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk membatalkan setiap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang dan kepentingan umum. Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan harus disampaikan kepada Pemerintah. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Dalam kenyataannya, pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Tidak efektifnya pengawasan tersebut karena Undang-Undang yang ada tidak mengatur sanksi terhadap

Daerah yang melanggar ketentuan tersebut dan system pengawasan yang bersifat represif. Peraturan Daerah dapat langsung dilaksanakan oleh Daerah tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah. Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan. Basis pajak kabupaten dan kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan Daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya.”

(wawancara tanggal 11 Mai 2011)

Kinerja ekonomi sektoral Kabupaten Sijunjung dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok: (1) sektoral ekonomi yang memiliki pertumbuhan tinggi tetapi kontribusinya terhadap PDRB rendah. Sektoral yang masuk kedalam kelompok ini sektoral kelistrikan. Pada tahun 2005 dan 2009 memiliki pertumbuhan 16,25% dan 13,15 %, sementara kontribusinya terhadap PDRB hanya sebesar 1% dan 1,14%. Dengan demikian sektor kelistrikan memiliki kinerja tinggi tetapi potensinya rendah.

Pertumbuhan yang diciptakan oleh sektor kelistrikan sebetulnya tidak berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat; (2) Sektor yang memiliki potensi besar tetapi kinerja rendah. Sektor-sektor yang termasuk kedalam kelompok ini adalah pertanian, pertambangan, perdagangan, jasa.. (3) Sektor yang memiliki potensi rendah dan kinerja rendah. Sektor yang masuk kedalam kelompok ini: industri, bangunan angkutan dan keuangan. Hasil analisis ini dapat ditafsirkan bahwa belum adanya kebijakan optimal yang menyentuh sektor ekonomi potensial., pada hal sektor ini adalah basis perekonomian wilayah Kabupaten Sijunjung

Oleh karena itu agar kinerja ekonomi sektoral meningkat secara optimal maka sektor potensial seharusnya juga memiliki pertumbuhan yang tinggi. Berkaitan dengan itu diperlukan adanya kebijakan pemerintah agar mampu mendorong sektor tersebut bergerak sesuai dengan potensinya. Jika tidak demikian Kabupaten Sijunjung akan kehilangan momentum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut dapat dilihat perolehan data BPS Kabupaten Sijunjung PDRB selama 5 tahun terakhir :

Tabel 5.8
Laju Pertumbuhan dan Indeks perkembangan Agregat pendapatan Regional dan angka angka perkapita atas dasar harga konstan 2000 (PDRB Kabupaten Sijunjung 2006 sampai 2009)

Rincian	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
PDRB ADH Pasar	1 023 241,24	1 084 134,39	1 145 007,18	1 205 702,95	1 273 140,01
Penyusutan Barang-barang modal	74 585,45	78 554,53	84 382,14	88 448,71	88 448,71
PDRB Neto ADH Pasar	948 655,79	1 005 579,86	1 060 625,04	1 117 254,24	1 184 691,30
Pajak tidak langsung neto	115,92	164,66	174,55	187,93	187,93
PDRB neto atas biaya faktor	948 499,87	1 005 415,19	1 060 450,50	1 117 066,31	1 184 503,37
PDRB perkapita	5 373 234,91	5 564 543,21	5 794 394,82	5 960 711,67	6 150 969,71
Pendapatan Regional perkapita	4 980 753,72	5 160 500,70	5 366 489,37	5 522 512,96	5 722 736,13

Sumber: LKPJ Bupati Sijunjung Tahun 2010 halaman 7

Kurang optimalnya perencanaan ekonomi Kabupaten Sijunjung juga terlihat dari kontribusi sektoral terhadap sektor yang sama di Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2005 di Kabupaten Sijunjung sektor yang paling besar kontribusinya adalah sektor pertambangan tetapi pada tahun 2006 sektor tersebut mengalami penurunan kontribusi dari 21,08% menjadi 20,79%.

Demikian juga sektor industri, bangunan, perdagangan, dan jasa, hanya sektor pertanian, litrik dan angkutan yang mengalami kenaikan.

Tabel 5.9

Perkembangan PDRB Kabupaten Sijunjung Atas Harga Konstan 2000
dari Tahun 2006 s/d 2009

Tahun	PDRB (000 Rp.)	PDRB Perkapita (000 Rp)	Pertumbuhan (%)	
			PDRB	PDRB Perkapita
2006	1.084.134,39	5.564.543,21	5,95	3,56
2007	1.144.807,17	5.794.394,82	5,61	4,13
2008	1.205.702,95	5.960.711,67	5.30	2,87
2009	1.273.140,01	6.150.969,71	5,59	3,19

Sumber : PDRB kab sijunjung 2009, Bps PDRB 2009, HALAMAN 96

Secara totalitas PDRB Kabupaten Sijunjung berkontribusi terhadap PDRB Sumatera Barat 6,43% pada tahun 2008 dan 6,59% pada tahun 2009, tetapi kontribusi tersebut relatif lebih rendah dari rata-rata pada tahun yang sama 7,57% dan 7,62% walaupun kontribusi Kabupaten Sijunjung mengalami kenaikan sebesar 0,022%, tetapi relatif lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian elastisitas pertumbuhan PDRB terhadap pertumbuhan kontribusi Kabupaten Sijunjung bersifat inelastis. Pertumbuhan ekonomi lokal tidak diikuti oleh pertumbuhan kontribusi terhadap PDRB provinsi, artinya perekonomian dituntut menunjukkan kinerja yang lebih tinggi lagi dalam konteks perekonomian Sumatera Barat. Selanjutnya dengan menggunakan pendekatan Klassen Tipologi ternyata Kabupaten Sijunjung masuk kedalam tipologi daerah maju tetapi tertahan karena pendapatan perkapitanya rendah.

Tabel 5.10

**Pertumbuhan Ekonomi Sektoral
Kabupaten Sijunjung Tahun 2007-2009**

NO	LAPANGAN USAHA	2007		2008		2009	
		ADHB ¹⁾	ADHK ²⁾	ADHB ¹⁾	ADHK ²⁾	ADHB ¹⁾	ADHK ²⁾
1	Pertanian	546 838,21	306 011,88	644 378,96	320 343,21	737 654,50	337 904,89
2	Pertambangan dan Penggalian	339 234,62	194 172,52	387 090,60	205 682,87	434 702,93	221 786,87
3	Industri dan Pengolahan	89 243,54	59 024,55	106 699,33	63 378,27	116 226,34	66 281,29
4	Listrik dan Air	32 193,77	14 215,94	34 471,53	14 681,93	38 054,09	15 720,89
5	Bangunan	250 187,14	117 135,08	289 397,71	123 179,25	323 0247,24	129 543,15
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	230 862,07	130 404,07	272 248,07	137 576,07	300 509,99	143 848,12
7	Angkutan dan Komunikasi	172 984,21	77 911,98	202 138,39	82 221,95	223 914,61	87 264,34
8	Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan	70 188,08	41 666,12	81 916	44 435,34	90 328,16	46 370,45
9	Jasa - jasa	340 577,01	204 465,03	399 640,28	214 204,06	448 090,80	224 420,32
P D R B		2 072 308,67	1 145 007,18	2 417 981,86	1 205 702,95	2 712 528,65	1 273 140,01

Sumber : PDRB kab sijunjung 2009, Bps PDRB 2009, HALAMAN 47

C. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sijunjung.

Pajak dan retribusi adalah merupakan bagian penerimaan daerah yang digali dari daerahnya sendiri. Besarnya PAD tergantung pada potensi daerah dan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam memaksimalkan pengelolaan sumber daya sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Kemampuan pemerintah daerah mengelola potensi sumber daya menjadi penerimaan daerah dapat dilihat dari besar kecilnya pertumbuhan PAD daerah tersebut.

Pertumbuhan PAD Kabupaten selalu mengalami peningkatan. Kabupaten Sijunjung di tahun 2005 mencoba menargetkan penerimaan PAD Rp.10,75 milyar dan terealisasi sebesar Rp.10,35 atau 96,35%, Tahun 2006 baru terjadi peningkatan yang cukup signifikan,. Dan Tahun 2007 sebagai akhir tahun pengamatan kembali mengalami peningkatan tetapi tidak sebesar tahun 2006 atau mengalami perlambatan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Syah. Komponen-komponen PAD tersebut mempunyai kriteria dan kekhususan masing-masing sehingga harus terpisahkan satu dengan yang lainnya. Perkembangan komponen-komponen PAD di Kabupaten

Tabel 5.11.

Kontribusi Komponen-komponen dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sijunjung

Jenis Penerimaan	2007		2008		2009		2010		Rata-rata	
	Juta (Rp.)	Kontribusi (%)	Juta (Rp.)	Kontribusi (%)	Juta (Rp.)	Kontribusi (%)	Juta (Rp.)	Kontribusi (%)	Juta (Rp.)	Kontribusi (%)
Pajak Daerah	940	33,07	1.590	21,89	2.414	14,49	3.060	15,34	2.018	17,17
Retribusi Daerah	1.194	42,00	2.188	30,13	3.615	21,69	5.433	27,23	3.131	26,64
Hasil Perusda	215	7,55	338	4,66	1.002	6,01	1.503	7,53	769	6,54
Lain-Lain PAD	494	17,38	3.146	43,32	9.631	57,81	9.954	49,90	5.836	49,65
Jumlah	2.843	100,00	7.261	100,00	16.661	100,00	19.949	100,00	11.754	100,00

Sumber : Perhitungan APBD Kab.Swl/Sijunjung Tahun 2007 – 2010, diolah

Dari seluruh komponen PAD yang ada hanya Bagian Hasil Perusahaan Umum Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan yang tidak

mengalami penurunan melainkan sedikit mengalami peningkatan dari Rp.1,5 milyar menjadi Rp.1,9 milyar. Ini dikarenakan pada bagian ini, tidak berhubungan dengan pemekaran kabupaten yang menyebabkan pemisahan asset, akan tetapi karena merupakan hasil dari deviden (bagi hasil) dari asset atau investasi yang telah ditanamkan oleh pemerintah daerah melalui penyertaan modal di beberapa Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan/Perbankan yaitu BPD dan BPR yang selama ini berada di wilayah Kabupaten Sijunjung ,

Tabel 5.12

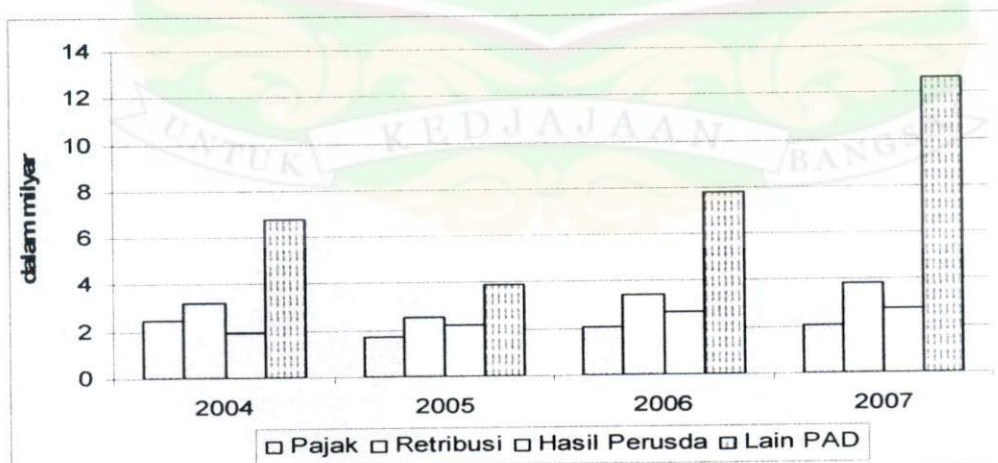
Kontribusi Komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sijunjung.

Jenis Penerimaan	2004		2005		2006		2007		Rata-rata	
	Juta (Rp.)	Kontribusi (%)	Juta (Rp.)	Kontribusi (%)	Juta (Rp.)	Kontribusi (%)	Juta (Rp.)	Kontribusi (%)	Juta (Rp.)	Kontribusi (%)
Pajak Daerah	2.459	17,13	1.726	16,67	2.020	12,72	2.049	9,69	2.063	13,37
Retribusi Daerah	3.244	22,60	2.526	24,39	3.403	21,43	3.794	17,94	3.242	21,01
Hasil Perusda	1.906	13,28	2.206	21,30	2.691	16,94	2.698	12,76	2.375	15,39
Lain-Lain PAD	6.743	46,98	3.898	37,64	7.765	48,90	12.605	59,61	7.753	50,23

Sumber : Perhitungan APBD Kab.Swl/Sijunjung Tahun 2004 – 2007, diolah

Gambar 5.2

Perkembangan Komponen PAD Kabupaten Sijunjung.



Sumber : Tabel 4.9., diolah

Secara rata-rata selama tahun 2004 sampai dengan 2007, terlihat Lain-lain PAD merupakan kontributor terbesar yakni sebesar 48,28%, yang kedua Retribusi dengan kontribusi sebesar 21,59%, yang ketiga Hasil Perusahaan Umum Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan memberikan kontribusi 16,07% dan yang terakhir adalah Pajak Daerah yang kontribusi rata-ratanya mencapai 14,05%. Dengan demikian jumlah kontribusi rata-rata dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah pemekaran di Kabupaten Sijunjung adalah 35,64% atau senilai Rp.5,3 milyar masih lebih kecil dari kontribusi Lain-lain PAD.

Dari pengamatan sejak tahun 2005 sampai dengan 2007, Pajak Daerah mengalami fluktuasi, secara nominal peningkatan yang terjadi pada Pajak Daerah selama 3 tahun adalah dari Rp.1,75 milyar menjadi Rp.2,81 atau 60,04%. Retribusi Daerah hampir tidak mengalami perubahan yang berarti yaitu semula di tahun 2005 sebesar Rp.1,94 milyar menjadi sebesar Rp.2,52 milyar atau hanya naik 29,84%. Sedangkan Penerimaan Lain-lain PAD yang syah, peningkatannya cukup signifikan yaitu dari Rp.3,69 milyar di tahun 2005 menjadi Rp.12,02 milyar ditahun 2007 atau meningkat 225,25%.

Pendapatan Asli Daerah Perkapita, Pendapatan Asli Daerah Perkapita diperoleh dengan membagi jumlah PAD dalam satu tahun dengan jumlah penduduk daerah yang bersangkutan di tahun yang sama. PAD perkapita dapat digambarkan sebagai kemampuan memungut PAD dari setiap masyarakat di daerah tersebut. Dengan demikian PAD perkapita dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan suatu daerah dalam memungut PAD dibandingkan dengan daerah lainnya. PAD yang nilainya besar saja belum tentu dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam optimalisasi pemungutan PAD,

melainkan harus dibandingkan dengan jumlah penduduk sebagai salah satu potensi. Sebab jumlah penduduklah yang mempengaruhi PAD perkapita dan sekaligus merupakan gambaran potensi dalam pengumpulan PAD.

Gambaran PAD perkapita pada Kabupaten dapat dilihat pada tabel 5.13. berikut ini :

Tabel 5.13
Pendapatan Asli Daerah Perkapita di Kabupaten Sijunjung

Tahun	PAD Perkapita Kabupaten Sijunjung (Rp.)		Pertumbuhan (%)
	Realisasi	Jumlah	
2004	40.348	40.348	-
2005	53.662	49.578	22,88
2006	80.740	76.748	54,80
2007	105.794	102.677	33,78

Sumber : Tabel 4.2. dan Tabel 4.6, diolah

Dari pengamatan data diatas terlihat, bahwa trend data PAD perkapita identik dengan trend data PAD total pada tabel 5.13 baik itu, perbandingan data sebelum dan setelah pemekaran maupun perbandingan data di kedua kabupaten, artinya pertumbuhan PAD yang terjadi baik itu sebelum dan setelah pemekaran di Kabupaten Sijunjung seiring dengan pertumbuhan PAD perkapita.

Hasil temuan yang diperlihatkan oleh Tabel 5.11 dan 5.12 dan 5.13 mengindikasikan: (a) tingginya tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Sijunjung; (b) cukup tingginya potensi PAD yang dimiliki Kabupaten Sijunjung, namun realisasi penerimaannya masih relatif rendah. Implikasi strategik dari temuan ini adalah pemerintahan Kabupaten Sijunjung harus melakukan tindakan

strategis dengan merumuskan *grand design* pengembangan potensi PAD melalui pendekatan sistem dan dalam kerangka perspektif jangka panjang. Setiap sub-sistem yang ada harus dioptimalkan efektivitas dan efesiensi kerjanya sehingga upaya peningkatan, perluasan dan penguatan basis penerimaan PAD dapat diwujudkan.

1. Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah.

Dengan semakin besarnya alokasi belanja yang bebas digunakan setelah pemekaran, tentu ini bisa diarahkan dalam penciptaan penerimaan di luar dari Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah ada. Pembangunan fisik untuk pelayanan yang bisa menciptakan Retribusi Jasa Usaha yang baru misalnya tentunya dengan melihat potensi objek pengguna pelayanan ini yang sudah tentu harus bisa berkelanjutan, seperti sarana pariwisata atau olahraga. Pengembangan Penyertaan Modal juga bisa dilakukan tidak hanya pada perusahaan daerah, akan tetapi bisa pada lembaga atau perusahaan swasta. Yang sudah tentu semuanya dengan pertimbangan tidak mengganggu belanja di sektor pelayanan publik lainnya. Dengan lebih memberdayakan organisasi dan birokrasi pada DPKD, peningkatan Ekstensifikasi dapat dilakukan melalui penggarapan objek Pajak dan Objek retribusi, seperti pada lampiran 3, sehingga penerimaan Pajak dan retribusi menjadi optimal pada APBD.

Perluasan objek pajak baru yang dalam proses di Kabupaten Sijunjung antara lain :

- a. Objek Pajak Kendaraan Bermotor termasuk kendaraan milik pemerintah
- b. Objek Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel,

- c. Objek Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering (jasa boga)
- d. Retribusi Izin Gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- e. Perubahan Perda Pajak dan Retribusi untuk perluasan objek, penyesuaian tarif dan perubahan nama yang mengacu pada UU no.28 tahun 2009 (masih dalam proses)
- f. Pembuatan Perda Pajak dan Retribusi yang baru, untuk:BPHTB telah menjadi pajak Daerah sesuai dengan Perda o. 11 tahun 2011, PBB-PP (paling lambat 1 Januari 2014), Pajak Sarang Burung Walet (masih dalam proses) Pajak Air Tanah (dalam proses).

Struktur ekonomi yang ada di Kabupaten Sijunjung yang didominasi oleh sektor pertanian memang merupakan salah satu karakteristik kabupaten. Akan tetapi sebuah potensi ekonomi yang bisa menjadi sumber penerimaan di daerah yaitu sektor industri pengolahan kontribusinya sangat kecil dalam PDRB. Untuk itu perlu adanya perencanaan dan perhatian didalam mendorong perkembangan industri pengolahan khususnya bagi pengolahan hasil pertanian sebagai sektor dominan dalam perekonomian begitu juga dengan hasil tambang.

Bukan berarti pertanian tidak menjadi prioritas, akan tetapi nilai tambah yang dihasilkan oleh industri pengolahan akan menyumbangkan peningkatan

perekonomian daerah. Sebagaimana telah digambarkan bahwa Kabupaten Sijunjung sub sektor kehutanan dari sektor pertanian terus mengalami penurunan, tentunya perlu upaya-upaya sehingga produksi hutan tidak lagi dijual dalam bentuk kayu batangan saja. Mendatangkan industri meubel modern dan peningkatan industri kecil meubel yang bisa bersaing setidaknya untuk pasaran domestik, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari sub sektor kehutanan khususnya kayu olahan.

Penambahan lahan perkebunan tentunya dengan harapan penambahan produksi bisa menjadi dasar perhitungan penambahan industri yang telah ada. Keberhasilan daerah perkebunan lain bisa dijadikan contoh seperti yang ada di daerah sumatera utara, yang industri pengolahan sawitnya tidak hanya pada CPO saja, industri sederhana pengguna minyak sawit seperti sabun cuci batangan banyak dikembangkan. Tentunya dengan peningkatan perekonomian daerah ini akan berimbas peningkatan pendapatan masyarakat secara makro. Tidak hanya sampai disitu, dengan adanya industri pengolahan tentu diharapkan juga membawa pengaruh positif bagi sektor lain seperti jasa angkutan, perdagangan dan restoran yang semua merupakan objek penerimaan daerah. Hal yang perlu dilakukan adalah membuat peluang bagi terciptanya industri tersebut.

Kebijakan agroindustri adalah salah satu alternatif yang bisa dilakukan daerah kabupaten dengan potensi pertanian yang dimiliki. Pemberian insentif dan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modal dalam bidang industri pengolahan juga bisa menjadi sebuah kebijakan lokal. Atau bisa dengan menggerakkan BUMD atau Perusahaan Daerah sebagai pionir dari ketiadaan investor sebagai pelaku industri pengolahan tersebut. Disamping itu juga perlunya

peningkatan fasilitas publik seperti peningkatan jalan, listrik, sarana pelayanan kesehatan, sekolah kejuruan dan sebagainya sehingga menjadi daya tarik bagi investor menanamkan usahanya di daerah.

Dengan adanya pembangunan rumah sakit di Tanah Badantuang akan mengakibatkan perubahan struktur wilayah dimana wilayah pertanian akan menjadi wilayah perekonomian yang meningkat dan akan mempengaruhi potensi pajak dan retribusi disekitar wilayah dimaksud. Juga perubahan yang terjadi di Kecamatan Kamang Baru dari lahan yang tidak produktif menjadi lahan perkebunan yang produktif sehingga perekonomian masyarakat disekitar juga akan memacu potensi pajak dan retribusi di Kabupaten Sijunjung

Implementasi konsep otonomi daerah memberikan peluang terhadap setiap daerah dalam mengelola sumber daya pembangunan daerahnya . Setiap daerah cenderung memiliki fleksibilitas dalam mengembangkan sektor produksi dengan basis sumber daya lokal. Pengelolaan sumber daya daerah yang relatif tepat diperkirakan akan mampu menciptakan keunggulan komparatif.

Mengingat Kabupaten Sijunjung sangat potensial dan memiliki peluang untuk dikembangkan . Orientasi pengembangannya harus mengarah kepada sistem agribisnis dengan sektor agroindustri sebagai komponen utamanya. Jika selama ini Kabupaten Sijunjung hanya lebih banyak mampu menghasilkan produk primer, kedepan harus diupayakan untuk menghasilkan produk- produk agroindustri. Produk agroindustri yang akan dihasilkan harus diseleksi terlebih dahulu melalui pengkajian komprehensif dan terpadu. Artinya, Pemkab Sijunjung harus mengidentifikasi terlebih dahulu produk sektor pertanian yang potensial untuk dijadikan sebagai input produk agroindustri .

Arah kebijakan ini dalam prosesnya akan mampu menciptakan keterkaitan langsung antara sektor pertanian dan sektor industri . Sentuhan kebijaksanaan yang maksimal sangat diperlukan sehingga pengembangan sektor pertanian dengan sistem agrobisnis mampu menghasilkan nilai tambah yang relatif tinggi . Diperkirakan sektor produksi inilah yang memiliki peluang relatif tinggi bagi Kabupaten Sijunjung . Karenanya, harus diprioritaskan dalam pengembangannya.

Peluang yang dimiliki Kabupaten Sijunjung dalam mengembankan sektor produksi pada giliran nya melahirkan peluang dalam pengembangan sumber-sumber PAD. Jika seluruh sektor tersebut diatas dapat dikembangkan secara maksimal, dengan sendirinya memberikan dampak langsung terhadap upaya peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Sijunjung. Pos PAD yang diperkirakan sangat potensial terhadap upaya peningkatan PAD adalah:

- a. Pajak Hotel dan Restoran.
- b. Pajak Penerangan Jalan
- c. Pajak Pengambilan dan Penggalian Golongan C
- d. Restribusi Pelayanan Kesehatan
- e. Retribusi Izin pemungutan hasil hutan kayu

Peluang yang dimiliki Kabupaten menuntut upaya yang maksimal dari seluruh pihak agar potensi dan peluang tersebut dapat direalisasikan. Dalam proses nya cukup banyak kelemahan dan tantangan yang dihadapi Pemkab Sijunjung. Dalam hal pengembangan sektor produksi yang potensial dan peningkatan realisasi PAD, berkaitan erat dengan upaya ekstensifikasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pada kesempatan wawancara tanggal 26 April 2011 Camat Kupitan

Hendri Caniago, S.sos didampingi Sekcam, *Irsat SE* menjawab wawancara penulis

” tantangan dalam memungut pajak dan retribusi, Disamping objek pungutan memiliki potensi yang tidak memadai, perlu pula diperhitungkan pertumbuhan objek, sehingga upaya peningkatan penerimaan Daerah dapat berkesinambungan dan atas hasil nya sesuai dengan inventarisasi objek pungutan yang potensial, kurang memadai data dan tenaga pengelola tingkat kecamatan , sebaiknya pemungutan objek tertentu dilimpahkan menjadi sumber penerimaan Nagari/Desa. Agar Tidak menimbulkan terjadinya ekonomi biaya tinggi (high economic cost).

Kelemahan dan tantangan utama yang dihadapi adalah:

1. Kelemahan utama antara lain: (a) kondisi birokrasi dan regulasi yang belum kondusif sehingga mampu menciptakan insentif bagi investor dalam melakukan investasi di Kabupten Sijunjung ;(b) belum tersedianya informasi yang bersipat komprehensif tentang proyek- proyek investasi yang *feasible*;(c) masih relatif rendahnya komitmen Aparaturdalam menjawab tantangan pelaksanaan otonomi daerah, utamanya dalam hal penciptaan dan memperluas basis PAD;(e) belum adanya rancangan kegiatan sosialisasi Perda baru ;(f) kondisi masyarakat yang mengindikasikan terjadinya *lower trust society*.
2. Tantangan utama antara lain kondisi stabilitas politik dan keamanan yang masih belum menunjukan kearah terjadinya pemulihan . Hal inimenimbulkan implikasi langsung terhadap pemulihan ekonomi masyarakat dan sekaligus pengembanan sektor produksi potensial yang sangat memerlukan dana dalam jumlah yang relatif besar.

Pada kesempatan wawancara tanggal 12 Mei 2011 Sekretaris DPKD *Delganef*, SE didampingi Kepala seksi Perencanaan *Ramli*, SE menjawab wawancara penulis dengan sekaligus menjelaskan:

“ **Ektensifikasi** dilakukan guna menggali sumber-sumber pendapatan baru, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, dan kriteria jenis pajak/retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Sesuai dengan semangat Undang-undang 34 Tahun 2000, maka penerimaan APBD yang berasal dari Pajak/Retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, dengan demikian Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya sejalan dengan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung-jawab yang diberikan Daerah. Oleh sebab itu perlu dilakukan inventarisasi kewenangan pungutan Daerah terlebih dahulu.
- c. Dalam proses inventarisasi kewenangan dibidang pungutan Daerah didasarkan atas beberapa asumsi sebagai berikut :
 - 1) Jenis pungutan melekat pada kewenangan Pemerintah Kabupaten.
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan Pemerintah menjadi kewenangan Daerah.
Berkenaan dengan hal tersebut, maka setiap Instansi/Unit Kerja sebagai bakal Dinas, Badan dan Kantor perlu menginventarisasi jenis-jenis kewenangan berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2000, dan menggali peluang yang dapat dijadikan sebagai sumber kewenangan Daerah.
 - 2) Memiliki potensi yang cukup memadai.
Pada umumnya setiap pajak/retribusi melekat pada sektor ekonomi, pada saat terjadi eksploitasi, produksi, transaksi atau atas pelayanan sarana dan jasa yang diberikan.
Dalam menginventarisir jenis-jenis Pajak Daerah perlu

2. Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah.

Intensifikasi harus mampu terus dilakukan oleh pemerintah daerah, jika selama ini hasil yang diperoleh dari pajak, retribusi maupun laba perusahaan

daerah belum optimal. Optimalisasi dapat dilakukan dengan merasionalisasikan tarif dan basis, misalnya retribusi jasa umum harus memperhatikan *cost recovery* atau pungutan atas jasa yang diberikan untuk menutupi biaya yang ditimbulkan, retribusi jasa usaha harus dapat menghasilkan laba yang sesuai dengan kondisi pasar, perizinan harus dapat menutupi biaya administrasi yang ditimbulkan.

Dan satu hal yang terpenting adalah pengenaan tarif pajak, tidak harus dikenakan maksimal sesuai dengan perundang-undangan jika tidak dapat dipungut. Pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilakukan perusahaan daerah perlu ditingkatkan, sehingga dapat dihindari suatu tindakan usaha yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan daerah tersebut yang akhirnya akan mengurangi deviden bagi penerimaan daerah. Pengelolaan Kas Daerah yang selama ini menjadi salah satu sumber penerimaan lain-lain, bisa ditingkatkan dengan cara meningkatkan kemampuan administratif untuk menganalisa potensi kas yang ada dengan kebutuhan belanja dari harian sampai pada periode bulanan.

Untuk melakukan pengawasan mengenai tarif perlu diidentifikasi dapat dilakukan oleh pemda dikoordinir DPKD dengan jalan melakukan pengecekan secara langsung ke lapangan mengenai tarif perlu dilakukan terhadap objek dan subjek pajak/retribusi. Kegiatan ini perlu melibatkan beberapa dinas/skpd/instansi terkait, misalnya dinas pariwisata, PU, dekooperindag dan dinas lainnya. Kerjasama itu berada dibawah koordinasi bupati/wabup/ walikota/ wawako /sekda. Dalam menginventarisir jenis-jenis Pajak Daerah perlu diperhitungkan potensi penerimaan sesuai dengan jumlah objek, dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan jumlah pajak terutang.

Untuk jenis-jenis Pajak Daerah perlu diperhitungkan potensi penerimaan sesuai dengan jumlah objek, dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan jumlah pajak terutang. Sedangkan untuk jenis-jenis pungutan Retribusi Daerah yang perlu diperhitungkan adalah jumlah objek, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, dan besarnya tarif retribusi. Untuk penetapan tarif dilakukan dengan berbagai cara antara lain :

a. Penaksiran pajak

- Menghitung pajak sendiri (self assesment)
- Penaksiran oleh petugas pajak (official assesment)

b. Penetapan target

Harus didasarkan pada potensi yang ada, sesuai dengan tarif menurut perda. Bila tidak maka target yang ditetapkan mungkin saja jauh lebih rendah dibandingkan dengan potensi yang dimiliki.

c. Penetapan tarif.

Tarif ditetapkan berdasarkan perda dan mengacu pada undang-undang pajak dan retribusi daerah (uu no 34 tahun 2000 dan uu no.28 tahun 2009). Perubahan tarif paling lama (broadening tax rate) paling lama antara (3 – 5) tahun. Penetapan tarif tidak harus terlalu tinggi, tapi harus memperhatikan kemampuan ekonomi atau pendapatan masyarakat. Tarif yang tinggi juga dikawatirkan akan menimbulkan (1) ekonomi distorsi (distortion economics (2). Menimbulkan kemungkinan adanya kolusi antara petugas pajak dengan subjek pajak. (3). Masyarakat enggan melunasi kewajiban pajaknya.

d. Pemungutan dan pembayaran

Permasalahan serius yang sering terjadi dalam pemungutan pajak pada beberapa daerah adalah untuk pajak hotel, restoran, reklame, pajak hiburan dan pajak air permukaan dan air bawah tanah. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat efektifitas penerimaan masing-masing jenis pajak tersebut.

e. Sistem pencatatan dan pelaporan

Sistem pencatatan dan pelaporan dilakukan tiap hari oleh bagian pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga meningkatkan rasa kepercayaan dan kesadaran bagi wajib pajak. Petugas pencatat dengan petugas membuat laporan harus dibedakan orangnya.

F Pengawasan

Pengawasan dilakukan tidak hanya untuk mengurangi tingkat kebocoran dan penyimpangan pengelolaan pendapatan/ pajak daerah , tetapi diarahkan untuk menciptakan tindakan aparaturnya sehingga menjadi lebih efektif, efisien dan bersih. Dengan adanya pengawasan akan memberikan dorongan dan motivasi yang tinggi bagi petugas lapangan untuk bekerja secara optimal.

g. Pemaksaan dan penerapan sanksi

Pemaksaan dan penerapan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban pajaknya. Sanksi yang efektif dapat dikaitkan dengan kegiatan perbankan ataupun shock therapy.

H. Kemampuan SDM

Kemampuan pengelola pajak/retribusi sangat menentukan untuk peningkatan pendapatan pajak daerah. Karena itu kuantitas dan kualitas pengelola

pajak/retribusi yang memadai haruslah diupayakan. Ada dua hal yang perlu dilakukan : (1) menempatkan tenaga yang memiliki latar belakang pendidikan/pelatihan dibidang keuangan daerah. (2) menempatkan tenaga yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk meyakinkan para wajib pajak.

Fauzi, K SE Kabid anggaran DPKD didampingi Surya Saputra ,MS.i kasi Pajak menjelaskan dan menguraikan dalam wawancara tanggal 20 Mai 2011

“ Adapun strategi yang ditempuh dalam upaya peningkatan penerimaan PAD adalah : **Intensifikasi** dimaksudkan mengoptimalkan penerimaan sumber-sumber yang telah ada selama ini, yaitu :

- a. Dalam rangka optimalisasi penerimaan Daerah atas sumber-sumber pendapatan yang telah ada, dengan mengkaji kembali Peraturan Daerah tentang perpajakan/retribusi yang berlaku selama ini, yang meliputi aspek tarif, penyederhanaan sistim dan prosedur, perluasan objek, dan peningkatan pengawasan Perda.
- b. Penyesuaian Tarif.
 - 1). Melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan ketentuan Perda yang telah ada, karena sebelumnya pada beberapa ayat penerimaan penyesuaian dilakukan secara bertahap.
 - 2). Meneliti kembali dasar pengenaan pajak/retribusi terutang yang berlaku saat ini, sehingga dapat meningkatkan penerimaan Daerah.
- d. Penyederhanaan sistim dan prosedur.
 - 1) Melimpahkan tambahan kewenangan pungutan kepada Camat.
 - Pendaftaran ulang TDP/SIUP.
 - Surat Izin Pemakaian Tanah Pemda.
 - Retribusi Izin mendirikan Bangunan
 - 2) Melimpahkan kewenangan pungutan kepada Pemerintah Nagari/Desa
 - 3) Memfungsikan kembali pos pengawasan dan pemungutan retribusi di Simancung dan Batang Kering.
 - 4) Memberikan pelayanan keliling atas pengurusan perizinan dan pelayanan lainnya.
 - 5) Menyempurnakan dan meningkatkan pelayanan pada Unit Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten, terutama yang berkaitan dengan kesiapan personil dan formulir yang harus disediakan sesuai persyaratan yang diperlukan.
 - 6) Penyetoran setiap uang-uang Daerah dilakukan secara bruto ke Kas Daerah, sehingga potensi rill PAD tercermin dalam APBD setiap tahun.

- 7) Menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, seperti Pajak Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan; dan
- 8) Memberikan keleluasaan penetapan tarif pajak kepada provinsi (ditetapkan dengan Perda) kecuali Pajak Rokok sepanjang tidak melanggar tarif minimum dan maksimum yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Tarif minimum ditetapkan untuk objek pajak yang mudah bergerak (kendaraan bermotor) untuk menghindari perang tarif antar daerah.
- 9) Daerah didorong untuk mengoptimalkan pemungutan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak menciptakan jenis pungutan baru yang potensinya relatif kecil dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

D. Optimalisasi kelembagaan

Optimalisasi dapat dilakukan baik di dalam tubuh organisasi birokrasi pengelola Pajak dan Retribusi sampai kejajaran lini,. Maupun dengan memberdayakan kelompok social masyarakat, serta sosialisasi Ketentuan Perda. Ada tiga sub sistem yang perlu diperhatikan dalam rangka membangun basis pengembangan PAD Kabupaten Sijunjung.

1. Instansi/Dinas unit pengelola PAD
2. Budaya dan lembaga sosial budaya
3. Undang-undang dan Peraturan Daerah

Ketiga sub sistem tersebut saling terkait satu sama lainnya. Undang-undang dan Peraturan daerah akan menentukan *coverage* PAD dan fleksibilitas instansi unit pengelola dalam mengembangkan dan memperkuat basis penerimaan PAD. Pada saat yang sama instansi unit pengelola harus; (1) mampu merangsang aktivitas ekonomi masyarakat melalui kebijakan yang spesifik dan operasional; (2) memahami budaya dan lembaga sosial budaya; (3) sosialisasi kebijakan.

1. Instansi/Dinas Pengelola PAD

.Instansi/Dinas/Kantor yang terkait dengan pengelolaan sumber PAD merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan realisasi PAD. Sampai sejauh mana kinerja Instansi/Dinas/Kantor pengelola PAD sangat ditentukan oleh sampai sejauh mana SDM pengelola mampu bekerja secara profesional. Artinya, setiap SDM pengelola harus terampil dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan deskripsi pekerjaan tersebut. Ada beberapa aspek penting yang harus dipahami secara baik oleh setiap SDM yang berada dalam sistem pengelolaan PAD yaitu:

- Pemahaman terhadap prosedur penetapan dan pemungutan PAD.
- Perhitungan potensi rill penerimaan PAD.
- Pengembangan sistem pengelolaan dan pemungutan PAD.
- Perhitungan efektivitas dan efesiensi PAD.
- Perhitungan kelayakan Pos PAD baru.

Pemahaman tentang prosedur penetapan dan pemungutan PAD sangat penting artinya bagi SDM pengelola PAD. Mereka harus memiliki pengetahuan teknis dalam proses pengelolaan, penetapan dan pemungutan sumber-sumber PAD. Dengan pengetahuan teknis tersebut diharapkan realisasi penerimaan PAD sesuai potensi rill setiap pos PAD.

Senanda dengan uraian diatas Jhon Kannedy, S.Sos Kepala kantor Satpol PP mengemukakan :

Dalam menginventarisir jenis pajak/retribusi Daerah, perlu dihindari pungutan yang dapat menyebabkan timbulnya stagnasi dalam pertumbuhan perekonomian Daerah. Oleh sebab itu perlu dikaji dampak pungutan terhadap aktivitas ekonomi lainnya. Sedangkan pungutan yang memiliki aspek keterkaitan yang luas terutama dengan usaha kecil dan menengah untuk sementara perlu dihindari, karena pada akhirnya kemerosotan kegiatan ekonomi tersebut akan menimbulkan dampak negatif dalam pertumbuhan penerimaan Daerah tahun berikutnya. Dimasa lalu kekhawatiran Pemerintah Pusat akan terjadinya hal tersebut diatasi dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, sehingga pungutan Pajak/Retribusi Daerah bersifat sangat limitatif.

Disamping itu Efisiensi dan Rasionalitas dalam pemungutan Pajak/Retribusi dimaksudkan untuk mendapatkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam upaya inventarisasi jenis pungutan sekaligus perlu dirumuskan sistim dan prosedur operasional, sehingga setiap pungutan dapat memberikan manfaat yang optimal, dengan menghindari biaya pemungutan yang besar. (wawancara tanggal 18 Mei 2011)

Sistim dan prosedur operasional tersebut antara lain meliputi pelimpahan kewenangan kepada Daerah bawahan, pembentukan UPTD, kerjasama dengan Pihak Ketiga, dengan sistim bagi hasil, dan lain sebagainya.

Dokumen teknis yang berkaitan dengan tahap-tahap penetapan PAD telah diatur dalam Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA). Pemahaman yang baik tentang hal ini sangat diperlukan bagi unit pengelola PAD. Realisasi penerimaan PAD secara signifikan sangat dipengaruhi oleh sampai sejauh mana setiap unit pengelola mampu bekerja secara optimal pada setiap tahap tersebut, terutama sekali yang berkaitan dengan perhitungan potensi rill dan teknis pemungutan setiap pos PAD.

Diantara tahap-tahap penetapan dan pemungutan PAD, tahap perhitungan potensi rill penerimaan setiap pos PAD merupakan tahap yang sangat penting artinya dan bersifat strategis dalam upaya peningkatan realisasi penerimaan PAD. Pada saat unit pengelola tidak melakukan perhitungan secara rill potensi setiap pos PAD secara teknis, kecenderungan yang sangat mungkin terjadi adalah penetapan target penerimaan PAD tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Hasil penelusuran dokumen ditemukan bahwa Pemerintahan Kabupaten Sijunjung telah melakukan perhitungan potensi rill PAD. Namun proses perhitungan tersebut belum didasarkan atas metodologi dan asumsi yang jelas.

Akibatnya, hasil perhitungan sangat jauh lebih rendah dari potensi rill yang dimiliki.

Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan tidak ditemukannya hasil perhitungan yang didasarkan atas metodologi dan asumsi yang jelas: 1). masih relatif rendahnya komitmen SDM pengelola PAD dalam melakukan perhitungan potensi rill PAD. Akibatnya mereka cenderung kurang memiliki kepedulian dalam melakukan pendataan objek pengenaan PAD (data base). Pada satu sisi data base objek pengenaan PAD memiliki arti penting dan bersifat strategis, namun pada sisi lain masih ditemukan unit pengelola PAD yang tidak memilikinya. Buktinya, hanya sebagian kecil dari pos PAD yang memenuhi syarat untuk diestimasi dengan metode 3. Hal ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintahan Kabupaten Sijunjung dalam era implementasi otonomi daerah. 2). Dalam proses pendataan objek pengenaan PAD secara rill diperkirakan memerlukan biaya survey yang relatif besar.

Akibatnya cenderung terjadi pembuatan data base tidak termasuk prioritas dalam pelaksanaannya. Idealnya setiap unit pengelola PAD harus memiliki data base objek pengenaan PAD yang mereka kelola. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari data base antara lain:

1. Unit pengelola akan mampu menghitung potensi setiap pos PAD.
2. Setiap saat unit pengelola PAD mampu melakukan evaluasi perubahan kondisi rill potensi sumber-sumber PAD. Hasil Evaluasi tersebut pada gilirannya dapat dijadikan sebagai *entry point* dalam merumuskan pengembangan potensi yang dimiliki.

3. Unit pengelola PAD akan mampu mendeteksi sedini mungkin persoalan-persoalan rill yang terjadi pada setiap objek pengenaan PAD.
4. Dengan data base, unit pengelola PAD diperkirakan mampu menciptakan sistem pemungutan dan pengendalian yang efektif dan efisien. Pada gilirannya hal ini diperkirakan mampu meminimalkan kebocoran dalam proses pemungutan.

Hasil penelusuran dokumen yang mencakup seluruh pos PAD ditemukan bahwa seluruh pos PAD telah ditetapkan target penerimaannya. Berdasarkan dokumen tersebut pencapaian target penerimaan PAD relatif tinggi (rerata 122,69% selama periode analisis). Data ini mengidentifikasi bahwa target penerimaan PAD tidak didasarkan atas potensi rill PAD. Akibatnya, target penerimaan PAD cenderung ditetapkan relatif rendah. Namun studi ini menemukan bahwa realisasi penerimaan PAD hanya sebesar 14,58% dari potensi yang dimiliki tahun 2003.

Fakta diatas secara keseluruhan diperkirakan menimbulkan dampak langsung terhadap Pemkab Sijunjung dalam menilai kinerja unit pengelola PAD. Dalam keadaan tertentu mungkin saja unit pengelola PAD menetapkan target penerimaan yang relatif rendah. Akibatnya realisasi penerimaan relatif tinggi, jika ukuran kinerja yang dipakai adalah pencapaian target penerimaan maka hal ini menunjukkan kinerja yang tinggi. Disamping itu sangat mudah mengatakan kinerja unit pengelola rendah jika pencapaian target penerimaannya rendah.

Kelihatannya ukuran kinerja ini kurang memberikan gambaran kondisi yang sesungguhnya. Ukuran kinerja yang ideal adalah potensi rill dan realisasi penerimaan. Perubahan ini sangat krusial dalam upaya meningkatkan realisasi

penerimaan PAD. Pada satu sisi unit pengelola PAD cenderung bekerja maksimal untuk menghitung potensi setiap pos PAD. Pada sisi lain penentuan target penerimaan PAD yang terlalu rendah dan terlalu tinggi dapat dihindarkan.

Informasi lainnya yang berkaitan dengan unit pengelola PAD peluang diciptakannya perluasan cakupan PAD. Kreativitas dan inovativitas unit pengelola PAD sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD. Tanpa adanya personality yang demikian diperkirakan Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan memperkuat basis penerimaan PAD.

Demikian halnya Budaya dan lembaga sosial budaya yang eksis dalam komunitas tertentu merupakan sub komponen lainnya yang diperkirakan berperan strategis dalam mendukung upaya peningkatan dan perluasan basis penerimaan PAD. Sub sistem ini perannya menjadi lebih penting dan signifikan pada saat setiap pemerintahan Kabupaten/Kota merevisi dan merubah Perda tentang PAD yang harus sesuai dengan roh UU No.22 dan 25 tahun 1999.

2. Perda Tentang PAD

Perda merupakan instrumen hukum yang dijadikan sebagai dasar bagi Pemda dalam melakukan pemungutan baik berupa pajak maupun retribusi dan pos penerimaan lainnya. Perda harus mampu mencakup seluruh potensi PAD yang dimiliki oleh Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan penelusuran dokumen yang berkaitan dengan Perda tentang PAD, kelihatannya untuk saat ini diperkirakan sudah memadai. Namun hasil temuan studi ini memperlihatkan tidak konsistennya pelaksanaan Perda PAD dengan realisasi pemungutan PAD itu sendiri.. Faktor inilah yang menyebabkan rendahnya efektivitas pemungutan pos retribusi pemangkalan hasil bumi. Untuk kondisi sekarang,

Studi ini mengamati kecenderungan sistem nilai budaya yang diperkirakan dapat menghambat dan mendukung perubahan baru, terutama sekali yang erat kaitannya dengan perubahan-perubahan yang dilakukan aparatatur Pemerintah Daerah. Secara konkrit bentuk perubahan yang dilakukan oleh setiap Pemda termasuk Kabupaten Sijunjung adalah perubahan Perda tentang PAD.

Perda tentang PAD merupakan kebijakan publik yang tujuannya untuk menciptakan aliran pendapatan bagi Pemkab Sijunjung sudah melahirkan sejumlah Perda baru tentang PAD. Persoalannya sekarang adalah apakah Perda baru yang dianggap sebagai salah satu bentuk konkrit dari perubahan direspon secara positif atau negatif oleh masyarakat Kabupaten Sijunjung. secara umum ada 3 persoalan utama sehubungan dengan implementasi Perda tentang PAD yang perlu diperhatikan dalam waktu dekat oleh Pemkab Sijunjung.

1. Sosialisasi Perda kepada seluruh masyarakat.

Pada umumnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi masih relatif rendah. Rendahnya kesadaran hukum tersebut akibat terbatasnya pengetahuan atau informasi yang dapat dimiliki masyarakat tentang manajemen pos-pos PAD. Banyak sumber-sumber PAD yang belum diketahui masyarakat umum. Sosialisasi dalam hal ini mencakup pemahaman terhadap permasalahan otonomi daerah secara umum dan pemanfaatan pajak dan retribusi tersebut dalam pembangunan daerah. Sosialisasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan kelembagaan nagari. Rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah selama ini juga akibat kesalahan dalam pendekatan yang dilakukan.

Rasa memiliki dan perhatian masyarakat akan semakin tinggi apabila mereka sejak dari perencanaan sampai implementasi dilibatkan.

2. Administrasi Pemungutan., Administrasi pemungutan pajak dan retribusi masih belum berjalannya dengan baik. Perbaikan administrasi pemungutan dimaksud mengarah pada efesiensi pemungutan, pengurangan kebocoran, sistem pemungutan, pelaporan dan internal kontrolnya. Jika semua semua aspek ini dapat diwujudkan, pada gilirannya dapat diciptakan semakin baiknya efisiensi: (1) biaya pemungutan (2) biaya pelayanan (3) biaya penagihan. Rendahnya penerimaan PAD, dapat saja disebabkan tidak efektifnya administrasi pemungutan.

3. Peluasan Cakupan Objek Pajak/ Retribusi

Masih terdapat objek-objek pajak potensia yang belum dikelola dengan baik selama ini. Objek pajak tersebut antara lain:

- a. Pajak hotel dan restoran. Berdasarkan pengamatan, masih cukup banyak rumah makan yang selama ini belum dipungut pajak. Demikian juga dengan hotel atau penginapan, termasuk dalam kelompok ini adalah rumah-rumah kotrakan atau sewaan.
- b. Retribusi pelayanan kesehatan. Untuk meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan perlu diperluas pada klinik swasta, bidan, dokter praktek dan jasa pengobatan lainnya yang bersipat bisnis (menarik dana dari masyarakat).
- c. Retribusi izin gangguan . Selama ini masih banyak usaha yang belum terjangkau oleh dinas- dinas pengelola PAD. Misalnya perusahaan kecil,

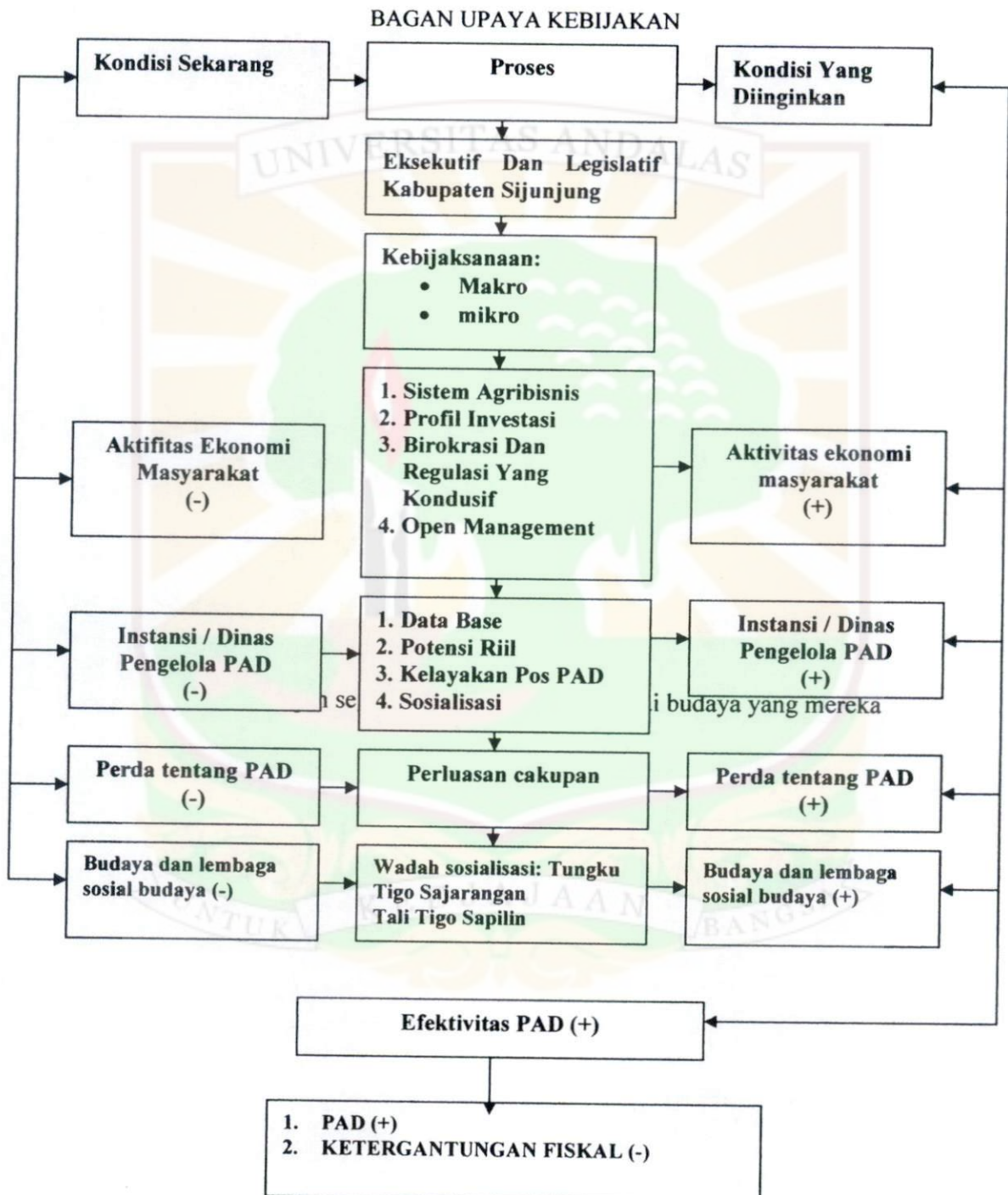
perbengkelan, peternakan dan RMU kususnya yang berada di daerah pedesaan.

- d. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan . Untuk efektifnya retribusi ini, Pemda harus menyediakan sarana dan prasarana pendukung. Misalnya pasar ternak dan pasar hasil bumi. Berdasarkan pengamatan masih banyak pasar di daerah Kabupaten Sijunjung yang belum mempunyai fasilitas pendukung, sementara di pasar tersebut banyak ternak dan hasil bumi.
- e. Retribusi parkir ditepi jalan umum . Untuk meningkatkan penerimaan pada pos ini dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung . Masih banyak tempat parkir yang belum di kelola dengan baik karena tidak tersedianya sarana dan prasarana perparkiran .
- f. Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan . Masalah yang menghambat pemungutan retribusi ini adalah masih kurang nya sarana dan prasarana penampungan pemusnahan sampah yang cukup. Di pasar- pasar nagari / desa masih banyak yang belum dilengkapi tempat pembuangan sampah sementara .
- g. Retribusi terminal . Retribusi ini potensial untuk ditingkatkan, namun membutuhkan perluasan cakupan dan disertai penyediaan sarana dan prasarana terminal .Saat ini masih banyak pasar-pasar atau tempat pemberhentian bus / mini bus yang belum dikelola dengan baik oleh Pemda,sehingga pemungutan retribusinya tidak maksimal.

Kedua komponen ini merupakan komponen yang sangat menjanjikan dan selama ini pendapatan yang berasal dari perolehan hasil pajak daerah dan

retribusi daerah merupakan komponen yang memberikan sumbangan yang besar dalam struktur pendapatan yang berasal dari pendatan asli daerah.

Gambar 5.3



Sebagai salah satu sumber pembiayaan yang dimiliki oleh daerah, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh tingkat pemerintahan lokal (Pemda) yang digali oleh pemerintah daerah tersebut dari sumber-sumber ekonomi yang ada di daerahnya. Dalam konsep pendapatan asli daerah ini tercakup komponen-komponen penerimaan yang berasal dari hasil perolehan pajak daerah, retribusi daerah, bagian daerah yang berasal dari laba Badan Usaha Milik Daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Ciri umum yang terlihat dari sumber-sumber PAD adalah banyak jenis penerimaan yang diserahkan kepada daerah, tetapi sebagian besar kurang potensial dalam artian lebih besar.

Sistem nilai budaya masyarakat Kabupaten Sijunjung sebagai sub komunitas suku Minangkabau biasanya diungkapkan melalui pepatah dan petiti. Seluruh pepatah dan petiti tersebut selalu dijadikan sebagai acuan dalam bertindak dan berfikir. Dalam konteks perubahan kebijaksanaan publik berupa Perda baru, diperkirakan masyarakat Kabupaten Sijunjung dapat meresponnya secara positif. Hal ini sesuai dengan pepatah yang selalu mereka dengungkan antara lain; *Sakali Aia Gadang, Sakali Tapian Barubah*. Pepatah ini mengindikasikan bahwa sistem nilai budaya masyarakat Kabupaten Sijunjung pada hakekatnya selalu merespons secara positif setiap perubahan. Namun yang sering menjadi persoalan adalah proses menciptakan perubahan tersebut. Ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam proses tersebut:

1. Sampai sejauh mana seluruh komponen masyarakat dilibatkan dalam proses menciptakan perubahan (Perda baru). Pada saat masyarakat merasa

diikutsertakan, maka pada saat itu tidak akan ada persoalan dalam mengupayakan agar perubahan tersebut diadopsi oleh masyarakat. Fakta ini sesuai dengan pepatah yang diyakini masyarakat antara lain; *Lamak Makan Basamo, Lamak Kato Dipaiokan, Bulek Kato Jo Mufakat, Bulek Aia Dek Pambuluah, Duduak Surang Basampik-Sampik, Duduak Basamo Balapang-Lapang*. Sebaliknya, jika masyarakat merasa tidak diikutsertakan, pada saat itu cenderung timbul permasalahan. Dalam hal Perda baru yang membawa perubahan terhadap masyarakat, dalam prosesnya dapat dikatakan sudah melibatkan masyarakat yaitu para anggota DPRD Ting Kabupaten Sijunjung karena anggota DPRD merupakan representasi dari masyarakat secara keseluruhan.

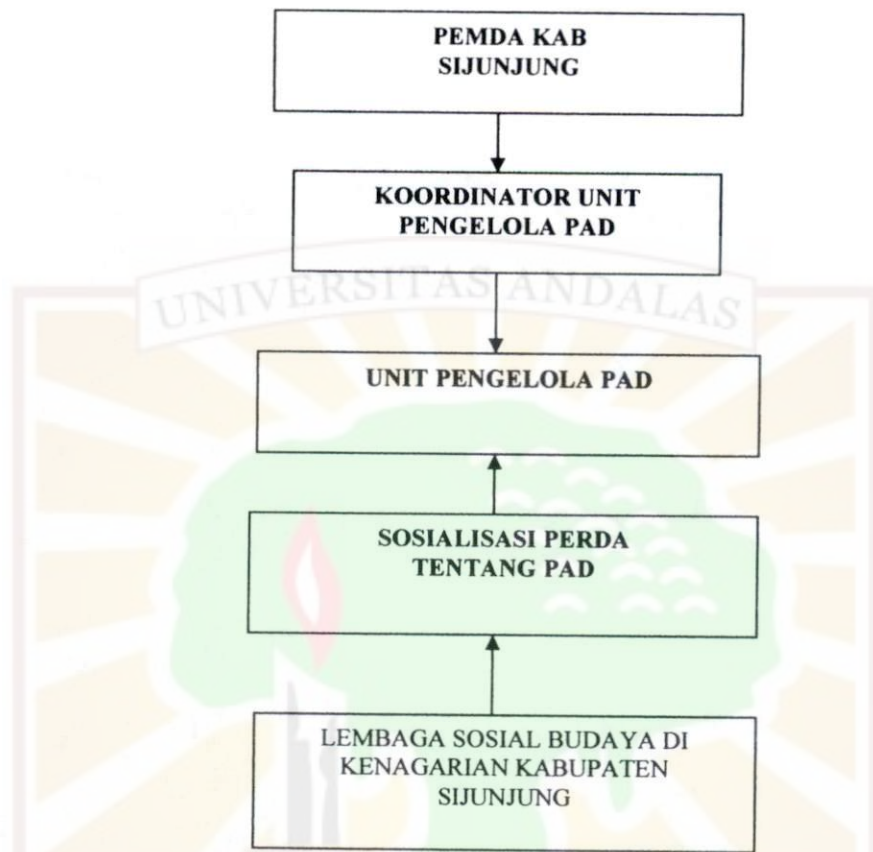
2. Jika proses pada point (1) dapat dilakukan secara baik, maka persoalan berikutnya adalah apakah Pemkab Sijunjung telah melakukan sosialisasi secara intensif. Hal ini merupakan persoalan penting dan sangat menentukan bagi Pemkab dalam menciptakan agar seluruh Perda baru dapat dipahami masyarakat. Dengan pemahaman tersebut pada gilirannya diharapkan masyarakat memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi untuk mendukung berhasilnya perubahan tersebut dalam meningkatkan akselerasi pembangunan daerah. Dalam proses sosialisasi harus dikonstruksi secara baik sehingga efektivitas dan efesiensi sosialisasi yang tinggi dapat diwujudkan.
3. Sampai sejauh mana para pengambil keputusan mampu menciptakan *open management* yang berkaitan dengan hasil dan manfaat yang diperoleh dari kebijaksanaan tersebut (Perda baru). *Open management* baik dalam hal penerimaan maupun pengalokasian dana. Pengalaman selama ini

menunjukkan, cukup banyak persoalan yang muncul dalam aspek pengelolaan keuangan daerah. Bila ditelusuri lebih jauh persoalan yang sangat krusial dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah adalah relatif rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para pengambil kebijakan publik. Fakta menunjukkan, cukup banyak informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah dan atau negara. Misalnya, informasi tentang KKN dan lebih konkrit misalnya, informasi yang hampir seluruh warga masyarakat mengkonsumsinya adalah bahwa Indonesia termasuk salah satu negara di dunia dengan tingkat korupsi yang relatif tinggi. Informasi itulah yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor publik. Dikaitkan dengan konteks sistem nilai budaya Minangkabau, fenomena tersebut semakin membuat masyarakat tidak percaya, sesuai dengan pepatah yang selalu mereka dengungkan "*Sakali Lancuang Ka Ujian, Saumua Hiduik Ndak Picayo*". Fenomena ini kelihatannya masih memperlihatkan indikasi kearah masih belum terciptanya sikap saling mempercayai di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akibatnya, masyarakat kita berada pada kondisi yang menunjukkan "*Lower Trust Society* bukan *High Trust Society*". Mengembalikan sikap saling mempercayai sehingga terwujud *High Trust Society* merupakan tantangan yang cukup besar bagi sektor publik. Tanpa adanya kepercayaan masyarakat sangat mustahil roda pemerintahan dapat bergerak ke arah yang diinginkan. Implikasinya bagi Pemkab Sijunjung adalah upaya maksimal yang harus dilakukan dengan

perspektif jangka panjang dalam menciptakan *Clean Governance* yang merupakan embrio dari lahirnya *Community Government*.

Dalam kaitannya dengan proses sosialisasi setiap Perda baru harus dipikirkan agar sosialisasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi dapat dilihat dari ketepatan cara yang didesain dan biaya sosialisasi. Dalam konteks ini, ada beberapa instrumen yang dapat dimanfaatkan antara lain; (1) lembaga sosial budaya yang eksis di tengah masyarakat dan (2) pemimpin informal nagari.

Ada beberapa lembaga sosial budaya di kenagarian Kabupaten Sijunjung yang sangat potensial untuk dijadikan sebagai wadah untuk melakukan sosialisasi. Lembaga tersebut antara lain; (1) lembaga pengajian agama, (2) lembaga kerapatan adat nagari, (3) lembaga kepemudaan. Semua lembaga tersebut memiliki pemimpin informal yang sangat mereka percayai, sehingga sangat potensial perannya dalam mempengaruhi dan meyakinkan anggota komunitasnya untuk mengadopsi perubahan-perubahan tertentu. Oleh karena itu Pemkab Sijunjung harus menjadikan semua lembaga tersebut sebagai basis dalam proses sosialisasi seluruh Perda tentang PAD di Kabupaten Sijunjung. Sebagai gambaran dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 5.4.**Proses Sosialisasi Perda Baru**

Sebagai salah satu sumber pembiayaan yang dimiliki oleh daerah, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh tingkat pemerintahan lokal (Pemda) yang digali oleh pemerintah daerah tersebut dari sumber-sumber ekonomi yang ada di daerahnya. Dalam konsep pendapatan asli daerah ini tercakup komponen-komponen penerimaan yang berasal dari hasil perolehan pajak daerah, retribusi daerah, bagian daerah yang berasal dari laba Badan Usaha Milik Daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Ciri umum yang terlihat dari sumber-sumber PAD adalah banyak jenis penerimaan

yang diserahkan kepada daerah, tetapi sebagian besar kurang potensial dalam artian lebih besar biaya pemungutannya daripada hasil pungutannya.

Secara teoritik, PAD merupakan suatu sumbangan nyata yang diberikan oleh masyarakat setempat guna mendukung status otonom yang diberikan kepada daerahnya. Tanda dukungan dalam bentuk besarnya perolehan PAD penting artinya bagi suatu pemerintah daerah agar memiliki keleluasaan yang lebih dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari maupun pembangunan yang ada di wilayahnya. Seorang pakar dari World Bank³ berpendapat bahwa batas 20 % perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20 % tersebut, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri

Di sejumlah negara berkembang, pemerintah-pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan pendapatannya. Beragam langkah ditempuh untuk mewujudkan perolehan penerimaan yang cukup substansial untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang diemban oleh pemerintah daerah otonom. Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah otonom adalah meningkatkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan jalan secara terus menerus menyempurnakan administrasi pendapatan daerahnya.

Dalam hal pajak daerah, pembagian kewenangan yang “benar” dalam struktur jenjang pemerintahan sangat jelas secara prinsip, tetapi secara umum kontroversial dalam prakteknya. Permasalahan mendasar dapat dilihat dari dua sudut. Pertama, kemampuan yang melekat pada pusat untuk dapat memungut semua pajak secara lebih efisien dari daerah. Kedua, basis-basis (objek) pajak

potensi yang dapat dijangkau daerah sangat beragam antara satu daerah dan daerah lainnya. Hal pertama dari permasalahan ini terkait dengan ketidakseimbangan vertikal, dan hal yang kedua ini terkait dengan ketidakseimbangan diharapkan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah dapat dilakukan dengan mudah oleh pemerintah daerah dan hanya berdampak pada masyarakat setempat.

Hal lainnya yang penting diperhatikan dalam penetapan pajak daerah adalah perlunya dihindari masalah-masalah yang timbul akibat penetapan suatu jenis pajak daerah oleh pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan masalah harmonisasi pemungutan pajak yang dilakukan antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi serta kompetisi pemungutan pajak antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.

Pajak daerah yang baik pada prinsipnya harus dapat memenuhi dua kriteria.⁷ Pertama pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup bagi daerah sesuai dengan derajat otonomi fiskal yang dimilikinya. Kedua, pajak daerah harus secara jelas berdampak pada tanggung jawab fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Cara yang mudah dan mungkin merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan ini adalah dengan membiarkan daerah untuk menetapkan jenis pajak daerahnya sendiri sekaligus tarifnya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di banyak negara berkembang, pemerintah-pemerintah daerah maupun unit-unit administratif memiliki kewenangan secara legal untuk membebaskan pajak, tetapi basis pengenaan pajak yang dimilikinya terlalu lemah serta mereka masih sangat

tergantungan terhadap subsidi-subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga kewenangan yang dimilikinya untuk membebaskan pajak tersebut seringkali tidak dapat dilakukan.

Selain pajak daerah, sumber penerimaan daerah lainnya yang menarik adalah penerimaan yang berasal dari retribusi. Pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah terkait dengan kemampuan administratif yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ada dua kriteria utama yang menjadi acuan dalam menilai kapasitas administratif yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengadministrasikan kedua pendapatan ini. Dua kriteria tersebut adalah :

1. Realisasi – perkiraan penerimaan yang secara potensial dapat diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah. Potensi pajak daerah dan retribusi daerah ini dibuat berdasarkan asumsi bahwa setiap orang atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah membayar sesuai dengan kewajibannya.
2. Biaya – akumulasi sumber daya yang harus dikorbankan terkait dengan upaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Kedua kriteria ini terkait dengan efisiensi dan efektifitas administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Jika sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak dapat diadministrasikan secara efektif atau efisien, perlu kiranya pemerintah daerah melakukan evaluasi atas pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah terpungut atau mencari alternatif-alternatif sumber penerimaan lainnya.

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah, pengadministrasian pendapatan ini diharapkan dapat memastikan setiap orang harus membayar pajak dan retribusi sesuai dengan jumlahnya serta seluruh pendapatan yang diperoleh diadministrasikan dengan baik oleh lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan sebagaimana mestinya. Untuk merealisasikannya, langkah yang harus ditempuh adalah :

1. Melakukan identifikasi yang akurat atas siapa yang harus menanggung atau membayar.
2. Melakukan penghitungan yang tepat.
3. Melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan.
4. Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi wajib pajak dan retribusi yang melanggar ketentuan.
5. Melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk memastikan agar pajak dan retribusi diadministrasikan dengan baik.

Untuk mewujudkan realisasi penerimaan yang optimal, administrator pendapatan daerah harus memperhatikan penghindaran yang dimungkinkan oleh wajib pajak daerah dan retribusi daerah, serta tindak penipuan dan kolusi yang mungkin timbul. Penghindaran oleh wajib pajak daerah dan retribusi daerah terjadi ketika seseorang atau badan yang seharusnya membayar pajak daerah dan retribusi daerah memiliki keinginan, atau bahkan sudah melakukannya, untuk menghindari pembayaran yang seharusnya dilakukan atau mereka membayar apa yang seharusnya dibayar tetapi jumlahnya tidak sesuai. Tindak penipuan dan kolusi terjadi ketika ada usaha dari wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang

bekerja sama dengan petugas pemungut untuk meminimalisir jumlah yang harus dibayarkan dengan beragam upaya yang pada akhirnya dapat mengurangi perolehan pendapatan daerah.

Sejumlah hal tentunya juga perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah disamping menempuh upaya-upaya tersebut diatas, seperti :

1. Potensi pendapatan atas pajak daerah dan retribusi daerah tertentu sangatlah kecil.
2. Penilai dan pemungut hanya terkait dengan satu jenis pajak daerah atau retribusi daerah tertentu.
3. Lokasi pemungutan atau pengumpulan hasil pajak daerah atau retribusi daerah tersebar.
4. Petugas pemungut harus mengunjungi wajib pajak daerah atau wajib retribusi daerah ke lokasi tertentu atau sebaliknya.
5. Setiap kebijakan konsekwen dalam penegakan Dasar hukum dan tarif sumber PAD kab sijunjung.

Peningkatan pendapatan melalui penerimaan pajak dan retribusi daerah, dalam penerapan dan pengelolaanya tidak boleh tanpa dasar hukum yang pasti, kepastian besaran pajak dan retribusi daerah harus diberlakukan sesuai dasar hukumnya, bagi pelanggar ketentuan hukum seharusnya dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengelolaan dan pemugutan pajak- retribusi daerah di Kabupaten Sijunjung belum menerapkan sanksi yang tegas.

Sependapat dengan uraian tersebut disampaikan Drs. AT Rohendi asisten administrasi, sosial dan Kesra yang juga mantan kepala DPKD semasa menjabat:

“ pengenaan sanksi terhadap wajib pajak dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan, Sejauh ini kita belum menerapkan pengenaan sanksi bagi wajib pajak dan masyarakat yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah, namun lebih kepada pendekatan persuasif Saja, hal ini guna menumbuhkan partisipasi “

(wawancara tanggal 17 April 2011)

Penguatan kekuasaan fiskal daerah melalui Perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, seperti perluasan basis Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Retribusi Izin gangguan. Menambah jenis pajak daerah, seperti Pajak Rokok, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP).

Retribusi baru bagi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan, Retribusi Izin usaha Perikanan.

Menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, seperti Pajak Bakar Kendaraan Bermotor Memberikan keleluasaan penetapan tarif pajak kepada provinsi (ditetapkan dengan Perda) kecuali Pajak Rokok sepanjang tidak melanggar tarif minimum dan maksimum yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Tarif minimum ditetapkan untuk objek pajak yang mudah bergerak (kendaraan bermotor) untuk menghindari perang tarif antar daerah.

Daerah didorong untuk mengoptimalkan pemungutan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak

menciptakan jenis pungutan baru yang potensinya relatif kecil dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Objek Pajak Kendaraan Bermotor termasuk kendaraan milik pemerintah, Objek Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Objek Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering (jasa boga).



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka didapatkan kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa **Pertama**, pengelolaan potensi dan penerapan strategi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, ditemukan masih banyaknya kendala di lapangan. **Kedua**, Setelah dianalisis ternyata ditemukan tiga penyebab belum optimalnya pengelolaan Potensi Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Beberapa faktor penyebabnya: 1) belum tersedianya data basis objek, potensi dan pemetaan Pajak, dan Retribusi Daerah, karenanya besaran pajak dan retribusi, proses pengenaanya belum berdasarkan data potensi yang seharusnya dapat terealisasi, 2) pengaruh Tiga sektor Aktivitas ekonomi wilayah memiliki pengaruh signifikan terbesar, sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor jasa, 3) Pengaruh kinerja Ekonomi yang mampu meningkatkan PDRB dan Pendapatan Asli Daerah. Jika Pajak dan retribusi tidak ditingkatkan melalui pemberdayaan pemberdayaan aktifitas perekonomian masyarakat maka Pajak dan retribusi akan merupakan pengalihan beban dari pemerintah kepada masyarakat dengan cara tidak adil, pada gilirannya mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat. **Ketiga**, Strategi dan kebijakan yang direkomendasi guna Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah 1. Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi 2. Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah,

Dengan demikian, dalam rangka optimalisasi kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk diambil beberapa tindakan dalam rangka merespon dan mengakomodasi realitas tersebut, 1. Untuk meningkatkan SDM pengelola PAD dalam hal ini DPKD Sijunjung dalam meningkatkan PAD haruslah merubah

akuntabilitas birokrasi. Dengan menerapkan pertanggung jawaban ganda kepada setiap pegawai, sehingga akan lahir inovasi dan kreativitas dalam meningkatkan PAD. Indikator pencapaian kinerja tidak hanya didasarkan kepada realisasi dari target PAD yang ditetapkan tetapi dengan menciptakan indikator lain misalnya bagaimana menciptakan kemandirian daerah dalam membiayai sendiri biaya aparatur sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban publik. Sehingga gaji atau biaya aparatur dapat dibiayai dari PAD bukan mengharapkan bantuan DAU atau DAK.

2. Perlu digagas investasi yang akan menciptakan sumber penerimaan pajak dan retribusi yang baru, seperti dengan memanfaatkan potensi pertambangan dan pertanian pendirian pabrik karet, pendirian pabrik tapioka, serta pengelolaan kawasan pariwisata Musiduga, Aie Angek di Kecamatan Sijunjung.

3., Mengkaji kembali ketentuan tarif pajak dan retribusi pada sejumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi perekonomian saat ini,

4. Perlu dibuat regulasi untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai melalui imbalan ekstrinsik berupa penghargaan kepada pegawai yang berprestasi baik dan hukuman bagi pegawai yang berprestasi buruk. Peningkatan peran pengawasan dari masing – masing atasan langsung pegawai dan perbaikan mode promosi dan jenjang karir dengan prinsip objektivitas dan berkeadilan.

Lemahnya kinerja birokrasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah disebabkan oleh Faktor Akuntabilitas, dan budaya kerja.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan SDM pengelola PAD dalam hal ini DPKD Sijunjung dalam meningkatkan PAD haruslah merubah kinerja birokrasi. Dengan menerapkan pertanggung jawaban ganda kepada setiap pegawai, sehingga

akan lahir inovasi dan kreativitas dalam meningkatkan PAD. Indikator pencapaian kinerja tidak hanya didasarkan kepada realisasi dari target PAD yang ditetapkan tetapi dengan menciptakan indikator lain misalnya bagaimana menciptakan kemandirian daerah dalam membiayai sendiri biaya aparaturnya sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban publik. Sehingga gaji atau biaya aparatur dapat dibiayai dari PAD bukan mengharapkan bantuan DAU atau DAK.

2. Perlu digagas investasi yang akan menciptakan sumber penerimaan pajak dan retribusi yang baru, seperti dengan memanfaatkan potensi pertambangan dan pertanian pendirian pabrik karet, pendirian pabrik tapioka, serta pengelolaan kawasan pariwisata Musiduga, Aie Angek di Kecamatan Sijunjung.
3. Mengkaji kembali ketentuan tarif pajak dan retribusi pada sejumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi perekonomian saat ini.
4. Perlu dibuat regulasi untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai melalui imbalan ekstrinsik berupa penghargaan kepada pegawai yang berprestasi baik dan hukuman bagi pegawai yang berprestasi buruk. Peningkatan peran pengawasan dari masing – masing atasan langsung pegawai dan perbaikan meode promosi dan jenjang karir dengan prinsip objektivitas dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Arnita, 2005, *Desentralisasi di Kabupaten Sijunjung*, dalam Suloh Vol. III, Fakultas Hukum Unimal Lhokseumawe
- Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional, Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Departemen Keuangan RI, 2005, *Evaluasi Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta.
- Bastian, Indra, 2001, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta
- Bharantika, B, Elita, 1999, "Klasifikasi Sumber-Sumber PAD yang Potensial untuk Dikembangkan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upaya Peningkatannya di Kabupaten Dati II Jayapura, *Tesis S-2*, Pascasarjana-UGM, Yogyakarta.
- 1997, "Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia", Gramedia, Jakarta
- Bratakusumah, Supriady dan Dadang, Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2008, *Penelitian Kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya*, Kencana, Jakarta
- Davey, K.K., 1998, *Pembiayaan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- 1988, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah ; Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- 1988. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: UI Press.
- 1998 *Pembiayaan Pemerintah Daerah-Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Penerjemah Amanullah dkk, UI Press, Jakarta
- Devas Nick, dkk., 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- . 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- ., 1998, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Edisi terjemahan, UI Press, Jakarta. Dirjen Bangda Depdagri. 2000. Laporan Akhir Kajian Profil Daerah Tingkat II Ditinjau dari Aspek Potensi Penerimaan Daerah. Yogyakarta. Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Erlangga Agustino Landiyanto, *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah; Studi Kasus Kota Surabaya*, Cures Working Paper 05/01, Januari 2005
- Handoko.T.Hani. 2000. *Manajemen Personalial dan Sumber Daya Manusia*. Edisi 2. Yogyakarta. BPFE.

- Hardjito, Dydiet. 1997. *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haritz, Benyamin, 1995, "Peran Administrasi Pemerintah Daerah : Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Se-Jawa Barat", *Prisma*, Majalah Kajian Ekonomi dan Ilmu Sosial, No. 4, 81-95.
- Hamrolie Harun, 2003, *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*, BPFE UGM, Yogyakarta
- Hidayat, Syarif, 2000, *Dilema Otonomi Daerah, Perluasan Wewenang Daerah vs Wewenang Elite Politik Daerah*, Jurnal Analisis CSIS Tahun XXIX/No. 1
- Insukindro, Mardiasmo, Widayat, W., Jaya, W.K., Purwanto, B.M., Halim, A., Suprianto, J., Purnomo, A.B., 1994, *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD*, Buku I, KKD FE UGM, Yogyakarta.
- Josef Riwu Kaho, 1991, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia :Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Rajawali Press, Jakarta
- _____. 1998, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- _____. 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Gratondo, Cetakan Keempat, Jakarta.
- Machfud Sidik, 2002, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Orasi Ilmiah dengan tema "Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah", Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung, 10 April 2002
- Mardiasmo dan Makhfatih, Ahmad.,2000, "Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang", *Laporan Akhir*, Kerjasama Pemerintah Daerah Magelang dengan PAU-SE UGM, Yogyakarta.
- _____. 2001, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.
- Munawir, 2000, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Zaenuddin, dalam Batam Pos, *Strategi Peningkatan PAD*, Selasa 20 November 2007
- _____. 1998, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.
- Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999*, Sinar Grafika, Jakarta.

- _____, 2000, *Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____, 1998, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Rochmat Soemitro, 1992, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.
- .Said Mas'ud, 2005, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, UMM Pres, Malang
- Saragih, J. Panglima, 1996, "Peningkatan Penerimaan Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan", *Majalah Perencanaan Pembangunan*, No.6, 36-40
- Sarpuddin HA, 2009, *Untuk Kabupaten Sijunjung Lebih Baik : Ide, kerja dan harapan Ahmad Farhan Hamid*, Kita Buku, Jakarta
- Shaleh, 2008, *Lhokseumawe ditangan Munir, Apa yang berubah ?* dalam tabloid Modus Kabupaten Sijunjung, Minggu II November 2008
- Sinambela, Mahadi & Azhari, 2003, *Dilema Otonomi Daerah dan Masa Depan Nasionalisme Indonesia*, Balairung&co, Yogyakarta
- Sumyar, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Suparmoko, 2000, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Edisi 5, BPFE, Yogyakarta.
- Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat, 2004, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Refika Aditama, Bandung.
- Tempo Interaktif*, Pemerintah Batalkan 448 Perda Bermasalah, Edisi Jum'at 29 April 2005
- Wahab, Solochin, Abdul, 1997, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Waroy, Nicholas, 1997, *Analisis Potensi Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Berkaitan dengan Otonomisasi Daerah Tingkat II Sorong*, Tesis S-2, Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Widayat, Wahyu, 1994, "Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, STIE YKPN, XXI/No.3, 28-34.

Lampiran 1 : Perhitungan potensi penerimaan PAD Kabupaten Sijunjung

A. Pajak daerah

1. Pajak hotel dan penginapan

Metode 1 :

a. Trend linear

Hasil perhitungan : Rp 164.084.302,- (lihat lampiran 3 tabel 1)

Asumsi : besar potensi penerimaan pajak hotel dan penginapan tahun yang akan datang mengikuti garis kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara linear.

b. Trend non linear.

Hasil perhitungan : Rp 231.092.079,- (lihat lampiran 3 tabel 2)

Asumsi : besar potensi penerimaan pajak hotel dan penginapan tahun yang akan datang mengikuti garis kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara non linear

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 85.521.317,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan pajak hotel dan penginapan tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

2. Pajak Hiburan

Metode 1 :

a. Trend linear

Hasil perhitungan : Rp 9.141.413,- (lihat lampiran 3 tabel 1)

Asumsi : besar potensi penerimaan pajak hiburan tahun yang akan datang mengikuti garis kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Linear

b. Trend non linear.

Hasil perhitungan : Rp 13.571.578,- (lihat lampiran 3 tabel 2)

Asumsi : besar potensi penerimaan pajak hiburan tahun yang akan datang mengikuti garis kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Non Linear

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp594.099,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan pajak hiburan tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

3/ Pajak Reklame

Metode 1 :

a. Trend linear

Hasil perhitungan : Rp 173.225.715,- (lihat lampiran 3 tabel 1)

Asumsi : besar potensi penerimaan pajak reklame tahun yang akan datang mengikuti garis kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Linear.

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp26.410.732,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan pajak reklame tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

4. Pajak Penerangan Jalan

Metode 1 :

a. Trend linear

Hasil perhitungan : Rp 783.269.071,- (lihat lampiran 3 tabel 1)

Asumsi : besar potensi penerimaan pajak penerangan jalan tahun yang akan datang mengikuti garis kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Linear.

b. Trend non linear.

Hasil perhitungan : Rp 1.079.703.062,- (lihat lampiran 3 tabel 2)

Asumsi : besar potensi penerimaan pajak penerangan jalan tahun yang akan datang mengikuti garis kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Non Linear

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp346.792.696,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan pajak penerangan jalan tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

4. Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Galian C

Metode 1 :

a. Trend linear

Hasil perhitungan : Rp 787.719.449,- (lihat lampiran 3 tabel 1)

Asumsi : besar potensi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan galian C tahun yang akan datang mengikuti garis kecendrungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Linear.

b. Trend non linear.

Hasil perhitungan : Rp 1.026.174.670,- (lihat lampiran 3 tabel 2)

Asumsi : besar potensi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan galian C tahun yang akan datang mengikuti garis kecendrungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Non linear

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp302.073.958,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan galian C tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

5. Pajak Sarang Burung Walet

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp103.116.667,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan pajak sarang burung walet tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

B. Retribusi Daerah

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Metode 1 :

a. Trend linear

Hasil perhitungan : Rp 396.064226,- (lihat lampiran 3 tabel 1)

Asumsi : besar potensi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan tahun yang akan datang mengikuti garis kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Linear

b..Trend non linear.

Hasil prhitungan : Rp 3.016.036,- (lihat lampiran 3 tabel 2)

Asumsi : besar potensi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan tahun yang akan datang mengikut kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Non-Linear

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp245.706.233,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

1. Asumsi : besar potensi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Metode 1 :

a. Trend linear

Hasil perhitungan : Rp 8.062.533,- (lihat lampiran 3 tabel 1)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/

Kebersihan tahun yang akan datang mengikuti garis kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Linear.

b..Trend non linear.

Hasil prhitungan : Rp 3.016.036,- (lihat lampiran 3 tabel 2)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan tahun yang akan datang mengikut kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Non-Linear

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp3.479.479,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP/ Akte Capil

Metode 1 :

a. Trend linear

Hasil perhitungan : Rp 38.817.160,- (lihat lampiran 3 tabel 1)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP/ Akte Capil tahun yang akan datang mengikuti garis kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Linear.

b..Trend non linear.

Hasil prhitungan : Rp 60.874.560,- (lihat lampiran 3 tabel 2)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP/ Akte Capil tahun akan datang mengikut kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Non-Linear

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 21.568.120,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP/ Akte Capil tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

4. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Metode 1 :

a. Trend linear

Hasil perhitungan : Rp 8.436.500,- (lihat lampiran 3 tabel 1)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum tahun yang akan datang mengikuti garis kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Linear.

b.. Trend non linear.

Hasil perhitungan : Rp 2.146.000,- (lihat lampiran 3 tabel 2)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan

Umum tahun yang akan datang mengikut kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Non-Linear

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 4.889.833,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 53.092.356,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Izin Gangguan tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

16. Retribusi Izin Trayek

Metode 1 :

a. Trend linear

Hasil perhitungan : Rp 7.349.000,- (lihat lampiran 3 tabel 1)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Izin Trayek tahun yang akan datang mengikuti garis kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Linear.

b. Trend non linear.

Hasil perhitungan : Rp 7.964.000,- (lihat lampiran 3 tabel 2)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Izin Trayek tahun yang akan datang mengikuti kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Non-Linear

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 3.094.000,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Izin Trayek tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

17. Retribusi Izin Usaha Industri Dan Perdagangan

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 1.730.000,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Izin Usaha Industri Dan Perdagangan tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

18. Retribusi Izin Usaha Pertambangan Dan Energi

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 5.742.000,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Izin Usaha Pertambangan Dan Energi tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

19. Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 9.799.000,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

20. Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Hotel Dan Restoran

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 450.000,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Hotel Dan Restoran tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

21. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 0,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

5. Retribusi Pasar

Metode 1 :

a. Trend linear

Hasil perhitungan : Rp 253.108.004,- (lihat lampiran 3 tabel 1)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Pasar tahun yang akan datang mengikuti garis kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Linear.

b..Trend non linear.

Hasil perhitungan : Rp 276.414.566,- (lihat lampiran 3 tabel

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi pasar tahun yang akan datang mengikuti kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Non-Linear

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 147.879.367,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Pasar tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Metode 1 :

a. Trend linear

Hasil perhitungan : Rp 110.989.217,- (lihat lampiran 3 tabel 1)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun yang akan datang mengikuti garis kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Linear.

b..Trend non linear.

Hasil perhitungan : Rp 61.818.278,- (lihat lampiran 3 tabel 2)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun yang akan datang mengikuti kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Non-Linear

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 47.262.769,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

Metode 1 :

a. Trend linear

Hasil perhitungan : Rp 188.339.472,- (lihat lampiran 3 tabel 1)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Pasar Grosir Dan Atau

Pertokoan tahun yang akan datang mengikuti garis kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Linear.

b. Trend non linear.

Hasil perhitungan : Rp 187.171.519,- (lihat lampiran 3 tabel 2)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Pasar Grosir Dan Atau

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 71.434.863,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

8. Retribusi Terminal

Metode 1 :

a. Trend linear

Hasil perhitungan : Rp 491.121.651,- (lihat lampiran 3 tabel 1)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Terminal tahun yang akan datang mengikuti garis kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Linear.

b. Trend non linear.

Hasil perhitungan : Rp 903.752.006,- (lihat lampiran 3 tabel 2)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Terminal tahun yang akan datang mengikuti kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Non-Linear

10. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 5.770.031,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 337.989.541,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

2. Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Terminal tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

11. Retribusi Penyedotan Kakus

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 1.091.667,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Penyedotan Kakus tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

12. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 506.250,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

13 Retribusi Rumah Potong

Metode 1 :

a. Trend linear

Hasil perhitungan : Rp 11.065.015,- (lihat lampiran 3 tabel 1)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Rumah Potong tahun yang akan datang mengikuti garis kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Linear.

b. Trend non linear.

Hasil perhitungan : Rp 46.207.298,- (lihat lampiran 3 tabel 2)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Rumah Potong tahun yang akan datang mengikut kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Non-Linear

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 21.973.928,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Rumah Potong tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

14. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Metode 1 :

a. Trend linear

Hasil perhitungan : Rp 83.184.451,- (lihat lampiran 3 tabel 1)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun yang akan datang mengikuti garis kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Linear.

b. Trend non linear.

Hasil perhitungan : Rp 22.419.116,- (lihat lampiran 3 tabel 2)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun yang akan datang mengikuti kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Non-Linear

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 59.741.494,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

15. Retribusi Izin Gangguan

Metode 1 :

a. Trend linear

Hasil perhitungan : Rp 137.923.561,- (lihat lampiran 3 tabel 1)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Izin Gangguan tahun yang akan datang mengikuti garis kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Linear.

b. Trend non linear.

Hasil perhitungan : Rp 133.281.931,- (lihat lampiran 3 tabel 2)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Izin Gangguan tahun yang akan datang mengikuti kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Non-Linear

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 53.092.356,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Izin Gangguan tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

16. Retribusi Izin Trayek

Metode 1 :

a. Trend linear

Hasil perhitungan : Rp 7.349.000,- (lihat lampiran 3 tabel 1)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Izin Trayek tahun yang akan datang mengikuti garis kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Linear.

b. Trend non linear.

Hasil perhitungan : Rp 7.964.000,- (lihat lampiran 3 tabel 2)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Izin Trayek tahun yang akan datang mengikuti kecenderungan penerimaan dari periode sebelumnya secara Non-Linear

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 3.094.000,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Izin Trayek tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

17. Retribusi Izin Usaha Industri Dan Perdagangan

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 1.730.000,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Izin Usaha Industri Dan Perdagangan tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

18. Retribusi Izin Usaha Pertambangan Dan Energi

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 5.742.000,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Izin Usaha Pertambangan Dan Energi tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

19. Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 9.799.000,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

20. Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Hotel Dan Restoran

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 450.000,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Hotel Dan Restoran tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

21. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Metode 2 :

Hasil perhitungan : Rp 0,- (lihat lampiran 3 tabel 3)

Asumsi : besar potensi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun yang akan datang sama dengan rata-rata dari penerimaan periode sebelumnya.

LAMPIRAN 2 : Panduan Wawancara :

- I. Mencari Penyebab belum tergarapnya Potensi optimal besaran penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan faktor kendala; anyadi Kabupaten Sijunjung.

A. Untuk Birokrat

No.	Pertanyaan	Responden
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam mengelola dan meningkatkan PAD kepada siapa Bpk/ Ibu bertanggungjawab ? 2. Bagaimana Model atau Metode Pertanggungjawaban tersebut ? 3. Apa yang dijadikan indikator dalam pertanggungjawaban tersebut ? 4. Menurut Bpk/Ibu apakah Otonomi mempengaruhi peningkatan PAD ? 5. Menurut Bpk/Ibu berapa persentase PAD yang layak dari Total PAD dalam menetapkan target penerimaan setiap tahunnya.? 	Kadis DPKD, Sekretaris DPKD, Kabid Pendapatan
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tingkat kedisiplinan pegawai dalam bekerja ? 2. Bagaimana sistem pemberian insentif atau TPK ? 3. Bagaimana Sistem Promosi dilaksanakan ? 4. Bagaimana dengan kesempatan diklat diberikan ? 	Kadis DPKD/Sekretaris, Kabid dan Staf DPKD.

1. Apakah yang dimaksud dengan potensi pajak dan retribusi Daerah ? apakah target yang ditetapkan Pemda yang dinamakan potensi Pajak dan retribusi daerah ?
2. Dalam konteks pungutan pajak dan retribusi daerah, siapakah yang sebenarnya harus berperan guna meningkatkan penerimaan ?
3. Upaya apa saja yang perlu dilakukan oleh Pemda dalam meningkatkan Pajak dan Retribusi Daerah
4. Dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah sudah dilakukan pengawasan, menurut bapak bagaimanakah tingkat efektifitasnya dalam rangka peningkatan penerimaan ?
5. Bagaimanakah penerimaan dan upaya pemugutan pajak dan retribusi daerah di Kab Sijunjung, dan permasalahan apa saja yang terjadi dalam proses pemungutan ?
6. Bagaimana Pemda dalam hal ini DPKD menentukan target penerimaan pajak dan retribusi daerah selama ini ?
7. Menurut bapak berapa macam/jenis pajak dan retribusi daerah ? berapa besaran potensi sesungguhnya dari /jenis pajak dan retribusi daerah ?

8. Apakah data mengenai potensi pajak dan retribusi daerah sudah mencerminkan keadaan potensi optimal pajak dan retribusi daerah yang sebenarnya ?
9. Langkah langkah apa saja yang dilakukan pemda/DPKD dalam hal meningkatkan potensi pajak dan retribusi daerah / dan apa saja permasalahan yang terjadi yang menyebabkan tidak terrealisasinya penerimaan pajak dan retribusi daerah secara optimal ?
10. Bagaimanakah cara pemda/DPKD mengatasi Potential loss dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah ? dan apa pengaruhnya terhadap perencanaan penerimaan ?
11. Bagaimakah upaya pemda /DPKD melakukan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah ? dan bagaimana pula upaya pendataan objek pajak dan retribusi daerah dalam rangka kontiyuitas pemutakhiran data di kab sijunjung ?
12. Bagaimana upaya yg dilakukan pemda/DPKD terhadap wajib pajak dan retribusi daerah yang tidak melaporkan objek pajak dan retribusi daerah, dan / atau tidak melaporkan data objek pajak dan retribusi daerah yang sebenarnya ?
13. Bagaimana upaya penagihan yang dilakukan pemda/DPKD dalam rangka memaksimalkan potensi pajak dan retribusi daerah di kab sjunjung ?
14. Bagaimanakah upaya pemeriksaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan pemda/DPKD dalam hal jumlah wajib pajak dan retribusi daerah ? dan upaya monev objek pajak dan retribusi daerah ?
15. Menurut bapak bagaimana perkembangan penerimaan pajak dan retribusi daerah dari tahun ke tahun di kab sijunjung ?
16. Menurut bapak bagaimanakah cara menentukan besaran pajak dan retribusi daerah pada wajib pajak dan retribusi daerah ?
17. Masalah apa saja yang terjadi dalam penetapan besaran pajak dan retribusi daerah pada wajib pajak dan retribusi daerah ?
18. Upaya apa saja yang telah dilakukan pemda/DPKD dalam mengatasi masalah keberatan wajib pajak dan retribusi daerah atas penetapan yang dilakukan?
19. Bagaimana potensi penerimaan dan berapa besar potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah ?
20. Bagaimana upaya pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan pemda/DPKD melalui ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah ? dan permasalahan apa saja yang terjadi selama ini dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan ekstensifikasi ?
21. Upaya apa saja yang dilakukan pemda/DPKD dalam rangka peningkatan potensi pajak dan retribusi daerah melalui ekstensifikasi ?
22. Langkah langkah ekstensifikasi apa saja yang dilakukan pemda/DPKD dalam upaya peningkatan potensi pajak dan retribusi daerah ?
23. Langkah langkah intensifikasi apa saja yang dilakuan pemda/DPKD dalam upaya peningkatan potensi pajak dan retribusi daerah?
24. Dalam rangka memaksimalkan potensi pajak dan retribusi daerah yang ada, salah satu langkah yang diambil adalah dengan melakukan pendataan ulang subjek pajak dan retribusi daerah, dan melakukan pendataan ulang objek yang ada, apa saja langkah langkah pendataan tsb di kab sijunjung ?
25. Permasalahan apa saja yang terjadi dalam pendataan subjek dan objek pajak /retribusi daerah ?

26. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, juga berdampak pada meningkatnya perumahan, mendirikan bangunan oleh wajib pajak dan retribusi daerah. bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah di kab sijunjung dalam melaporkan perubahan objek pajaknya ?
27. Apakah permasalahan yang sering terjadi yang mengakibatkan tidak optimalnya proses pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah?
28. Berapa besar prosentase adanya non filling atau tidak terdatanya objek dan subjek pajak /retribusi daerah ?
29. Berapa besar prosentase adanya perubahan objek pajak dan retribusi daerah di kab sijunjung yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak dan retribusi daerah dan belum terdata di kantor pajak/DPKD ?
30. Apakah ada upaya pendataan yang dilakukan pemda untuk mendata perubahan objek pajak, atau adanya pemecahan objek pajak dan retribusi daerah di lingkungan ini pak ?
31. Bisanaya pendataan dan pemutakhiran objek pajak dan retribusi daerah di wilayah bapak dilakukan oleh aparat Nagari atau langsung petugas pemda pak ?
32. Kalau pendataan oleh petugas belum berjalan dengan baik, apakah perubahan objek dan subjek pajak/retribusi daerah milik masyarakat ada dilaporkan sendiri dengan kesadaran ?
33. Menurut bapak kinerja aparat petugas pemungut pajak dan retribusi daerah di sini masih kurang ya pak ?

Panduan Wawancara :

- I. Mencari Penyebab belum tergarapnya Potensi optimal besaran penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sijunjung.

B. Untuk Anggota dewan

No.	Pertanyaan	Responden
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang pertanggung jawaban pengelolaan PAD pada DPKD Kab. Sijunjung ? 2. Menurut Bpk/Ibu apakah Otonomi Daerah mempengaruhi peningkatan PAD ? 	Lsm, Pengamat
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Bapak/Ibu apakah pegawai DPKD telah bekerja dengan baik ? 2. Bagaimana menurut Bpk/Ibu tingkat kedisiplinan atau etos kerja pegawai DPKD saat ini ? 	Lsm. Pengamat

Panduan Wawancara :

- II. Faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sijunjung.

A. Untuk Birokrat

B.

No.	Operasional	Pertanyaan	Responden
1.	Akuntabilitas	1. Menurut Bpk/Ibu strategi apakah yang ditempuh dalam meningkatkan PAD ? 2. Menurut Bpk/Ibu apakah strategi tsb cocok diterapkan dalam konteks Otonomi Daerah sekarang ?	Kadis DPKD/Sekretaris, Kabid PAD
2.	Budaya Organisasi	1. Menurut Bpk/Ibu strategi apakah yang ditempuh dalam meningkatkan kinerja pegawai/staff ? 2. Menurut Bpk/Ibu apakah strategi tsb cocok diterapkan dalam Kab.Sijunjung	Kadis DPKD/Sekretaris, Kabid PAD

Panduan Wawancara :

- III. Strategi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sijunjung.

A. Untuk Birokrat

No.	Operasional	Pertanyaan	Responden
1.	Akuntabilitas	3. Menurut Bpk/Ibu strategi apakah yang ditempuh dalam meningkatkan PAD ? 4. Menurut Bpk/Ibu apakah strategi tsb cocok diterapkan dalam konteks Otonomi Daerah sekarang ?	Kadis DPKD/Sekretaris, Kabid PAD
2.	Budaya Organisasi	3. Menurut Bpk/Ibu strategi apakah yang ditempuh dalam meningkatkan kinerja pegawai/staff ? 4. Menurut Bpk/Ibu apakah strategi tsb cocok diterapkan	Kadis DPKD/Sekretaris, Kabid PAD

		dalam konteks Otonomi Daerah sekarang ?	
--	--	---	--

DAFTAR INFORMAN

- | No. | Jabatan |
|-----|------------------|
| 1. | Asisten I |
| 2. | Asisten III |
| 3. | Kadis DPKD |
| 4. | Sekretaris |
| 5. | Kabid. PAD |
| 6. | Kabid Anggaran |
| 7. | Kasi Pengelolaan |
| 8. | Pajak |
| 9. | Kasi Perencanaan |
| 10. | Ka.Ktr.Perizinan |
| 11. | Ka.Satpol PP |
| 12. | Ka.BPMN |
| 13. | Camat |
| 14. | Camat |
| 15. | Anggota DPRD |



Lampiran 3 : Rekapitulasi potensi Pos Pajak dan Retribusi

No	URAIAN	PEMILIK	ALAMAT	KETETAPAN/ BULAN	KET
1	2	3	4	5	6
	PAJAK RESTORAN/ RUMAH MAKAN				
I	Kecamatan Km Baru				
1	Rm Randi	Asmawati	Bt Kering	20,000	
2	Rm Kartini	Efendi Syam	Bt Kering	20,000	
3	Rm Gunung Merah	Ismet	Bt Kering	20,000	
4	Rm Rizal	Rizal	Bt Kering	10,000	
5	Rm Nella	Yusna	Kamang	15,000	
6	Rm Mutiara	Yusni	Bt Kering	20,000	
7	Rm Sederhana	Yusnimar	Bt Kering	10,000	
8	Martabak Mesir	Yunimar	Kil Jao	15,000	
9	Rm Cudi	Cudi	Bt Kering	20,000	
10	Rm Setia Utama	Thomas	Prt Rantang	25,000	
11	Rm Keluarga	Ismet	Takung	40,000	
12	Rm Sanutra	Nurdin	Kil Jao	25,000	
13	Rm RHS	Darno Polis	Kil Jao	50,000	
14	Rm Uniang	Nurlaili	Kil Jao	20,000	
15	Rm Sp 3 Raya	Hj Wirda Munir	Kil Jao	45,000	
16	Rm Suka Rami	Mardanus	Kil Jao	15,000	
17	Rm Sido Dadi	Suhardi	Kil Jao	40,000	
18	Rm Arena Baru	Firdaus	Kil Jao	25,000	
19	Rm Roda Baru	Nurhayati	Kil Jao	5,000	
20	Rm Roda Baru I	Aswandi	Kil Jao	10,000	
21	Rm EDI	Edi	Sei Tambang	20,000	
22	Rm Udo	Edi	Sei Tambang	50,000	
23	Rm saiyo Juo	Dt Saiyo	Kil Jao	10,000	
24	Wr Sate Pr Tanjuang	Murlinawati	Kil Jao	15,000	
25	Wr Martabak Mesir	Jal	Kil Jao	30,000	
26	Rm Ampere Kita	Nuriah	Kil Jao	10,000	
27	Rm Famili Kita	Syafrol	Kil Jao	20,000	
28	Rm Pondok Indah	Yul Asri	Sei Lansek	20,000	
29	Rm Linda	Lismawati	Sei Lansek	15,000	
30	Rm Mana Lagi	Syafrial	Sei Lansek	10,000	
31	Wr Nasi Ani	Ani	Km Baru	10,000	
32	Wr Nasi	Maryalis	Bt Kering	10,000	
33	Rm Keluarga	Har	Km Baru	20,000	
34	Rm Salero Muaro		Takung	20,000	
35	Wr Sate Ujang	Risman	Kil Jao	30,000	
36	Rm Pondok Berangin	Nasution	Kamang	15,000	
37	RM Simpang Raya	Aplis	Kamang	20,000	
38	RM Azizah	Indra	Kamang	10,000	
39	RM Niky Sae	Sap	Kil Jao	20,000	
40	RM Dinda	Asmaida	Sei Lansrk	20,000	
41	RM Madina		Takung	15,000	
	Jumlah			840,000	

1	2	3	4	5	6
II	Kec. Tj Gadang				
1	Kedai Minuman	Erman	Sibisir	5,000	
2	RM Ayah	Alisar	Sibisir	15,000	
3	Kedai Minuman	Emi/Ita	Sibisir	10,000	
4	Kedai Minuman	Yanti/Cap	Sibisir	10,000	
5	Rm Amak	Sanibar	Sibisir	10,000	
6	RM Eva	Eva	Sibisir	10,000	
7	RM Sejiwa	Yanti	Sibisir	10,000	
8	RM 6000 Kanyang	H.Rusdi	Sibisir	10,000	
9	RM Panorama	Nurhida	Panorama	10,000	
10	RM Ikan Bakar	Siliatina	Koto Sinyamu	10,000	
11	RM Simpang Jaya	Rika Susanti	Sibisir	75,000	
12	RM Gumarang Baru	Syafri.M	Psr Tj Gadang	10,000	
13	RM Danau Kembar	Eti	Gg Nenas	10,000	
14	RM Warkop	Yunita	Gg Nenas	15,000	
15	RM Kota baru	Abasri	Gg Nenas	10,000	
16	Kedai Minuman	Darmawilis	Gg Nenas	10,000	
17	RM Ayam Kampung	Ani	Gg Nenas	10,000	
18	RM Sudi Mampir	Syahnimar	Pandam	10,000	
19	Rm Famili I	Wita	Gg Nenas	15,000	
20	Rm Hendry	Hen	Sibisir	10,000	
21	RM Boy	Boy	Sibisir	20,000	
22	RM Gumarang Baru	Jusmini	Panorama	10,000	
23	Rm Famili I	Wita	Pandam	15,000	
24	RM Muaro Betung	Eldarita	Pandam	10,000	
25	RM Cici	Dedi/Anisar	Ma Batuang	10,000	
26	Rm Cahaya Baru	Jasmir	Tj. Gadang	15,000	
27	Rm Rahma Sari	Sien	Pandam	10,000	
28	Rm Gantini Baru	Yulpa	Tj. Gadang	10,000	
29	Rm Pesisir Indah	Eti	Tj. Gadang	10,000	
30	Kedai minuman	Yusmaisar	Panorama	10,000	
31	Kedai minuman	Darmawilis	Tj. Gadang	10,000	
	Jumlah			405,000	
III	Kec. Sijunjung				
1	Rm Mega Hex	Nasril	Muaro Lingge	15,000	
2	Rm. Kilo Tujuh	Sitam	Kilo Tujuh	20,000	
3	Rumah Makan	Eris	Tnh. Bedantung	15,000	
4	Rm. Gunung Medan	Ib. Bdr Hitam	Ps. Sijunjung	30,000	
5	Rumah Makan	Syaflis	Ps. Sijunjung	10,000	
6	Warung Bakso	Simar	Ps. Sijunjung	10,000	
7	Rm. Apuak	Apuak	Ps. Sijunjung	20,000	
8	Warung Sate	Asyulizar	Ps. Sijunjung	10,000	
9	Sate Ma Kalaban	Resy	Muaro	10,000	
10	Rm. Samba Lado	Saf	Muaro	30,000	
11	Rumah Makan	Ajo Nurin	Muaro	20,000	
12	Rm Lela	Lela	Muaro	15,000	
13	Rumah Makan	Silas	Muaro	50,000	
14	Rm. Keluarga I	Safuruddin	Muaro	15,000	
15	Rm. Keluarga	Yus	Muaro	60,000	
16	Rm. Mawi	Mawi	Muaro	30,000	
17	Wr. Sate Sederhana	Ajo Mur	Muaro	10,000	

18	Warung Minuman	Refi/Supik	Ps. Sijunjung	10,000	
19	Warung Minuman	Rita	Sp. Keluarga	10,000	
20	Warung Minuman	Tholib	Muaro Gambok	15,000	
21	Warung Minuman	Ajo Zakirman	Polres	10,000	
22	Rm Baselo	Rika Susanti	Muaro	30,000	
23	Rm Gulai Kambing	Eri	Muaro	30,000	
24	Warung Minuman	Upik Surip	Muaro Gambok	5,000	
25	Warung Minuman	Sumiati	Pulau Berambai	15,000	
26	Warung Minuman	Candra	Pulau Berambai	10,000	
27	Warung Soto Tinar	Tinar	Ps. Jumat	10,000	
28	Rm Minang Maimbau	Ni Mur	Ps. Jumat	15,000	
29	Kantin Pemda	Nita	Muaro	60,000	
30	Warung Minuman	Ijin	Sp. Logas	15,000	
31	Cave Ridho	Ridho	Sp. Pangeran	25,000	
32	Warung Minuman	Mbak Dewi	Polres	15,000	
33	Warung Minuman	Mudarnis/Saini	Muaro	10,000	
34	Rm Am	Amrizal	Ps Sijunjung	15,000	
35	Rm Cinta Rasa	Anas	Muaro	15,000	
36	Bofet Bakso Tenis	Tono	Plu Berambai	10,000	
37	Kedai minuman Agung	Yul	Dp Rmh Kapolres	10,000	
38	Rm Ni Eti	Eti	Dp Puskesmas	15,000	
39	Rm It	Iit	Sp SMU 1 Muaro	5,000	
40	Rm Langkitang		Spng Telkom	30,000	
41	Sate Madura		Muaro	25,000	
42	Martabak Mesir		Muaro	20,000	
43	Bakso Mbak Lastri	Lastri	Muaro	20,000	
44	Rm Gulai Bawuang	Syafri/Piri	Ps Sijunjung	15,000	
45	Sup Ibu	Ira	Tn Badantung	10,000	
46	Nasi Goreng Petai	EDI	Selasah Indah	10,000	
	Jumlah			855,000	
IV	Kec. IV Nagari				
1	Rm. Utari	Firmando	Palangki	15,000	
2	Rumah Makan	Upik Dawa	Simp. Ma. Bodi	5,000	
3	Rumah Makan	Si Dang	Simp. Ma. Bodi	5,000	
4	Rumah Makan	Diki	Simp. Ma. Bodi	5,000	
5	Rm Sabar Menanti	Gustuana	Simp. Ma. Bodi	5,000	
6	Rm Mata air	Ermawati	Palangki	10,000	
7	Rm Al Azah	Zuma Daini	Palangki	5,000	
8	Nasi Sup	Ajo	Simp. Ma. Bodi	15,000	
9	Kedai Sate	Siwan	Palangki	10,000	
	Jumlah			75,000	
V	Kec. Koto VII				
1	Rumah Makan	Maju Arif	Tj. Ampalu	15,000	
2	Rm. Famili	Syawirman	Tj. Ampalu	20,000	
3	Rm. Tanjung Jaya	Agustar	Tj. Ampalu	15,000	
4	Warung MM	Masna	Tj. Ampalu	7,500	
5	Rumah Makan Ombilin	Syofian	Tj. Ampalu	20,000	
6	Rumah Makan	Marjenis	Tj. Ampalu	25,000	
7	Rm Kurnia Jaya	Zaiwarti	Tj. Ampalu	10,000	
8	Warung Sate	Ade Mura (Ajo)	Tj. Ampalu	10,000	

9	Warung Minuman	Mimi Rosita	Tj. Ampalu	12,000	
10	Rm.Maseawa Indah	Neni	Tj. Ampalu	12,500	
11	Rm.Dendeng Batokok	Chun Stanza	Psr. Gambok	30,000	
	Jumlah			177,000	
VI	Kec. Kupitan				
1	Rm. Ampera EVA I	Eva	Sip. Simancung	15,000	
2	Wr nasi Maidrawati	Maidrawati	Pdg. Sibusuk	15,000	
3	Wr nasi Upik	Upik	Pdg. Sibusuk	15,000	
4	Wr nasi Andi	Andi	Pdg. Sibusuk	15,000	
5	Wr nasi Darni	Darni	Pdg. Sibusuk	15,000	
6	Wr nasi Orpan	Orpan	Pdg. Sibusuk	15,000	
7	Cave Ririn	Efo Marita	Pdg. Sibusuk	25,000	
8	Wr nasi Goreng El	El	Pdg. Sibusuk	15,000	
9	Bakso Sugeng	Sugeng	Kupitan	10,000	
10	Bakso Agus	Agus	Kupitan	10,000	
11	Wr. Nasi Samsu	Samsu	Kupitan	15,000	
12	Wr. Nasi Anis	Anis	Kupitan	15,000	
	Jumlah			180,000	
	PAJAK HOTEL				
	PENGINAPAN / HOTEL				
1	Pink Hotel	E.Sugito	Kil Jao	150,000	
2	Peng Debby	Lisnawati	Sei Lansek	50,000	
3	Hotel Nabilla Transit	Hendra	Prt Rantang	50,000	
4	Hotel Yulia	Bakri. A	Prt Rantang	50,000	
	Jumlah			300,000	
5	Sahid Bkt Gadang	Pemda	Muaro	200,000	
6	Wisma Angrek	SyarifUddin	Muaro	50,000	
7	Peng. Muaro Indah	Afrida, Sy	Muaro	50,000	
8	Wisma Mentari	Ekizai Efendi	Muaro	50,000	
	Jumlah			350,000	
				650,000	
	PAJAK HIBURAN				
1	Telabang Sakti	Anisa	Kamang Baru		
	PAJAK SARANG BURUNG WALET				
1	Primkopol		Muaro		
	PAJAK PENERANGAN JALAN / PPJ				
1	PPJ PT.PLN Cabang Solok		Solok		
2	PPJ PT.PLN Ranting Silungkang		Silungkang		
3	PPJ PT.PLN Ranting Sijunjung		Sijunjung		
4	PPJ PT.PLN Ranting Sitiung		Sitiung		
	PAJAK REKLAME				
1	Kontraktor	Firdaus	Limo Koto		
2	Dagang Harian & Penegecer BBM	H.Arif Tamar	Nagari Palaluar		
3	RMU	H.Arif Tamar	Nagari Palaluar		
4	Dagang Harian & Penegecer BBM	Jalinar	Limo Koto		
5	Dagang Harian	samijon	Limo Koto		

6	Industri Perabot	Arham Can	Palangki	
7	Dagang Bahan Bangunan	Duski TS	Tapien Diaro SJJ	
8	Dagang Harian& Kodai Minuman	Zulkenedi	Selasa Indah	
9	Warung Nasi	Amrizono	Psr. Sijunjung	
10	IMB PT. Bina Maint/Sari Ipuh Permai	Eni Widayati	Perumnas P. Bogor	
11	Perdag Eceran brg. Harian	Ismail	Tj. Gadang	
12	Peternakan Ayam Potong	Birdius	Sei. Lansek	
13	Industri Perabot	Zulhendri	Pd. Laweh	
14	Dagang Karet	Yulianas	Limo Koto	
15	Reparasi & Perawatan Sepeda motor	Zulha Indra	Nag. Guguk	
16	Warinet	Rini Sambra Spd	Palangki	
17	Dagang Ternak	Yusman I. Parmato	IV Nagari	
18	Kontraktor	Sarpendi	M. Gambok	
19	Dagang Harian & Penegecer BBM	Darman	Aia Angek	
20	Dagang Harian & Penegecer BBM	Asrial	Aia Angek	
21	Depot Air Minum	Syafrandi	Psr. Jum'at	
22	Depot Air Minum	Dondra Perdana	Tj. Gadang	
23	Depot Air Minum	Mulyadi	Ma. Takung	
24	Bengkel Sepeda Motor & onderdil	Hendri	Tj. Bonai Aur	
25	RMU	Bujiang Warman	Limo Koto	
26	Dagang Harian & Penegecer BBM	Nasril	Limo Koto	
27	Bengkel Las	Fera Eka Putra	Jr. MKD Limo	
28	Kontraktor/ Perdag. Balas/Jasa	Yendri. Z	Limo Koto	
29	Pembuatan Terali Besi	Dedi Dores	Limo Koto	
30	Dgg BBM, Onderdil, Suku Cadang	Yose Marizal	Limo Koto	
31		Wirman	Pd. Sibusuk	
32	Perdag Eceran Air Mineral	Rita Roslaini	B. Marjulus	
33	Rumah Makan	Busnedi	Palangki	
34	Tempel Benen & Penegecer BBM	Darmin	Silokek	
35	Perdag Eceran, Premium, Premik	Betti	Psr. Jum'at	
36	Kontraktor	Gusnadi M	Lbk. Tarok	
37	Budi Daya Ikan	Muklek Sandra	Kp. Dalam	
38	IMB	Yofritas/ Fitriyeni	Parik Rantang	
39	Sawmil	Wan. M. Ikbal	Batang Karing	
40	Industri Peggergajian kayu	Jon Aldi	Kamang Baru	
41	Dagang Harian & Kosmetik	Sukma Dewiana	Limo Koto	
42	Kontraktor & Pertambangan	Nofrialdi	Limo Koto	
43	Kantor & Perdagangan Umum	Jonaldi	Nag. Limo Koto	
44	Industri Batu Bata	Bakri Dt. Majo Indo	Sari Bulan Ipuh	
45	Dg. Onderdil, BBM/ T dan Jual Oli	Masdi	Sbrg. Ombak	
46	Industri Batu Bata	Marah Buyung	Logas Ma. Sijig	
47	PT. Wahana Sejahtera	Drs. Syahril Syamra	Ganting Sijig	
48	SPBU	H. Rapani	M. Yamin Muaro	
49	Koperasi	Drs. Syukri MM	Lbk. Tarok	
50	Perdag Eceran Beras	Yulianis	Nag. Timbulun	
51	RMU	Yulianis	Pulasan	
52	Penyediaan Fasilitas Billyard	Nilo Augusta. S	Ma. Takung	
53	Dg. Harian & Penegecer BBM	Devi Naldi	Ma. Takung	
54	RMU	Artatinur	Tj. Bonai Aur	

55	Dagang Harian & BBM	Starman Peto B.	Kumanis		
56	Dagang Harian	Demitri	Limo Koto		
57	Dg. Harian & Pengecer BBM	Donal Eka Putra	Limo Koto		
58	Dg. Harian & Koter HP	Eka Asmarti	Pd. Laweh		
59	Dg. Harian	Yurlaili	Tj. Ampalu		
60	Kontraktor	Fauzan	Pd. Sibusuk		
61	Salon	Hari Sumardi	Nag. Palangki		
62	RMU	H. Jusmarni	Tj. Udani Palangki		
63	Dagang Harian	Asbul	Psr. Sijunjung		
64	Dagang Pecah Belah & Alat RT	H. Susti Marleni	Sbrg. Ombak Ma		
65	Kontraktor	Syafrizal ST	Sbrg. Ombak Ma		
66	Dagang BBM & BBMT	Irwan	Sijunjung		
67	Kontraktor	Endri Besmen	Pmtg. Panjang		
68	Dg. Pakaian Jadi, Elektronik & Perabot RT	Togi Manurung	Muaro		
69	Dg. Harian & BBM	Dafri Isman	Kp. Dalam		
70	Dagang Harian	Dirusman	Nag. Langki		
71	Menjual Hsl Bumi & BBM /T	Jufrida	TJ. Gadang		
72	Counter HP	Natalia	Sei. Lansek		



Lampiran 4.

Jenis pajak/ retribusi dan dasar hukum		
A.	Pajak daerah	
1	Pajak Hotel Dan Restoran <i>Perda no. 14 tahun 1998</i>	10 % x jumlah pembayaran yang di lakukan kepada hotel dan restoran/ rumah makan
2.	Pajak Hiburan <i>Perda no. 15 tahun 1998</i>	a. Tontonan film pada bioskop sebesar 20% b. Tontonan pada bioskop keliling (layar tancap) sebesar 15% c. Pertunjukan kesenian yang mempunyai nilai tradisional sebesar 5% d. Pertunjukan hotel dan restoran sebesar 20% e. Pertunjukan sirkus baik yang menggunakan tenaga binatang maupun yang di lakukan orang sebesar 15 % f. Pertunjukan pertandingan olahraga, usaha kolam renang , pemandian umum dan kolam pancing 10% g. Pertunjukan kesenian seperti show,kreasi dan sejenisnya yang di selenggarakan di tempat terbuka atau tertutup sebesar 15% h. permainan seperti bilyar sebesar 25%
3	Pajak reklame <i>Perda no 2 tahun 1999</i>	Maksimal 25%x nilai sewa reklame (biaya pemasangan,pemeliharaan, lama pasang, nilai strategis lokasi, dan jenis reklame): - reklame papan/ billboard/ megatron - reklame kain - reklame stiker - reklame selebaran - reklame berjalan termasuk pada kendaraan - reklame udara - reklame suara - reklame film/ slide - reklame peragaan
4	Pajak penerangan jalan	
5	Pajak pengambilan dan pengolahan galian c <i>Perda no 2 tahun 1998</i> Sk bupati no. 188.45/575/SK-BPT-1998	20% x nilai jual hasil eksploitasi Besar pajak terhutang atas pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian c untuk usaha: a. pasir, kerikil dan batu Rp. 1000,-/m ³ b. nitrat, batu garam dan tawas (alum) Rp.1700.-/m ³ c. asbes, talk, mika, magnesit, grafit, yarosit dan leusit Rp 2.100,-/m ³ d. pospat Rp 1.800,-/m ³ e. oker Rp 1.400,-/m ³ f. pasir kuarsa/ rijang, kaolin/ toseki Rp 2.100,-/m ³

		<p>g. feldspar, marmar Rp 2.500,-/m³</p> <p>h. batu tulis, dilomit, kalsit Rp 500,-/m³</p> <p>i. tras Rp 300,-/m³</p> <p>j. obsidian, perlit Rp.850,-/m³</p> <p>k. gips, bentonit, batu apung, tanah diatome, tanah serap, zeolit Rp 1.500,-/m³</p> <p>l. granit dan andesit : bubuk/ pecah (split) Rp 1.000,-/m³</p> <p>m. granit dan andesit Blok Rp 3.000,-/m³</p> <p>n. batu kapur Rp 1.500,-/m³</p> <p>o. tanah liat Rp 500,-/m³</p> <p>p. batu bata Rp 5,-/m³</p> <p>besar pajak terhutang atas pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian c untuk masyarakat:</p> <p>a. pasir, kerikil dan batu Rp 500,-/m³</p> <p>b. tanah liat Rp 300,-/m³</p> <p>c. batu bata Rp 2.50</p>
6	Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan Perda no. 3 tahun 1998	20% x nilai perolehan air
7	Pajak sarang burung walet Perda no. 8 tahun 2001	10% x nilai jual bruto
B	Retribusi daerah	
1	Retribusi pelayanan kesehatan Perda no 4 tahun 1998	<p>Retribusi rawat jalan/ karcis:</p> <p>a. rumah sakit sebesar Rp 2.500,- s.d. Rp 5.000,-</p> <p>b. puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, polindes sebesar Rp 2.000 s.d. Rp 5.000,-</p>
2	Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan Perda no.22 tahun 1998	<p>a. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - luas bangunan < 71 m² Rp 500,-/bulan - luas bangunan 71 s.d 300m² Rp 1.000,-/bulan - luas bangunan > 300m² Rp 1.500,-/bulan <p>b. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan antara lain pasar, pertokoan, rumah makan, kedai minuman, dan kios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kecil (volume sampah < 0.51 m³/hr) Rp 1.000,-/bulan - sedang (volume sampah 0.51 s.d 0.75m³/hr) Rp 4.000,-/bulan - besar (volume sampah > 0.75m³/hr) Rp 5.000,-/bulan

3	Retribusi penggantian biaya cetak KTP/ akte capil	<p>a. penggantian biaya cetak KTP Rp.1.000,-</p> <p>b. penggantian biaya cetak Akte Catatan Sipil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WNI <ul style="list-style-type: none"> ➢ Anak pertama dan kedua Rp 4.000, ➢ Anak ketiga dan seterusnya Rp 8.000,- • WNA <ul style="list-style-type: none"> ➢ Anak pertama dan kedua Rp 15.000,- ➢ Anak ketiga dan seterusnya Rp 30.000,- <p>c. penerbitan kutipan Akte Kelahiran Kedua dan seterusnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WNI Rp 10.000,- • WNA Rp 30.000,- <p>d. salinan Akte Kelahiran :</p> <ul style="list-style-type: none"> • WNI Rp 25.000,- • WNA Rp 30.000,- <p>e. pencatatan perkawinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • WNI: <ul style="list-style-type: none"> - didalam kantor Rp 10.000,- - di luar kantor Rp 25.000,- • WNA: <ul style="list-style-type: none"> - didalam kantor Rp 25.000,- - di luar kantor Rp 50.000,- <p>f. pencatatan penceraian</p> <ul style="list-style-type: none"> • WNI Rp 25.000,- • WNA Rp 50.000,- <p>g. pencatatan kematian</p> <ul style="list-style-type: none"> • WNI Rp 2.500,- • WNA Rp 5.000,- <p>h. pencatatan pengakuan dan pengesahan anak</p> <ul style="list-style-type: none"> • WNI Rp 25.000,- • WNA Rp 50.000,- <p>i. pencatatan pengakuan anak</p> <ul style="list-style-type: none"> • WNI Rp 25.000,- • WNA Rp 50.000,-
4	Retribusi parkir di tepi jalan umum Perda no 17 tahun 1998	<p>a. kepadatan parkir rendah</p> <p>- sedan, jeep,minibus, pic-up dan sejenisnya Rp 300,-</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - bus, truk dan alat berat lainnya Rp 500,- - sepeda motor Rp 200,- <p>b. kepadatan parkir sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> - sedan, jeep, minibus, pic-up dan sejenisnya Rp 500,- - bus, truk dan alat berat lainnya Rp 1.000,- - sepeda motor Rp 300,- <p>c. kepadatan parkir tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> - sedan, jeep, minibus, pic-up dan sejenisnya Rp 1.000,- - bus, truk dan alat berat lainnya Rp 1.500,- - sepeda motor Rp 500,-
5	Retribusi pasar Perda no 6 tahun 1999	<p>a. pasar kelas I</p> <p>1. los</p> <ul style="list-style-type: none"> - semi permanen: <ul style="list-style-type: none"> 1 M X 1.5 M = Rp 400,-/ hr 1.5 M X 1.5 M = Rp 500,-/ hr - permanen <ul style="list-style-type: none"> 2 M X 2.5 M = Rp 600,-/ hr 2 M X 3 M = Rp 800,-/ hr 3 M X 3 M = Rp 1.000,-/ hr <p>2. Kios</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 M X 3 M = Rp 20.000,-/ hr 3 M X 4 M = Rp 25.000,-/ hr <p>3. Pelataran</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 M X 1 M = Rp 400,-/ hr 1.5 M X 1.5 M = Rp 500,-/ hr 2 M X 2 M = Rp 600,-/ hr <p>b. pasar kelas II</p> <ul style="list-style-type: none"> - semi permanen: <ul style="list-style-type: none"> 1 M X 1.5 M = Rp 400,-/ hr 1.5 M X 1.5 M = Rp 500,-/ hr - permanen <ul style="list-style-type: none"> 2 M X 2.5 M = Rp 600,-/ hr 2 M X 3 M = Rp 800,-/ hr 3 M X 3 M = Rp 1.000,-/ hr <p>2. Kios</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 M X 3 M = Rp 20.000,-/ hr 3 M X 4 M = Rp 25.000,-/ hr <p>3. Pelataran</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 M X 1 M = Rp 300,-/ hr 1.5 M X 1.5 M = Rp 400,-/ hr 2 M X 2 M = Rp 500,-/ hr <p>C. pasar kelas III</p>

		<p>1. los</p> <ul style="list-style-type: none"> - semi permanen: <ul style="list-style-type: none"> 1 M X 1.5 M = Rp 200,-/ hr 1.5 M X 1.5 M = Rp 300,-/ hr - permanen <ul style="list-style-type: none"> 2 M X 2.5 M = Rp 400,-/ hr 2 M X 3 M = Rp 500,-/ hr 3 M X 3 M = Rp 600,-/ hr <p>2. Kios</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 M X 3 M = Rp 10.000,-/ hr 3 M X 4 M = Rp 15.000,-/ hr <p>3. Pelataran</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 M X 1 M = Rp 200,-/ hr 1.5 M X 1.5 M = Rp 300,-/ hr 2 M X 2 M = Rp 400,-/ hr
7	Retribusi pemakaian kekayaan daerah Perda no. 19 tahun 1998	<p>a. pemakaian tanah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk pemasangan sarana/ media luar ruangan Rp 50.000,-/tahun • Untuk berjualan tanaman hias, ukiran, dan patung patung kesenian Rp 20.000,-/ bulan • Untuk usaha dan tempat tinggal Rp 0.05% X harga tanah x luas tanah/tahun <p>b. pemakaian bangunan/ gedung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gedung bioskop sebesar Rp 100.000,-/ bulan • Gedung sekolah: <ul style="list-style-type: none"> - Untuk SD Rp 100.000,- bulan - Untuk kursus Rp 150.000,-/bulan • Rumah dinas: <ul style="list-style-type: none"> - Permanen sebesar Rp 300,- /m2/bln - Semi permanen Rp 200,-/m2/bln <p>c. pemakaian ruang tempat pesta dan pertemuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siang hari Rp 75.00,-/ hari • Malam hari Rp 85.000,-/hari <p>d. pemakaian kendaraan/ alat berat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bulldozer Rp 150.000,-/hr 2. motor grader Rp 125.000,-/hr 3. wheel loader Rp 100.000,-/hr 4. tyre roller Rp 60.000,-/hr 5. wheel excavator Rp 150.000,-/hr 6. dump truck Rp 50.000,-/hr 7. road maintenance Rp 75.000,-/hr

	<p>8. terie whell roller Rp 60.000,-/hr</p> <p>9. vibro roller Rp 83.000,-/hr</p> <p>10. compressor Rp 25.000,-/hr</p> <p>11. traill 1 ton Rp 5.000,-</p> <p>12. vibro rollercase vibromex Rp 25.000,-/hr</p> <p>13. tandem roller Rp 43.000,-/hr</p> <p>14. mobil tangki air Rp 25.000,-/hr</p> <p>15. stone cruise Rp 162.000,-/hr</p> <p>16. generating set Rp 30.000,-/hr</p> <p>17. perahu karet Rp 50.000,-/hr</p> <p>18. truck Rp 60.000,-/hr</p> <p>19. tuck bak kayu Rp 25.000,-/hr</p> <p>20. aspal spreyer Rp 20.000,-/hr</p> <p>21. kendaraan bus Rp 150.000,-/hr</p> <p>22. mobil tinja Rp 35.000,-/hr</p> <p>e. sarana/ panggung media luar ruan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentas Rp 50.000,-/set/hr - tenda Rp 10.000,-/set/hr - kursi Rp 400,-/bh/hr - organ tunggal Rp 350.000,-/hr
--	--



Tentang

PENGANGKATAN SUSUNAN KOMISI PEMBIMBING
PROGRAM MAGISTER (S2) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS

TAS NAMA : Lis Eflanti
NO. BP : 0921202034
PROGRAM STUDI : Polokda

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS

Membaca : Permohonan Pengesahan Susunan Komisi Pembimbing bagi : Lis Eflanti

Menimbang : bahwa permohonan tersebut di atas dapat disetujui dan perlu ditetapkan dengan surat keputusan :

- Meningat :
1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No.43 Tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1990;
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999;
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0429/0/1992;
 - b. Nomor 0196/0/1995
 5. Surat Keputusan DIKTI No.361/DIKTI/Kep/1996;
 6. Surat Keputusan Rektor Unand No. 710/XIA/A/Unand-2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Bagi mahasiswa yang bernama : Lis Eflanti BP. 0921202034 adalah mahasiswa Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, Program Studi : Polokda

: Mahasiswa tersebut di atas mempunyai Susunan Komisi Pembimbing Terdiri dari :

1. Dr.Erwin,M.SI
2. Dr.Sri Zulchairiyah,MA
3. (Anggota)
4. (Anggota)
5. (Ketua)

: Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan dan sesuai dengan peraturan Universitas Andalas yang berlaku.

: Segala sesuatu akan diperbaiki kembali, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 05 Juli 2010



Prof.Dr.Ir. H. Novirman Jamarun, M.Sc
NIP. 19551106 198003 1 001

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

**FORMULIR MINAT PENELITIAN
DAN USULAN KOMISI PEMBIMBING**

NAMA : LIS ELFIANTI
NO. BP : 09 21 20 20 34
PROGRAM STUDI : POLOK DA

RENCANA TOPIK PENELITIAN : (Diisi ketiga alternatif)

Alternatif I : Upaya peningkatan Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah Klausuranya Pajak
dan Retribusi di Kabupaten Sijunjung

Alternatif II : Intensifikasi Potensi Pajak dan Retribusi
Daerah untuk pengalangan Daerah di
Kabupaten Sijunjung

Alternatif III : Strategi dan Kinerja Dinas Pengelolaan
Daerah Kabupaten Sijunjung Untuk meningkatkan
ketukan penerimaan PAD khususnya Pajak dan
Retribusi di kab. Sijunjung

USULAN KOMISI PEMBIMBING : (Diisi ketiga alternatif)

Alternatif I Ketua : 1. DR. Erwin, Msi
Anggota : 2. Dr. Sri Sulchariyah, MA
Anggota : _____

Alternatif II Ketua : _____
Anggota : _____
Anggota : _____

Alternatif III Ketua : _____
Anggota : _____
Anggota : _____

Disetujui

Topik Penelitian : Alternatif I

Komisi Pembimbing : Alternatif _____

Padang, 1 Juni, 20 10

Ketua Progam Studi,

Mahasiswa Ybs,





(DR. Sri Sulchariyah, MA)

(Lis Elfianti)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Gedung E, Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Telp. 0751 - 71686, Fax. 0751 - 71691 Website : <http://www.pascasauand.org>; email : admin@pascasauand.org

Dilisi rangkap 6

PERMOHONAN PENGESAHAN SUSUNAN ANGGOTA KOMISI PEMBIMBING

Tanda kesediaan
Tanda tangan
Tanggal 29-06-2020
Dr. Irwin. Msi.
Dr. Sri Zulchayyah. MA.

non agar : (1).

(2).

(3).

(4).

ahkan sebagai anggota Komisi Pembimbing dari :

N a m a

Nomor Buku Pokok

P r o g r a m

Pendaftaran pertama tahun ajaran

Program Studi

an dan terima kasih

Tanggal, 20

Pembimbing Utama,

Disetujui oleh :

2020

29-06-2020

Ketua Program Studi,

Direktur

20

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Potensi dan Strategi pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sijunjung.

Nama : Lis Elfianti,SE

No. BP : 0921202034

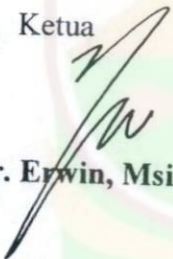
Program Studi : Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD)
Pemusatan Politik Lokal dan Otonomi Daerah

Proposal Penelitian ini telah dikolouumkan dihadapan Dosen Penguji Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, pada tanggal 28 Januari 2011

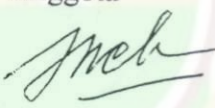
Menyetujui :

1. Komisi Pembimbing

Ketua


Dr. Erwin, Msi.

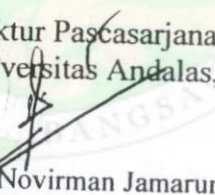
Anggota


DR. Sri Zul Chairiyah, MA

2. Ketua Program Studi PWD


DR. Sri Zul Chairiyah, MA

3. Direktur Pascasarjana
Universitas Andalas,


Prof. Dr. Ir. H. Novirman Jamarun, M.Sc





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Gedung E, Kampus Unand Limau Manis, PO Box. 271-PADANG 25163
Telp.0751-71686, Fax 0751 – 71691 Email : tatausaha@pasca.unand.ac.id

Nomor : 109/H.16.S2/PL/2011

Lamp : -

Hal : **Penelitian Instansi**

29 Maret 2011

Kepada Yth.

**Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Sijunjung**

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami bermaksud menugaskan seorang mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Universitas Andalas:

Nama : Lis Elfianti
No. BP : 0921202034
Program Studi : Politik Lokal Otonomi Daerah

Untuk melakukan penelitian selama 2 bulan, terhitung mulai bulan Maret s/d April 2011. Pada Lembaga/Instansi yang berada dibawah pengawasan Saudara, dalam menyelesaikan studinya pada Program Pascasarjana (S2) Universitas Andalas dengan judul : **"Potensi dan Strategi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sijunjung"**.

Sehubungan dengan maksud tersebut, kami harapkan Saudara berkenan memberi izin yang bersangkutan untuk **mengumpulkan data**, dalam rangka pelaksanaan penelitiannya.

Demikianlah semoga Saudara berkenan, dan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Direktur

Prof. Dr. Ir. H. Novirman Jamarun, M.Sc *dlr*

NIP. 195511061980031001

Tembusan Yth

1. Ketua Program Studi Politik Lokal Otonomi Daerah
2. Ketua Komisi Pembimbing
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Gedung E, Kampus Unand Limau Manis, PO Box. 271-PADANG 25163
Telp.0751-71686, Fax 0751 – 71691 Email : tatausaha@pasca.unand.ac.id

Nomor : 109/H.16.S2/PL/2011

29 Maret 2011

Lamp : -

Hal : *Penelitian Instansi*

Kepada Yth.

**Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sijunjung**

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami bermaksud menugaskan seorang mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Universitas Andalas:

Nama : Lis Elfianti
No. BP : 0921202034
Program Studi : Politik Lokal Otonomi Daerah

Untuk melakukan penelitian selama 2 bulan, terhitung mulai bulan Maret s/d April 2011. Pada Lembaga/Instansi yang berada dibawah pengawasan Saudara, dalam menyelesaikan studinya pada Program Pascasarjana (S2) Universitas Andalas dengan judul : **"Potensi dan Strategi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sijunjung"**.

Sehubung dengan maksud tersebut, kami harapkan Saudara berkenan memberi izin yang bersangkutan untuk **mengumpulkan data**, dalam rangka pelaksanaan penelitiannya.

Demikianlah semoga Saudara berkenan, dan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Direktur



Prof. Dr. Ir. H. Novirman Jamarun, M.Sc

NIP. 195511061980031001

Tembusan Yth

1. Ketua Program Studi **Politik Lokal Otonomi Daerah**
2. Ketua Komisi Pembimbing
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Gedung E, Kampus Unand Limau Manis, PO Box. 271-PADANG 25163
Telp.0751-71686, Fax 0751 – 71691 Email : tatausaha@pasca.unand.ac.id

Nomor : 109/H.16.S2/PL/2011

Lamp : -

29 Maret 2011

Hal : *Penelitian Instansi*

Kepada Yth.

**Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Sijunjung**

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami bermaksud menugaskan seorang mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Universitas Andalas:

Nama : Lis Elfianti
No. BP : 0921202034
Program Studi : Politik Lokal Otonomi Daerah

Untuk melakukan penelitian selama 2 bulan, terhitung mulai bulan Maret s/d April 2011. Pada Lembaga/Instansi yang berada dibawah pengawasan Saudara, dalam menyelesaikan studinya pada Program Pascasarjana (S2) Universitas Andalas dengan judul : **"Potensi dan Strategi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sijunjung"**.

Sehubungan dengan maksud tersebut, kami harapkan Saudara berkenan memberi izin yang bersangkutan untuk **mengumpulkan data**, dalam rangka pelaksanaan penelitiannya.

Demikianlah semoga Saudara berkenan, dan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Direktur



Prof. Dr. Ir. H. Novirman Jamarun, M.Sc H/r

NIP. 195511061980031001

Tembusan Yth

1. Ketua Program Studi Politik Lokal Otonomi Daerah
2. Ketua Komisi Pembimbing
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 17 telp. (0754) 20186
MUARO SIJUNJUNG – 27511

Website <http://www.Sijunjung.go.id> email : pdet@sijunjung.go.id

REKOMENDASI

Nomor : B.070/63 /KPL/IV-2011
Tentang Izin Penelitian

Berdasarkan surat Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang Nomor: 109/H.16.S2./PL/2011 tanggal 29 Maret 2011 perihal mohon Izin Penelitian, setelah di pelajari pada prinsipnya kami menyetujui maksud tersebut yang dilakukan oleh :

Nama : **LIS ELFIANTI**
Tempat / Tgl. Lahir : Batu Sangkar / 8 Oktober 1966
Pekerjaan / P. Studi : Mahasiswi / Politik Lokal Otonomi Daerah
Alamat : Perumnas Selasah Indah Blok I/9
Nomor Identitas : 1303044810660001
Judul Penelitian : **" Potensi Dan Strategi Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sijunjung "**
Lokasi Penelitian : Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Kantor Lingkungan Hidup dan Pelayanan Terpadu, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sijunjung
Waktu Penelitian : 7 April s/d 30 April 2011

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan Study bagi yang bersangkutan.
2. Peneliti harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat/instansi yang di tuju sebelum dan diakhir proses penelitian.
3. Peneliti agar menghormati adat istiadat masyarakat setempat.
4. Memberikan Data/hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung cq.Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas kabupaten Sijunjung
5. Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat dianggap pelanggaran dan kepada Peneliti dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Demikian rekomendasi ini kami berikan untuk menjadi perhatian saudara sepenuhnya.

Muaro Sijunjung, 7 April 2011



KABUPATEN SIJUNJUNG
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS
MUARO SIJUNJUNG

PRIZAL M.Si

00402 199009 1 001

Disampaikan kepada Yth :
Gubernur Sumbar Cq. Badan Kesbang dan Linmas di Padang.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Sijunjung (Sebagai laporan).
Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang
Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Pelayanan Terpadu
Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Peneliti yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Gedung E, Kampus Unand Limau Manis
PO Box.271-PADANG 25163

Telp.0751-71686, Fax.0751-71691 Email: pascasarjanaunand@yahoo.co.id

Nomor : 937/UN.16.S2/ KM/2011

20 Juli 2011

Lamp : 1(satu) berkas

Hal : **Undangan Seminar**

Kepada Yth.

Sdr. _____

Dosen Pembimbing / Penguji

Program Pascasarjana Universitas Andalas

di

Padang

Dengan hormat, kami mengundang saudara untuk menghadiri Seminar Proposal Penelitian mahasiswa atas nama :

Nama : **Lis Elfianti**
Program Studi : **Politik Lokal dan Otonomi Daerah**
BP : **0921202034**
Judul : **Potensi dan strategi Pengelolaan Pajak dan Kontribusi Daerah di Kabupaten Sijunjung**

Pada :

Hari / Tanggal : **Jum'at/ 22 Juli 2011**

Jam : **14.00 WIB**

Tempat : **10.000 f Ruang Seminar**

Demikianlah semoga dimaklumi, atas kehadiran saudara diucapkan terima kasih.

Ain Direktur
ASDIR I,
Prof. Dr. Syukri Arief, M.Engt
NIP. 19660918 199103 1 005

Catatan :

Bila Saudara berhalangan hadir, agar dapat menghubungi
PPs Unand paling lambat sehari sebelumnya



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Alamat: Jl. Prof. Moh. Yamin, SH. No. 17 Telp. No. (0754) 20010

Muaro Sijunjung - 27511

Muaro Sijunjung, Juni 2011

Nomor : 140/ /DPKD-2011

Sifat : Penting

Lamp :

Perihal : Penelitian.

Kepada

Yth. Bpk. Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Andaa Padang

di

Padang.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama ; LIS ELFIANTI, SE

NO. BP ; 0921202034

Program studi ; PWD Pemusatan POLOKDA

A l a m a t ; Komplek Perumahan Salasah Indah Blok I/9

Muaro Kecamatan Sijunjung

Yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Andalas Padang dengan judul : POTENSI DAN STRATEGI PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI KASUS DI KABUPATEN SIJUNJUNG mulai 1 Maret s/d 31 April 2011

Demikian surat keterangan ini diberikan epada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih

KERALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAEAH



(Signature)
(HASMIZON, SE, MSi)
NIP. 19671202 199308 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

Alamat: Jl. Prof. Moh. Yamin, SH. No. 58 Telp. No. (0754) 20010
Muaro Sijunjung - 27511

Nomor : 140/174.A /YTPMLH-2011

Sifat : Penting

Lamp :

Perihal : Penelitian.

Muaro Sijunjung, 29 Juni 2011

Kepada

Yth. Bpk. Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Andaa Padang

di

Padang.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama ; LIS ELFIANTI, SE

NO. BP ; 0921202034

Program studi ; PWD Pemusatan POLOKDA

A l a m a t ; Komplek Perumahan Salasah Indah Blok 1/9

Muaro Kecamatan Sijunjung

Yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Andalas Padang dengan judul : POTENSI DAN STRATEGI PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI KASUS DI KABUPATEN SIJUNJUNG mulai 1 Maret s/d 31 April 2011

Demikian surat keterangan ini diberikan epada yang bersangkutan untuk dapt dipergunakan seperlunya, terima kasih

AN. KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP PENANAMAN MODAL YANDU



(TANTI HERAWATI, SE)

NIP. 19740729 1993032 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Gedung E, Kampus Unand Limau Manis
PO Box.271-PADANG 25163

Telp.0751-71686, Fax.0751-71691 Email: pascasarjanaunand@yahoo.co.id

Nomor : 990/UN.16.S2/KM-2011

27 Juli 2011

Lamp. : -

Hal : Undangan Ujian Akhir

Kepada Yth :

Sdr. _____

Dosen Pembimbing/Penguji/ Undangan
Program Pascasarjana Univ. Andalas
di
Padang

Dengan hormat, kami harapkan kesediaan Saudara untuk dapat menguji mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Andalas tersebut dibawah ini :

Nama : Lis Elfianti
No. BP : 0921202034
Program Studi : POLOKDA

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

dalam ujian tesis yang berjudul :

“ Potensi dan Strategi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Studi Kasus di Kabupaten Sijunjung “

pada :

Hari/Tanggal : 28 Juli 2011 (Kamis)
Jam : 14.00 WIB
Tempat : Kapi R. U2

Demikianlah harapan kami, atas kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.



NIP. 196609181911031005